



LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2024

**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I PADANG**



KATA PENGANTAR



Sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara / Lembaga dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja ini berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama Tahun 2024 dalam kurun waktu 2020–2024 serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang selama tahun 2024. Kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan tugas tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh pegawai, unit-unit lintas program dan lintas sektor terkait. Saran yang membangun sangat kami harapkan, untuk mengatasi tantangan yang ditemukan demi peningkatan pencapaian kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang pada tahun mendatang. Semoga segala upaya yang telah kita lakukan mendapat rahmat dan ridho-Nya.

Padang, 30 Januari 2025
Kepala BKK Kelas I Padang,

dr. Mawari Edy, M.Epid
NIP. 197406012002121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Padang Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban kinerja BKK Kelas I Padang yang menggambarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang diperjanjikan antara Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sebagai salah satu UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), maka orientasi kinerjanya adalah mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kinerja Program P2P sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dijanjikan oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dengan Direktur Jenderal P2P dan semua indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut capaian target Perjanjian Kinerja Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang pada Tahun 2024 :

1. Indikator indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan / bandara/ PLBDN dengan capaian 101,04% dimana realisasi sebesar 0,97 dari target 0,96.
2. Indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan capaian 100% dimana realisasi sebesar 100% dari target 100%.
3. Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dengan capaian 105,26% dimana realisasi sebesar 1 dari target 0,95.
4. Indikator nilai kinerja anggaran dengan capaian 104,75% dimana realisasi sebesar 91.13 dari target 87.
5. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan capaian 101,02% dimana realisasi sebesar 93,95 dari target 93.
6. Indikator nilai kinerja implementasi WBK satker dengan capaian 102,50% dimana realisasi sebesar 82,00 dari target 80.
7. Indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan capaian 145,16% dimana realisasi sebesar 120,48% dari target 83%.
8. Presentase realisasi anggaran dengan capaian 100,57% dimana realisasi sebesar 96,55% dari target 96%.

Pada tahun 2024 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang telah mencapai seluruh target indikator kinerja kegiatan yang diperjanjikan dengan rata-

rata capaian sebesar 107,54% dimana capaian ini meningkat dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 106,52%. Realisasi anggaran pada tahun 2024 dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2024 sebesar 96,55% atau sebesar Rp.19,805,470,658,- dari total pagu sebesar Rp.20,512,796,000,- lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 96,28% dengan pagu sebesar Rp.15.755.643.000,-.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan tentunya tidak terlepas dari permasalahan dalam mencapai target tersebut baik secara internal seperti pelaporan kegiatan dan rencana penarikan dana maupun secara eksternal seperti maraknya ICV palsu, masih kurang kooperatifnya fasyankes yang berada di wilker BKK Kelas I Padang dan arahan blokir anggaran dari pusat. Namun demikian BKK Kelas I Padang terus berusaha meningkatkan kinerja secara internal dengan memadukan kekuatan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran, sedangkan secara eksternal peningkatan menjalin kerjasama lintas program dan sektor terkait.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	viii
A. LATAR BELAKANG	12
B. ISU STRATEGIS.....	13
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	15
D. STRUKTUR ORGANISASI	16
E. SUMBER DAYA.....	17
F. MAKSUD DAN TUJUAN	21
G. SISTEMATIKA PENULISAN	22
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	23
A. PERENCANAAN KINERJA.....	23
B. PERJANJIAN KINERJA	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	32
INDIKATOR PERTAMA	32
INDIKATOR KEDUA	48
INDIKATOR KETIGA.....	59
INDIKATOR KEEMPAT	76
INDIKATOR KELIMA.....	83
INDIKATOR KEENAM.....	89
INDIKATOR KETUJUH	96
INDIKATOR KEDELAPAN	101
C. REALISASI ANGGARAN	107
BAB IV PENUTUP.....	113
A. KESIMPULAN.....	113
B. RENCANA TINDAK LANJUT	115
PUSTAKA ACUAN	117
LAMPIRAN	118

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKK Kelas I Padang.....	16

DAFTAR TABEL

Halaman

1.	Tabel 1.1	Distribusi Pegawai BKK Kelas I Padang berdasarkan jabatan Tahun 2024.....	18
2.	Tabel 1.2	Distribusi Pegawai BKK Kelas I Padang berdasarkan pangkat dan golongan Tahun 2024	19
3.	Tabel 1.3	Distribusi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2024	21
4.	Tabel 2.1	Matrik Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024	26
5.	Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2024.....	28
6.	Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	29
7.	Tabel 3.1	Target dan Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2024.....	31
8.	Tabel 3.2	Realisasi Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut, dan Lingkungan BKK Kelas I Padang Tahun 2024.....	36
9.	Tabel 3.3	Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara / PLBDN Tahun 2024.....	37
10.	Tabel 3.4	Konversi Nilai Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN Tahun 2024	37
11.	Tabel 3.5	Persentase Orang yang Diperiksa Sesuai Standar Tahun 2020 s.d. Tahun 2024	38
12.	Tabel 3.6	Persentase Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.....	39
13.	Tabel 3.7	Persentase Barang yang Diperiksa Sesuai Standar Tahun 2020 s.d Tahun 2024	39
14.	Tabel 3.8	Persentase Lingkungan yang Diperiksa Sesuai Standar Tahun 2020 s.d Tahun 2024.....	40
15.	Tabel 3.9	Faktor Risiko pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan yang ditemukan dan dikendalikan Tahun 2024	50
16.	Tabel 3.10	Faktor Risiko Pada Orang Tahun 2024.....	54
17.	Tabel 3.11	Faktor Risiko Pada Alat Angkut Tahun 2024	54
18.	Tabel 3.12	Faktor Risiko Pada Lingkungan Tahun 2024	55
19.	Tabel 3.13	Target dan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara Tahun 2024.....	61

20. Tabel 3.14	Perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko dipintu Masuk Negara tahun 2024.....	75
21. Tabel 3.15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2024.....	77
22. Tabel 3.16	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024..	78
23. Tabel 3.17	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024	84
24. Tabel 3.18	Hasil Review Kinerja Implementasi WBK Tahun 2024	90
25. Tabel 3.19	Capaian Kinerja Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2024	96
26. Tabel 3.20	Nilai Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024..	102
27. Tabel 3.21	Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024 ..	107
28. Tabel 3.22	Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Tahun 2024	108
29. Tabel 3.23	Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Output Tahun 2024	109
30. Tabel 3.24	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024..	112

DAFTAR GRAFIK

Halaman

1. Grafik 1.1 Distribusi Pegawai BKK Kelas I Padang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024	17
2. Grafik 1.2 Distribusi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2024	17
3. Grafik 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tim Kerja Tahun 2024	19
4. Grafik 1.4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tempat Tugas Tahun 2024	20
5. Grafik 1.5 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	20
6. Grafik 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDNTahun 2024.....	36
7. Grafik 3.2 Perbandingan Persentase Orang yang Diperiksa sesuai Standar Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.....	38
8. Grafik 3.3 Perbandingan Persentase Alat Angkut yang Diperiksa sesuai Standar Tahun 2020 s.d Tahun 2024	39
9. Grafik 3.4 Perbandingan Persentase Barang yang Diperiksa Sesuai Standar Tahun 2020 s.d Tahun 2024.....	40
10. Grafik 3.5 Perbandingan Persentase Lingkungan yang Diperiksa sesuai Standar Tahun 2020 s.d Tahun 2024.....	41
11. Grafik 3.6 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan Target Jangka Menengah RAK Tahun 2020-2024	41
12. Grafik 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan Satuan Kerja Setara Tahun 2024	42
13. Grafik 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2024.....	51
14. Grafik 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2020 s/d 2024	51
15. Grafik 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut,	

Barang dan Lingkungan dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020-2024)	52
16. Grafik 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan Target Nasional	52
17. Grafik 3.12 Perbandingan Capaian Target Kinerja Indikator Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan Organisasi yang sejenis/setara	53
18. Grafik 3.13 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN Tahun 2024	62
19. Grafik 3.14 Perbandingan Respon SKD, KLB dan Bencana Tahun 2020 s.d Tahun 2024	62
20. Grafik 3.15 Perbandingan Capaian Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Pinjal ≤ 1 Tahun 2020 s.d Tahun 2024	63
21. Grafik 3.16 Perbandingan Capaian Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1) Tahun 2020 s/d 2024	64
22. Grafik 3.17 Perbandingan Capaian Pesentase bandara/Pelabuhan dengan indeks populasi kecoa < 2 Tahun 2020 s/d 2024	64
23. Grafik 3.18 Perbandingan Capaian Persentase bandara/Pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2 Tahun 2020 s/d 2024	65
24. Grafik 3.19 Perbandingan Capaian Persentase bandara/Pelabuhan dengan HI perimeter = 0 Tahun 2020 s/d Tahun 2024.....	65
25. Grafik 3.20 Perbandingan capaian persentase bandara/Pelabuhan dengan HI buffer < 1 Tahun 2020 s/d Tahun 2024.....	66
26. Grafik 3.21 Perbandingan Capaian persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan Tahun 2020 s.d Tahun 2024.....	66
27. Grafik 3.22 Perbandingan Capaian Pesentase lokus TPM laik Hygien Tahun 2020 s.d 2024.....	67
28. Grafik 3.23 Perbandingan Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat Kesehatan Tahun 2020 s.d Tahun 2024.....	68
29. Grafik 3.24 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah RAK 2020-2024	69

30. Grafik 3.25 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN Tahun 2024 dengan Organisasi Sejenis.....	70
31. Grafik 3.26 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024	78
32. Grafik 3.27 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 s.d Tahun 2024.....	79
33. Grafik 3.28 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 dengan RAK Tahun 2020-2024	79
34. Grafik 3.29 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 dengan Standar Nasional	80
35. Grafik 3.30 Perbandingan Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 dengan Organisasi Sejenis.....	80
36. Grafik 3.31 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.....	85
37. Grafik 3.32 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 s.d Tahun 2024	85
38. Grafik 3.33 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Dengan RAK Tahun 2020 s.d Tahun 2024	86
39. Grafik 3.34 Perbandingan Capaian Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Dengan Organisasi Sejenis	86
40. Grafik 3.35 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2024	91
41. Grafik 3.36 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2020 s.d Tahun 2024.....	91
42. Grafik 3.37 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2024 dengan RAK Tahun 2020 s.d Tahun 2024	92
43. Grafik 3.38 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2024 Dengan Organisasi Sejenis	93
44. Grafik 3.39 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2024.....	97
45. Grafik 3.40 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2020 s.d Tahun 2024	97

46. Grafik 3.41 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2024 dengan RAK Tahun 2020 s.d Tahun 2024	98
47. Grafik 3.42 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya antara BKK Kelas I Padang dengan Organisasi Sejenis.....	98
48. Grafik 3.43 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	102
49. Grafik 3.44 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2020 s.d Tahun 2024.....	103
50. Grafik 3.45 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan RAK Tahun 2020 s.d Tahun 2024 .	103
51. Grafik 3.46 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Realisasi Anggaran antara BKK Kelas I Padang dengan Organisasi Sejenis	104
52. Grafik 3.47 Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2020-2024	107
53. Grafik 3.48 Persentase Realisasi Anggaran tahun 2020-2024	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi pengukuran kinerja dan evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang Tahun 2020-2024, khususnya target kinerja tahun 2024.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang (BKK) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang bertugas untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah melalui bandara / pelabuhan / PLBDN.

International Health Regulation (IHR) 2005 mengamanatkan kepada negara-negara anggota untuk mengembangkan, memperkuat dan mempertahankan kapasitas kesehatan masyarakat nasional, agar dapat mendeteksi, menilai, melaporkan berbagai peristiwa dan melakukan respon dengan cepat dan efektif terhadap berbagai risiko dan emergensi kesehatan masyarakat. Selain itu setiap negara mempunyai kemampuan untuk mencegah dan menangkal transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan serta meresahkan dunia (PHEIC).

Negara-negara anggota juga harus melakukan penyesuaian legal dan administrasi untuk memfasilitasi kepatutan terhadap IHR 2005.

Pelabuhan dan bandara merupakan salah satu titik simpul pertemuan atau aktivitas keluar masuk alat angkut, barang dan orang, sekaligus sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit, dan merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular baru (*new emerging diseases*), maupun penyakit menular lama yang timbul kembali (*re-emerging diseases*). Ancaman penyakit tersebut merupakan dampak negatif dari diberlakukannya pasar bebas atau era globalisasi, dan dapat menimbulkan kerugian besar baik pada sektor ekonomi, perdagangan, sosial budaya, maupun politik yang berdampak besar kepada suatu negara atau daerah.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I memiliki 5 (lima) wilayah kerja yaitu pelabuhan yaitu Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Bungus, Pelabuhan Sikakap, Pelabuhan Muara Padang dan Bandara Internasional Minangkabau serta memiliki 1 (satu) pos yaitu Pelabuhan Tuapejat. Dimana Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Bungus dan Bandara Internasional Minangkabau merupakan pelabuhan dan bandara internasional.

Disamping itu Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Bungus melakukan kegiatan ekspor impor dari dan ke luar wilayah kerja BKK Kelas I Padang sehingga memiliki resiko terjadinya penyebaran penyakit. Pelabuhan dan bandara merupakan lokasi yang memiliki aktivitas tinggi pergerakan alat angkut, muatan maupun orang. Tingginya mobilitas ini, dapat menyebabkan kemungkinan penyebaran penyakit antar satu daerah ke daerah yang lain juga semakin meningkat.

B. ISU STRATEGIS

Setelah berhasil dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dengan sinergi antara pemerintah dan Masyarakat mengingatkan bahwa pentingnya membangun sistem ketahanan nasional. Pasca pandemi, fokus Kementerian Kesehatan beralih ke peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui rancangan enam pilar transformasi sistem kesehatan nasional guna mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Namun, harus ada kesadaran menyeluruh, bahwa enam pilar transformasi kesehatan dapat ditegakkan untuk perubahan yang lebih baik apabila ada kolaborasi yang erat dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

Upaya dalam mencapai transformasi Kesehatan salah satunya dengan memprioritaskan pada Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dalam sistem ketahanan nasional. Banyak tantangan dan butuh kesiapan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi ini, salah satunya yaitu bagaimana kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi penyakit infeksi emerging dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan dalam melaksanakan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB.

Pelaksanaan sistem kewaspadaan dini dan respon menjadi salah satu upaya penanggulangan untuk pencegahan terhadap suatu penyakit dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi munculnya penyakit potensial KLB/wabah/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, termasuk emerging, re-emerging dan new-emerging disease

Salah satu emerging disease yang menjadi perhatian adalah Mpox atau cacar monyet. Penyakit ini menular melalui kontak langsung dengan cairan tubuh seperti air liur, darah, dan droplet. Kasus Mpox terakhir dilaporkan pada minggu ke-23 tahun 2024, sehingga total kasus di Indonesia sebanyak 88 kasus konfirmasi dengan 3 kematian. Kasus Mpox tersebar di 5 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Petugas karantina di pelabuhan dan bandara bertugas untuk mengawasi dan mendeteksi dini kasus Mpox. Bentuk kesiapsiagaan terhadap penanganan kasus Mpox adalah dengan melaksanakan penilaian risiko cepat (Rapid Risk Assessment) sebagai bagian dari rencana strategi pengendalian kasus Mpox di Indonesia. Selain itu, Pencegahan Mpox di pelabuhan dan bandara dilakukan dengan memasang thermal scanner dan meningkatkan pengawasan visual.

Pada pengawasan lalu lintas orang, peningkatan jumlah jemaah umroh berdampak pada peningkatan pelayanan vaksinasi internasional. BKK Kelas I Padang melayani vaksinasi meningitis untuk pelaku perjalanan luar negeri yang akan berkunjung ke negara Arab Saudi, termasuk para jemaah umroh dan haji. Total Pemberian Vaksinasi Meningitis di BKK Kelas I Padang selama tahun 2024 sebanyak 4866 dosis. Cakupan ini mengalami kenaikan sebanyak 414,833% dibandingkan tahun 2023 karena dikeluarkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang menyatakan bahwa vaksin meningitis meningococcus merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang datang ke Arab Saudi, menggunakan visa haji dan umrah. Selain vaksinasi meningitis BKK Kelas I Padang juga melayani vaksinasi Yellow Fever

sebanyak 85 orang pada tahun 2024, dan Vasinasi Influenza sebanyak 35 orang. Pada akhir tahun 2024 adanya mandatory pelaksanaan layanan Penerbitan Dokumen Kesehatan melalui SSN Pengangkut di pelabuhan Teluk Bayur BKK Kelas I Padang dalam rangka pelaksanaan program Strategi Nasional PK (Pencegahan Korupsi) di Pelabuhan Teluk Bayur.

Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan masih menjadi isu kesehatan yang harus dilakukan upaya peningkatan. Faktor risiko kesehatan lingkungan baik dari segi fisik, kimia dan biologis masih menjadi bagian yang berpengaruh dalam status kesehatan. Dengan adanya amanat dan target dalam SDGs goals 6.1 bahwa mencapai 100% akses air minum aman maka kualitas air minum yang aman harus menjadi hal yang penting dan harus dijamin kualitasnya. Berdasarkan hal tersebut maka sesuai Permenkes No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan mengamanatkan bahwa salah satunya Tempat Pengolahan Pangan harus memenuhi standar laik dalam keadaan memenuhi syarat serta terbebas dari faktor risiko penularan penyakit dengan adanya label pengawasan dan SLHS.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar dan masuknya penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BKK Kelas I Padang diantaranya menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, baraong, dan/atau lingkungan;
3. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. pelaksanaan pelayanan Kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;

7. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi UPT BKK.

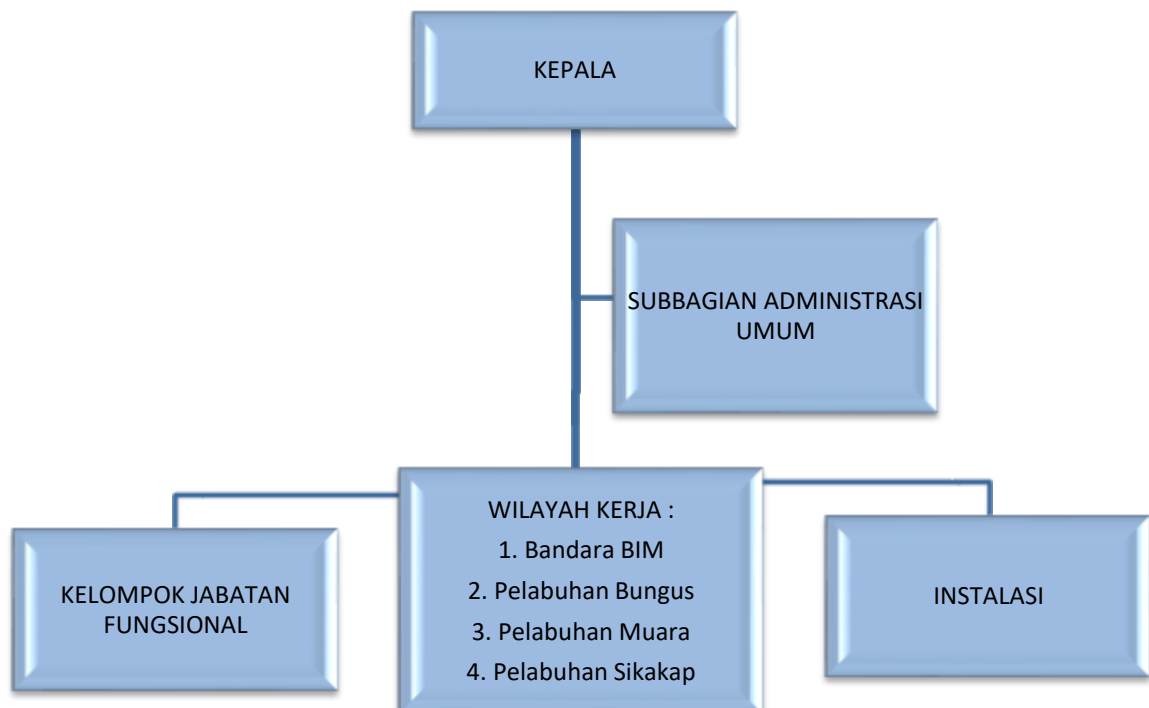
Sebelas fungsi diatas terdapat dalam indikator kinerja kegiatan BKK Kelas I Padang yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%, sehingga dapat mencapai tujuan BKK Kelas I Padang yaitu meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan tatakerja BKK Kelas I Padang mengacu pada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Struktur organisasi BKK Kelas I Padang tersebut dapat dilihat berikut ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BKK Kelas I Padang



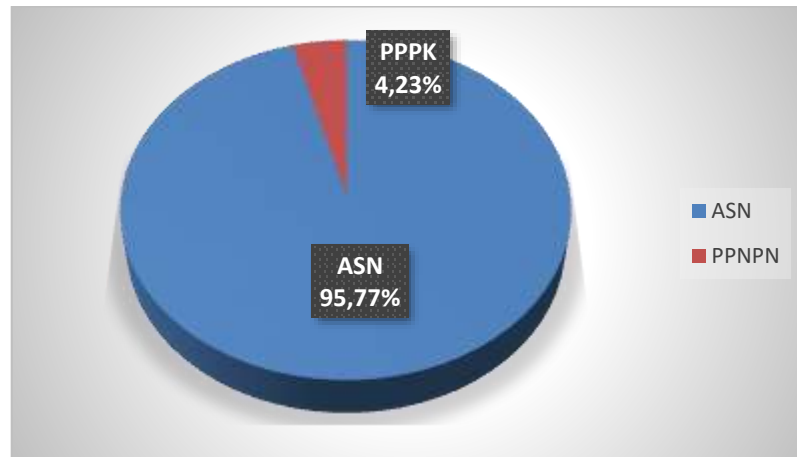
E. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Desember 2024 jumlah pegawai BKK Kelas I Padang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Distribusi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

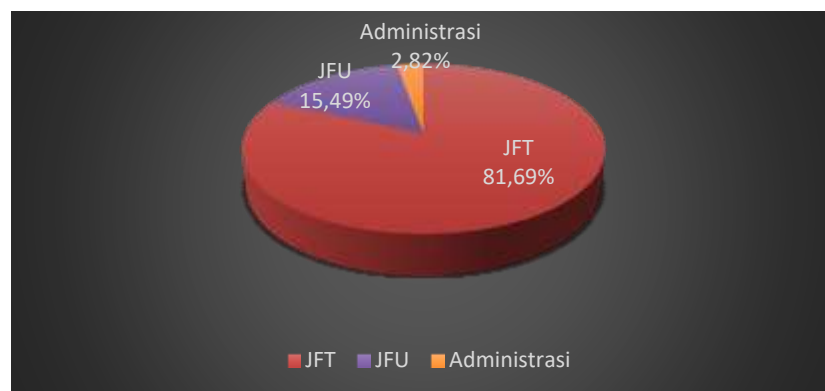
Grafik 1.1
Distribusi Pegawai BKK Kelas I Padang
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024



Pada tahun 2024 jumlah PNS di BKK Kelas I Padang yang sebanyak 68 orang (95,77%) dan PPPK 3 (tiga) orang (4.23%).

b. Distribusi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan

Grafik 1.2
Distribusi Pegawai ASN BKK Kelas I Padang
Berdasarkan Jabatan Tahun 2024



Pada tahun 2024 jumlah pegawai BKK Kelas I Padang sebagian besar adalah jabatan fungsional yaitu sebanyak 58 orang (81.69%) dan hanya 11 orang (15,49%) dengan jabatan pelaksana sedangkan jabatan struktural sebanyak 2 orang (2,82%).

**Tabel 1.1 Distribusi Pegawai BKK Kelas I Padang
Berdasarkan Jabatan Tahun 2024**

No	Nama Jabatan	Grade	Jumlah
1	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang	13	1
2	Dokter Ahli Madya	12	3
3	Entomolog Kesehatan Ahli Madya	11	1
4	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	11	2
5	Perawat Ahli Madya	11	1
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	1
7	Dokter Ahli Muda	10	3
8	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	1
9	Dokter Ahli Pertama	9	2
10	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	4
11	Perawat Ahli Muda	9	1
12	Sanitarian Ahli Muda	9	1
13	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	8	3
14	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	8	5
15	Perawat Ahli Pertama	8	1
16	Perawat Penyelia	8	3
17	Perencana Ahli Pertama	8	2
18	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	2
19	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1
20	Sanitarian Ahli Pertama	8	3
21	Sanitarian Penyelia	8	1
22	Entomolog Kesehatan Mahir	7	1
23	Epidemiolog Kesehatan Mahir	7	1
24	Perawat Ahli	7	1
25	Perawat Mahir	7	5
26	Sanitarian Mahir	7	2
27	Arsiparis Terampil	6	2
28	Entomolog Kesehatan Terampil	6	2
29	Epidemiolog Kesehatan Terampil	6	4
30	Pengadministrasi Keuangan / Pengelola Keuangan	6	1
31	Pengelola Barang Milik Negara	6	1
32	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	1
33	Arsiparis / Pranata Kearsipan	5	1
34	Entomolog Kesehatan / Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	5	2
35	Perawat / Pengelola Keperawatan	5	3
36	Sanitarian / Pengelola Penyehatan Lingkungan	5	1
37	Petugas Keamanan	5	1
Total			71

c. Distribusi Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 1.2 Distribusi Pegawai BKK Kelas I Padang Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah	Persentase
1	IV/b	2	2.82%
2	IV/a	8	11.27%
3	III/d	9	12.68%
4	III/c	11	15.49%
5	III/b	16	22.54%
6	III/a	14	19.72%
7	II/d	1	1.41%
8	II/c	6	8.45%
9	I/c	1	1.41%
10	IX	1	1.41%
11	VII	2	2.82%
Jumlah		71	100%

Dari tabel tersebut diketahui, bahwa pegawai BKK Kelas I Padang paling banyak berpangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b, yaitu sebanyak 16 orang (22,54%), kemudian golongan Penata Muda III/a sebanyak 14 orang (19,72%) dan paling sedikit adalah dengan golongan I/c dan IX masing-masing 1 orang (1,41%).

d. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tim Kerja

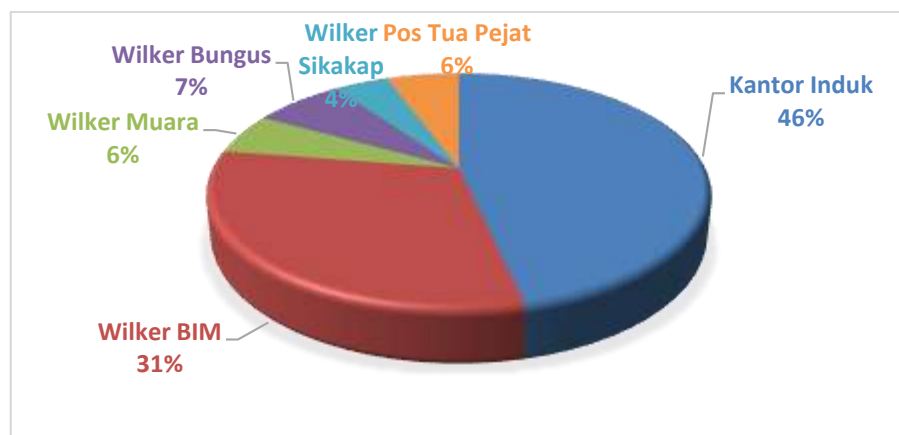
Grafik 1.3 Distribusi Pegawai BKK Kelas I Padang Berdasarkan Tim Kerja 2024



Dari grafik tersebut dapat diketahui, bahwa pegawai BKK Kelas I Padang tahun 2024, paling banyak terdapat pada tim kerja Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus, yaitu sebanyak 16 orang (22,54%) dan paling sedikit pegawai pada Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas yaitu sebanyak 6 orang (8,45%).

e. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas

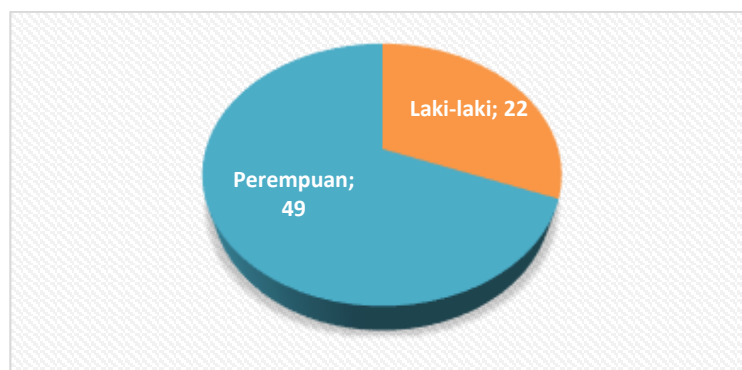
Grafik 1.4 Distribusi Pegawai BKK Kelas I Padang Berdasarkan Tempat Tugas Tahun 2024



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pegawai BKK Kelas I Padang tahun 2024 paling banyak bertugas di Kantor Induk yaitu sebesar 49,30% atau sejumlah 35 orang dan paling sedikit terdapat di Wilker Sikakap yaitu sebanyak 3 orang (4,23%).

f. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik 1.5 Distribusi Pegawai BKK Kelas I Padang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024



Dari grafik 1.5 dapat diketahui bahwa pegawai perempuan BKK Kelas I Padang tahun 2024 lebih banyak dibandingkan pegawai laki-laki yaitu sebesar 69,01% atau sebanyak 49 orang sedangkan pegawai laki-laki sebesar 30,99% atau sebanyak 22 orang.

2. Sumber Daya Anggaran

Dalam mencapai kinerjanya, BKK Kelas I Padang didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBN. Sesuai DIPA Tahun 2024 pagu anggaran BKK Kelas I Padang sebesar Rp. 20.512.796.000,-. Pada Tahun 2024 DIPA BKK Kelas I Padang mengalami 5 (lima) kali revisi dengan tema revisi diantaranya Revisi Tambahan Pagu Anggaran Haji dan Revisi Halaman III DIPA.

Adapun sumber dana berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sumber Dana Anggaran ini dibagi sebagai berikut:

Tabel 1.3
Distribusi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
Di BKK Kelas I Padang Tahun 2024

Sumber Dana	Pagu Anggaran
Rupiah Murni	Rp. 20.142.170.000,-
PNBP	Rp. 370.626.000,-
Jumlah	Rp. 20.512.796.000,-

F. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BKK Kelas I Padang Tahun 2024 adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada unit utama Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BKK Kelas I Padang untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 terdiri dari :

- Bab I (Pendahuluan)
Menjelaskan latar belakang, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, SDM, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja)
Menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan, serta kebijakan dan program beserta anggaran yang direncanakan tahun 2024.
- Bab III (Akuntabilitas Kinerja)
Menjelaskan pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2024, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumber daya lain yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja
- Bab IV (Penutup)
Berisi kesimpulan dan rencana tindak lanjut tahun mendatang.
- Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja BKK Kelas I Padang Tahun 2024, telah disusun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Perencanaan Kinerja juga memuat perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Pernyataan perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/ unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani sebagai suatu tanda kesanggupan Kepala BKK Kelas I Padang untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

1. Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 - 2024

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis dengan didukung terlaksananya Rencana Strategis, Rencana Aksi Program dan Rencana Aksi Kegiatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.

Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen Bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktifitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan melalui Kementerian Kesehatan melalui program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).

Dalam upaya mencapai misi tersebut perlu ditetapkan Sasaran Strategis agar hasil pelaksanaan kegiatan dapat jelas dan terukur serta berorientasi hasil atau menghasilkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

RAK BKK Kelas I Padang 2020–2024 diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran program Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan. Pada Tahun 2020 - 2024 BKK Kelas I Padang tidak ada visi dan misi unit kerja, namun BKK Kelas I Padang mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu:

a. Visi

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

b. Misi

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

BKK Kelas I Padang sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi Presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui indikator-indikator kinerja yang relevan dengan RAP dan Renstra Kemenkes.

c. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh BKK Kelas I Padang pada periode tahun 2020-2024 yaitu meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah.

d. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh BKK Kelas I Padang pada periode tahun 2020-2024 adalah meningkatnya pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%.

e. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pada Rencana Aksi Kegiatan BKK Kelas I Padang telah dijabarkan indikator kinerja kegiatan ini dari sebelumnya terdiri dari 7 indikator menjadi 9 indikator dengan penambahan indikator direktif yaitu 8 Persentase Realisasi Anggaran dan Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti. Pada tahun 2022 juga terdapat perubahan perhitungan pada Indikator Pertama dan Indikator Ketiga yaitu menjadi indeks. Keseluruhan target Indikator Kinerja Kegiatan terlihat pada Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang Tahun 2020 – 2024 berikut:

Tabel 2.1
Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 – 2024
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang

No	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Penang- gung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	4.404.964	1.006.923	-	-	-	Tim kerja 1, 2, 3 dan 4
	Indeks deteksi faktor risiko di bandara / pelabuhan / PLBDN	-	-	1	0,95	0,96	
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	93%	99%	100%	100%	Tim kerja 1, 2, 3 dan 4
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	80%	81%	-	-	-	Tim kerja 1, 2, 3 dan 4
		-	-	0,91	0,93	0,95	
4	Nilai kinerja anggaran	80	82	83	85	87	Subbag Adum
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	-	-	-	-	Subbag Adum
	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran	-	93	93	95	93	
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	77	78	80	Timker 5 dan Subbag Adum
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45%	80%	80%	82%	83%	Subbag Adum
8	Persentase realisasi anggaran	-	-	-	95%	96%	Subbag Adum
9	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	-	-	-	92,5%	-	Subbag Adum

2. Rencana Kinerja Tahunan

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan yang merupakan proses menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Perencanaan

kinerja sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukannya menjadi suatu isu yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan RAK juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RAK yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RAK. Oleh karena itu, tim kerja dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target dari capaian indikator kinerja. Hasil dari proses ini adalah Rencana Kinerja Tahunan yang kemudian merupakan acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam rencana kinerja, BKK Kelas I Padang tahun 2024, telah disusun Indikator Kinerja Utama dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Untuk tahun 2024 BKK Kelas I Padang memiliki 2 (dua) program yaitu Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Program Dukungan Manajemen. Adapun uraian program dan Rincian Output BKK Kelas I Padang tahun 2024 dapat dilihat dengan tabel berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan BKK Kelas I Padang

Kode	Rincian Output	Tahun 2024		
		Vol	Satuan	Anggaran (Rp)
4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah			3,788,496,000
PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	32	Kegiatan	147,596,000
QAA.011	Pelayanan Kesehatan Haji	6629	Orang	618,704,000
QAH.016	Layanan Pengendalian F. Risiko Lingkungan	5	Layanan	29,620,000
QAH.017	Layanan Pemeriksaan Org, Brg Alat Angkut	37	Layanan	54,300,000
QAH.U01	Layanan Pengendalian F. Risiko di Pelabuhan Penyeberangan	270	Layanan	178,200,000
QAH.U04	Layanan Pengendalian F. Risiko Peny Pd Situasi Khusus	150	Layanan	233,250,000
QAH.U07	Layanan Pengendalian F. Risiko Peny. DBD	28	Layanan	33,712,000
QAH.U08	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit PES	56	Layanan	158,200,000
QAH.U09	Layanan Pengendalian F. Risiko Penyakit Diare	32	Layanan	15,328,000
QAH.U10	Layanan Pengendalian F. Risiko Peny. Malaria	4	Layanan	5,436,000
QAH.U11	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	240	Layanan	86,400,000
QAH.U12	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	40	Layanan	68,800,000
QAH.U13	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	38	Layanan	13,680,000
QAH.U14	Layanan Survei F. Risiko Penyakit HIV AIDS	25	Layanan	32,850,000
QAH.U15	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	6	Layanan	43,640,000
QAH.U19	Layanan Pengendalian F. Risiko di Pelabuhan	116	Layanan	59,400,000
QAH.U21	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria Kat. 2	2	Layanan	8,080,000
QAH.U22	Layanan Survei F. Risiko Peny DBD Kategori II	8	Layanan	2,880,000
RAB.001	Pengadaan Alat & Bhn Kekarantinaan Kes. di Pintu Masuk	15	Paket	1,766,588,000
TBC.001	Pelatihan Kesehatan	20	Orang	231,832,000
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			16,724,300,000
AEA.501	Koor. Linprog Linsek Perencanaan Program	4	Kegiatan	27,576,000
AEA.502	Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	5	Kegiatan	18,978,000
AEA.504	Koordinasi lintas program lintas sektor hukum dan organisasi	2	Kegiatan	21,954,000
EBA.956	Layanan BMN	4	Layanan	46,442,000
EBA.957	Layanan Hukum	3	Layanan	750,000
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	2	Layanan	101,652,000
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	56,835,000
EBA.962	Layanan Umum	5	Layanan	145,745,000
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	150,000
EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	12,947,099,000
EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1	Unit	2,713,251,000
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	69	Orang	246,208,000
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	7	Orang	45,404,000
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3	Dokumen	140,810,000
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6	Dokumen	73,683,000
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	6	Dokumen	113,125,000
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	2	Dokumen	24,638,000

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja BKK Kelas I Padang Tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1 Indeks deteksi faktor risiko di bandara / pelabuhan / PBLDN	0,96
		2 Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.	100%
		3 Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	0,95
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4 Nilai kinerja anggaran	87
		5 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	93
		6 Kinerja implementasi WBK satker	80
		7 Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	83%
		8 Persentase Realisasi Anggaran	96%

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 BKK Kelas I Padang di alokasikan anggaran sebesar Rp.20.512.796.000,- (Dua puluh milyar lima ratus dua belas juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Sedangkan pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya.

Manfaat pengukuran kinerja adalah untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang tingkat capaian kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan dan Penetapan Kinerja. Capaian kinerja ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas atas hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Adapun rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Target dan Capaian Indikator Kegiatan
BKK Kelas I Padang Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks deteksi faktor risiko di bandara / pelabuhan / PBLDN	0,96	0,97	101,04%
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.	100%	100%	100,00%
3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	0,95	1,00	105,26%
4	Nilai kinerja anggaran	87	91,13	104,75%
5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	93	93,95	101,02%
6	Kinerja implementasi WBK satker	80	82,00	102,50%
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	83%	120,48%	145,16%
8	Persentase Realisasi Anggaran	96%	96,55%	100,57%

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang pada tahun 2024 terlihat dari 8 (delapan) indikator kinerja yang ada di BKK Kelas I Padang seluruhnya telah mencapai target yang ditentukan pada Perjanjian Kinerja Kepala BKK Kelas I Padang. Rata-rata hasil pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebesar 107,54%.

Untuk lebih jelasnya terkait hasil pengukuran indikator kinerja kegiatan per sasaran strategis kegiatan mulai dari definisi operasional, rumus / cara perhitungan, capaian indikator (Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target RAK sampai dengan Tahun 2024, Perbandingan Capaian Kinerja dengan 3 tiga Satuan Kerja Lain sejenis, Perbandingan Capaian Kinerja Secara Nasional), upaya yang dilakukan untuk menetapkan indikator, analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan, kendala/ masalah yang dihadapi, pemecahan masalah, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang Menunjang Tingkat Keberhasilan / kegagalan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

INDIKATOR PERTAMA

Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN

Pelabuhan laut dan udara sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit juga merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit *new emerging diseases* dan *re-emerging diseases* yang memiliki implikasi besar dan faktor risiko besar dan potensial dalam penyebaran penyakit.

Kegiatan deteksi dini faktor risiko di pintu masuk Negara merupakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko di pelabuhan atau bandara, berupa pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit serta meminimalisasikan dampak resiko penularan penyakit dan lingkungan terhadap masyarakat, sehingga tupoksi BKK dapat dilaksanakan dengan baik.

1. Pengertian

Indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN adalah pengukuran kinerja seluruh rangkaian pemeriksaan dan pengawasan terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang ada di Pelabuhan / Bandara / PLBDN dalam wilayah kerja BKK Kelas I Padang selama Tahun 2024. Data ini diperoleh dari pengukuran 4 parameter, yaitu :

A. Persentase orang yang diperiksa sesuai standar

Pemeriksaan orang dilakukan terhadap seluruh pelaku perjalanan yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan di seluruh pelabuhan, bandara, dan kantor yang meliputi wilayah kerja BKK Kelas I Padang. Pemeriksaan orang ini berupa :

1) Pemeriksaan dan pengawasan suhu tubuh penumpang, crew pesawat dan Anak Buah Kapal (ABK)

Pemeriksaan suhu tubuh pada penumpang, crew pesawat dan Anak Buah Kapal (ABK) dilakukan dalam rangka pengawasan tanda dan gejala para pelaku perjalanan yang datang dari dan ke wilayah terjangkit. Apabila terdapat pelaku perjalanan yang terdeteksi dengan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ maka dilakukan *Risk Assesment* atau Penelusuran Epidemiologi (PE) untuk

mendapatkan kesimpulan dari hasil wawancara apakah pelaku perjalanan tersebut beresiko atau tidak.

Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian terhadap kasus penyakit yang berpotensi wabah, Kementrian Kesehatan Direktur Jendral P2P menerbitkan Surat Edaran Adanya Nomor: HK.02.02/C/2160/2024 tentang Peningkatan kewaspadaan terhadap MPOX dipintu masuk, Pelabuhan dan Bandar udara yang melayani lalu lintas domestic dan di wilayah.

2) Pemeriksaan Rapid Test Covid-19

Dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap pandemi Covid-19, BKK Kelas I Padang melakukan pemeriksaan rapid test antibody pada pelaku perjalanan yang menunjukkan gejala dan / atau bersiko tinggi pada anak buah kapal yang belum membawa dokumen hasil PCR negatif. Pemeriksaan ini juga dilakukan pada jamaah haji Debarkasi Padang, pasien berobat dan pemeriksaan pengujian Kesehatan di Klinik BKK Kelas I Padang. Pemeriksaan rapid test antibodi ini dilakukan dalam upaya skrining cegah tangkal masuknya Covid-19 di wilayah kerja BKK Kelas I Padang.

3) Skrining penyakit menular langsung

Skrining penyakit menular langsung yang dilakukan BKK Kelas I Padang pada Tahun 2024 adalah HIV/AIDS dan TBC. Skrining ini merupakan pemeriksaan terhadap orang – orang yang tidak memiliki gejala ataupun keluhan untuk mengklasifikasikan mereka ke dalam kategori yang diperkirakan mengidap atau tidak mengidap penyakit.

4) Pemeriksaan vaksinasi

Sebelum dilakukan vaksinasi, setiap orang dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Pemeriksaan ini meliputi Tanda Tanda Vital (TTV), keadaan umum, riwayat alergi dan Riwayat penyakit yang diderita. Sehingga dari hasil pemeriksaan ini dapat disimpulkan apakah layak untuk divaksin atau tidak.

5) Pemeriksaan kesehatan dalam rangka penerbitan dokumen kesehatan

Pemeriksaan orang ini dilakukan pada setiap permohonan pasien yang berkunjung ke BKK Kelas I Padang, yang kemudian diterbitkan dokumen kesehatan seperti surat laik terbang, izin angkut orang sakit dan surat keterangan kesehatan.

B. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar

Data pemeriksaan alat angkut berupa :

1) Jumlah *Certificate of Pratique* (COP)

Certificate of Pratique (COP) adalah sertifikat izin bebas karantina yang diberikan kepada alat angkut (kapal) yang datang dari luar negeri dan/ atau wilayah terjangkit. Sebelumnya kapal yang datang dari wilayah terjangkit diperiksa dahulu oleh pejabat karantina di Quarantine Area. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinilai tidak terdapat masalah atau faktor risiko penyakit karantina, maka diterbitkanlah COP ini.

2) Jumlah *Public Health Quarantine Clearance* (PHQC)

Public Health Quarantine Clearance (PHQC) adalah surat persetujuan berlayar karantina kesehatan. Kapal hanya dapat berangkat setelah dinyatakan lengkap dokumennya dan pada saat pemeriksaan oleh pejabat karantina kesehatan BKK Kelas I Padang dan tidak ditemukan indikasi faktor risiko kesehatan masyarakat.

3) Jumlah *General Declaration* (GENDEC) terverifikasi

General Declaration (GENDEC) terverifikasi adalah GENDEC yang dilaporkan oleh pilot pesawat sudah sesuai dengan hasil pengawasan kekarantinaan kesehatan di bandara kedatangan.

C. Persentase barang yang diperiksa sesuai standar

Pemeriksaan barang dilakukan terhadap jenazah yang akan diangkut. prosedur pengawasan pengangkutan jenazah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomo 424 tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan, antara lain jenazah harus disuntik dengan obat penahan busuk secukupnya, jenazah harus dimasukkan dalam peti yang di buat dari logam dan alasnya di tutup dengan bahan yang menyerap serta peti di tutup rapat rapat dan dimasukkan kedalam peti kayu. selain itu terdapat syarat administrasi yang harus dilengkapi. serta penerbitan izin angkut jenazah. Izin angkut jenazah adalah sertifikat yang menyatakan bahwa jenazah yang akan dibawa bebas dari potensi penularan penyakit pada masyarakat. Pemeriksaan ini dilakukan di wilayah kerja pelabuhan dan bandara.

D. Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

Data pemeriksaan lingkungan berupa :

1) Jumlah pemeriksaan sanitasi TTU (Tempat Tempat Umum)

Pemeriksaan sanitasi TTU berupa gedung / bangunan dan lingkungan yang dilaksanakan dengan menugaskan tim inspeksi ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik berupa penilaian kondisi hygiene dan sanitasi Gedung / bangunan dan lingkungan. Hasil pemeriksaan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

2) Jumlah pemeriksaan sanitasi TPM (Tempat Pengolahan Makanan)

Pemeriksaan sanitasi TPM dilakukan menyeluruh meliputi pemeriksaan seluruh aspek sanitasi sesuai dengan Permenkes No. 14 tahun 2021 yang dinilai berdasarkan jenis TPP. Uji petik pengambilan sampel dilakukan terhadap sampel makanan, sampel usap alat makan sampel air minum yang digunakan untuk proses pengolahan.

3) Jumlah pemeriksaan ISPAB (Inspeksi Sarana Penyediaan Air Bersih)

Pemeriksaan ISPAB dilakukan di *reservoir* dan *hydrant* di pelabuhan dan bandara di wilayah kerja BKK Kelas I Padang.

2. Definisi Operasional

Indeks kinerja deteksi dini faktor risiko, yang terdiri dari persentase orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang diperiksa sesuai standar di pelabuhan dan bandara yang ada di wilayah kerja BKK Kelas I Padang dalam kurun waktu satu tahun.

3. Rumus / Cara Perhitungan

Bobot pengukuran kinerja dihitung berdasarkan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai *score* maksimal dikurang *score* minimal). Bobot masing – masing parameter adalah :

- Persentase orang yang diperiksa sesuai standar : Bobot 5 (Mutlak)
- Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar : Bobot 5 (Mutlak)
- Persentase barang yang diperiksa sesuai standar : Bobot 3 (Perlu)
- Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar : Bobot 5 (Mutlak)

Tabel 3.2
Realisasi Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut, dan Lingkungan
Tahun 2024

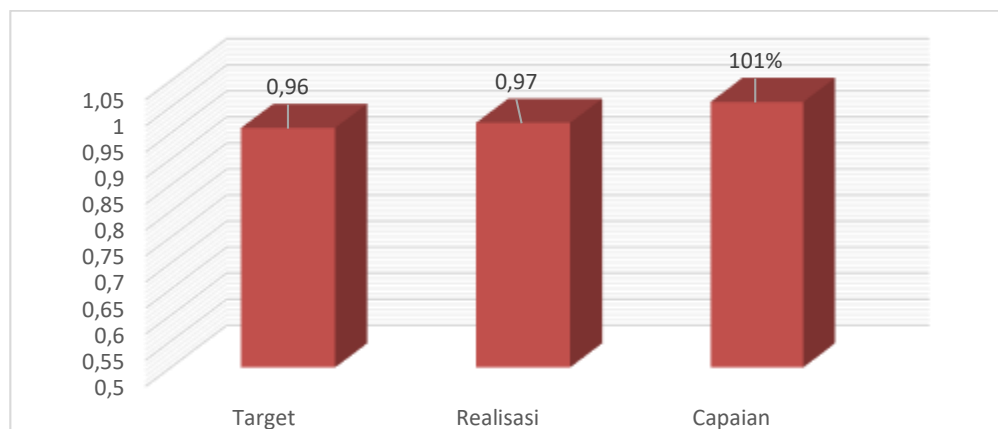
Parameter	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pemeriksaan Orang sesuai Standar	Orang	2.300.477	3.153.745	137,090
- Jumlah penumpang Dalam Negeri	Orang	2.090.000	2.445.691	117,018
- Jumlah penumpang Luar Negeri	Orang	79.200	452.773	571,683
- Kunjungan poliklinik bukan penumpang	Orang	316	897	283,860
- Jumlah pemeriksaan crew pesawat	Orang	85.536	107.986	126,246
- Jumlah pemeriksaan ABK	Orang	44.000	144.748	328,972
- Skrenning HIV/AIDS	Orang	625	779	124,64
- Skrenning TBC	Orang	400	474	118,5
- Skrenning malaria	Orang	400	400	10077
Pemeriksaan Alat Angkut sesuai Standar	Pesawat / Kapal	4.945	6.818	137,876
- Gendec terverifikasi	Pesawat	720	1.501	208,472
- COP	Kapal	265	343	129,433
- PHQC	Kapal	3.960	4.974	125,542
Pemeriksaan Barang sesuai Standar	Barang			
- Izin angkut jenazah	Barang	40	78	195
Pemeriksaan Lingkungan sesuai Standar	Kali	2.073	2222	107,187
- TTU	Kali	888	905	101,914
- TPM	Kali	459	588	128,104
- ISPAB	Kali	372	387	104,032

4. Capaian Indikator

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Pertama dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Deteksi Dini Faktor
Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN
Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN pada Tahun 2024 yaitu 0,96.

Sementara itu, capaian indeks deteksi dini faktor di pelabuhan/ bandara/ PLBDN di BKK Kelas I Padang tahun 2024 jika dilihat dari masing – masing parameter dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN
Tahun 2024

Parameter	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Orang yang Diperiksa sesuai Standar	2.300.477	3.153.745	137%
Persentase Alat Angkut yang Diperiksa sesuai Standar	4.945	6.818	138%
Persentase Barang yang Diperiksa sesuai Standar	40	78	195%
Persentase Lingkungan yang Diperiksa sesuai Standar	2.073	2.222	107%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, capaian kinerja pada masing – masing parameter telah tercapai melebihi target. Namun, jika dihitung dengan rumus nilai empiris dimana *score maximal* hanya 120%, maka capaian indeks indikator pertama ini menjadi 0,96 atau 100% dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.4
Konversi Nilai Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN
Tahun 2024

No	Parameter	Bobot	Capaian	Cove- rage	Skor	Max	Cov Max	Skor Max	Min
1	2	3	4	5=(4/7)* 100	6=3*5	7	8	9=3*8	10
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	120%	120	600	100	120	600	
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	5	101%	120	600	100	120	600	
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	3	120%	120	360	100	120	360	
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	105%	102	525	100	120	600	
TOTAL					2.095			2.160	

Dari data diatas didapatkan nilai indeks yaitu :

$$\text{Nilai Indeks} = \frac{2.095}{2.160} = 0.97$$

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja beberapa tahun terakhir (Tahun 2020 s.d. Tahun 2024)

Indikator kinerja ini berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya. Sehingga indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian realisasi beberapa tahun terakhir. Sehingga, untuk indikator ini hanya dapat dibandingkan dengan capaian / realisasi masing – masing parameter indikator saja.

1. Persentase orang yang diperiksa sesuai standar

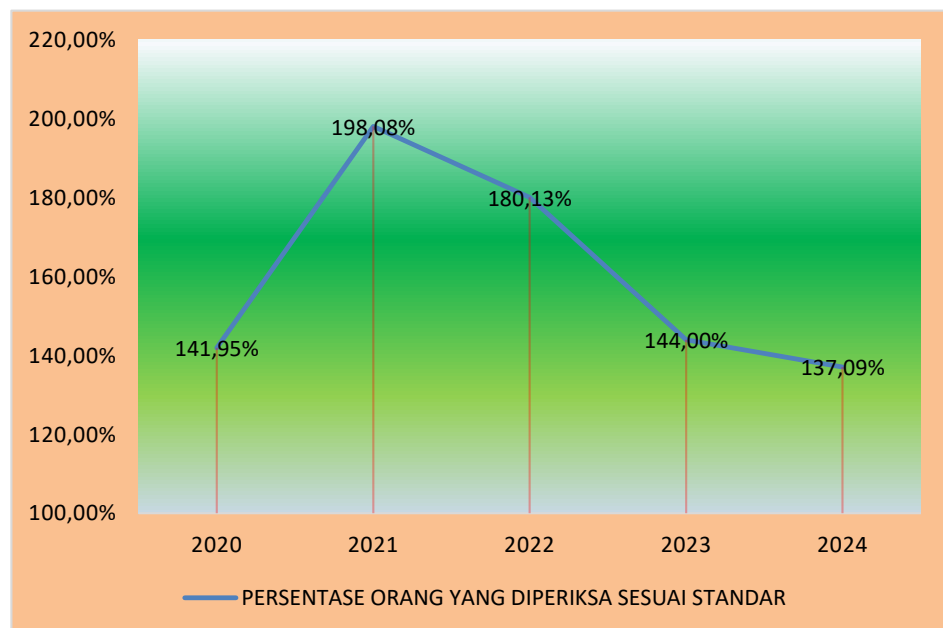
Jumlah capaian pemeriksaan orang sesuai standar dari beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Persentase Orang yang Diperiksa Sesuai Standar
Tahun 2020 s.d. Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	439.900	624.458	141,95%
2021	1.000.000	1.980.871	198,08%
2022	1.200.000	2.161.604	180,13%
2023	2.091.407	3.009.440	144%
2024	2.300.477	3.153.745	137%

Untuk perbandingan persentase orang yang diperiksa sesuai standar dengan lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.2
Perbandingan Persentase Orang yang Diperiksa sesuai Standar
Tahun 2020 s.d. Tahun 2024



2. Persentase Alat Angkut yang Diperiksa sesuai Standar

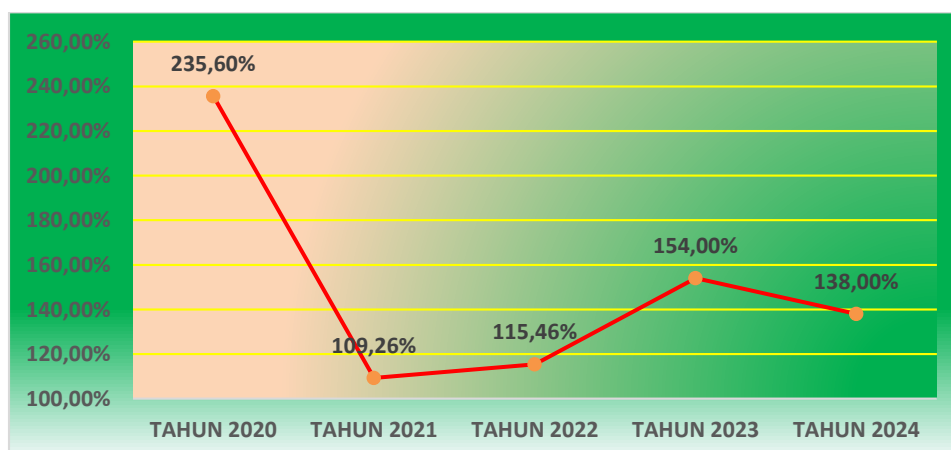
Jumlah capaian pemeriksaan alat angkut sesuai standar dari beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Persentase Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar
Tahun 2020 s.d. Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	500	1.178	235,6%
2021	5.650	6.173	109,26%
2022	5.400	6.235	115,46%
2023	4.512	6.935	154%
2024	4.945	6.818	138%

Sedangkan perbandingan persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar dengan lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.3
Perbandingan Persentase Alat Angkut yang Diperiksa sesuai Standar
Tahun 2020 s.d. Tahun 2024



3. Persentase Barang yang Diperiksa sesuai Standar

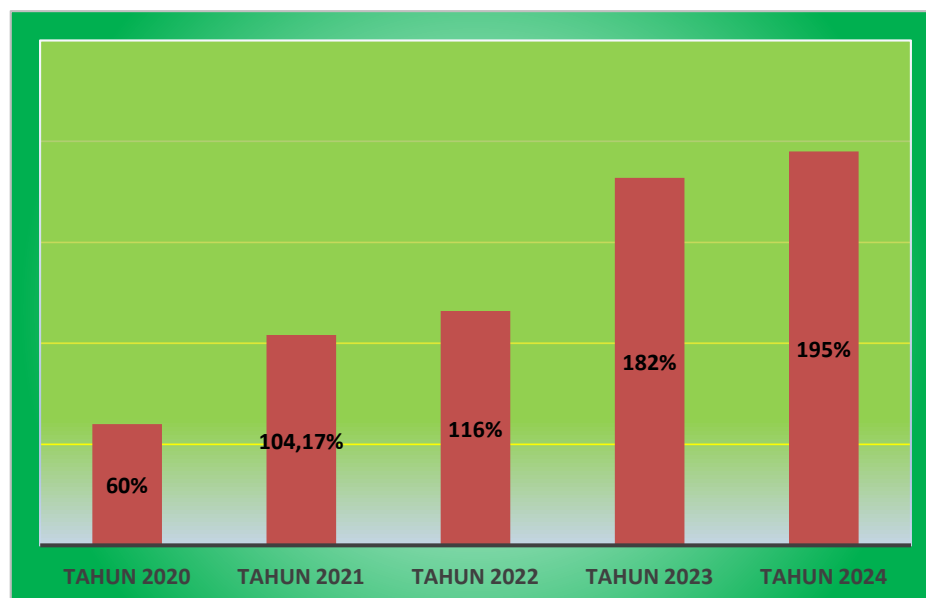
Jumlah capaian pemeriksaan barang sesuai standar dari beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Persentase Barang yang Diperiksa Sesuai Standar
Tahun 2020 s.d. Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	5	3	60%
2021	48	50	104,17%
2022	50	58	116%
2023	38	69	182%
2024	40	78	195%

Perbandingan persentase barang yang diperiksa sesuai standar dengan lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.4
Perbandingan Persentase Barang yang Diperiksa Sesuai Standar
Tahun 2020 s.d Tahun 2024



4. Persentase Lingkungan yang Diperiksa sesuai Standar
Jumlah capaian pemeriksaan lingkungan sesuai standar dari beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Persentase Lingkungan yang Diperiksa Sesuai Standar
Tahun 2020 s.d. Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	91	91	100%
2021	1.225	1.227	100,2%
2022	1.225	1.231	100,5%
2023	1.916	1.951	102%
2024	2.073	2.222	107,187%

Perbandingan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

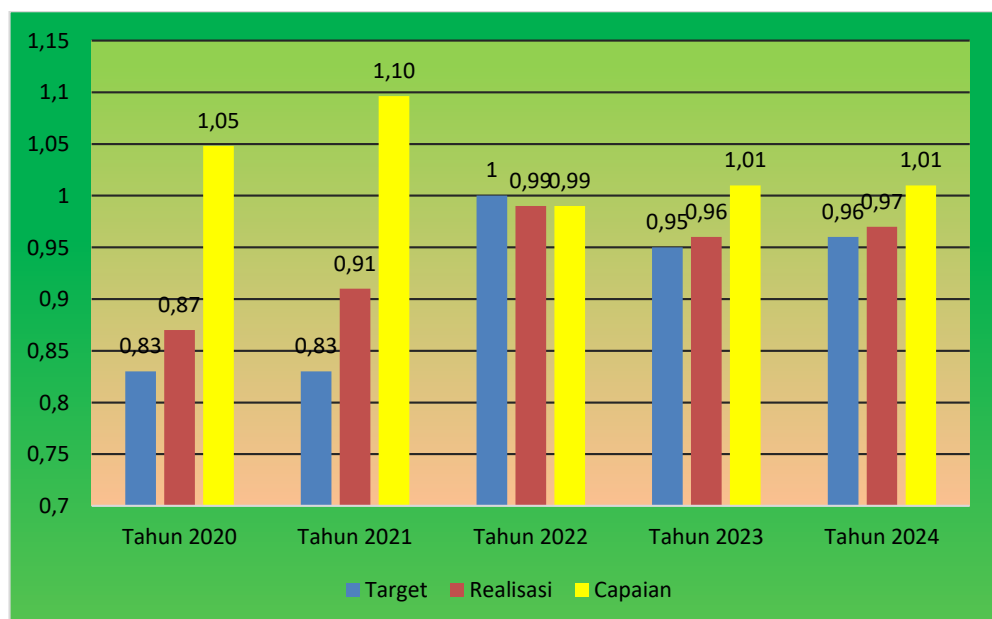
Grafik 3.5
Perbandingan Persentase Lingkungan yang Diperiksa sesuai Standar
Tahun 2020 s.d. Tahun 2024



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2020 - 2024)

Capaian indikator Indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN jika dibandingkan dengan Rencana Aksi Kegiatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.6
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks deteksi dini faktor risiko di
Pelabuhan / Bandara / PLBDN Tahun 2024 dengan
Target Jangka Menengah RAK Tahun 2020-2024



d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Satuan Kerja Sejenis / Setara

Sebagai pembanding capaian indikator pertama ini, BKK Kelas I Padang melakukan perbandingan capaian dengan beberapa Satuan Kerja yang setara yaitu berada pada Kelas I dan memiliki wilayah kerja di pelabuhan dan bandara, yaitu BKK Kelas I Pekanbaru, BKK Kelas I Palembang dan BKK Kelas I Panjang. Perbandingan capaian tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.7
Perbandingan Capaian Indikator Pertama dengan Satuan Kerja Setara
Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN dengan satuan kerja yaitu BKK Kelas I Panjang capaian indeks deteksi dini faktor di Pelabuhan / bandara / PLBDN yang tertinggi, sedang kan BKK Kelas I Padang berada di urutan ke dua dan BKK Kelas I Palembang capaian indeks deteksi dini faktor di Pelabuhan / bandara/ PLBDN lebih rendah dari BKK Kelas I Pekanbaru.

5. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/bandara/ PLBDN di wilayah kerja BKK Kelas I Padang tahun 2024 adalah dengan melakukan teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM, Kerjasama dengan lintas sektor, dan dukungan penganggaran diantaranya:

a. Pemeriksaan Orang Sesuai Standar

- 1) Menerapkan prosedur perjalanan orang sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

- 2) Berkoordinasi dengan pihak maskapai dan kapal penumpang untuk menyampaikan informasi kepada para penumpang yang sakit agar melapor kepada pihak awak kabin dan wajib melaporkan kepada pihak BKK Kelas I Padang guna dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur.
- 3) Melakukan *skinning* / penapisan dan pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap pelaku perjalanan yang datang dari wilayah terjangkit.
- 4) Melakukan pelayanan kesehatan haji di Embarkasi Padang dan Bandara Internasional Minangkabau pada musim haji Tahun 2024.
- 5) Membuat Nota dinas himbauan peningkatan pengawasan terhadap penyakit Monkeypox kepada seluruh petugas BKK.
- 6) Melaksanakan pengawasan dan pelayanan kesehatan pada situasi khusus Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.
- 7) Melakukan sosialisasi dan *skinning* penyakit menular langsung (HIV/ AIDS, TBC, dan malaria) kepada masyarakat di wilayah kerja BKK Kelas I Padang.
- 8) Melakukan pemeriksaan dengan cermat sesuai SOP kepada setiap sasaran vaksinasi.
- 9) Penundaan keberangkatan bagi calon penumpang yang memiliki hasil pemeriksaan penyakit menular.
- 10) Pemeriksaan kesehatan dalam rangka penerbitan dokumen kesehatan (surat laik terbang, izin angkut orang sakit dan sertifikat pengujian kesehatan).

b. Pemeriksaan Alat Angkut Sesuai Standar

- 1) Berkoordinasi dengan pihak agen pelayaran dalam pelaksanaan pemeriksaan kedatangan kapal dari wilayah terjangkit.
- 2) Melakukan rekomendasi tindakan pada kapal yang berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan memiliki faktor – faktor risiko penyakit.
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang membutuhkan perpanjangan sertifikat kesehatan kapal.
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang akan berangkat dari pelabuhan di wilayah kerja BKK Kelas I Padang.
- 5) Berkoordinasi dengan General Manajer PT. Garuda Indonesia Cabang BIM terkait kewajiban maskapai untuk menyerahkan Dokumen General Declaration (Gendec) kepada petugas BKK di kedatangan Jemaah Haji.

- 6) Berkoordinasi dengan pihak maskapai dan Air Traffic Control (ATC) sehubungan dengan kewajiban maskapai untuk melaporkan keadaan di pesawat ada tidaknya penumpang berpenyakit menular potensi wabah.
- c. Pemeriksaan Barang Sesuai Standar
Melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang akan diberangkatkan dari pelabuhan maupun bandara di wilayah kerja BKK Kelas I Padang.
- d. Pemeriksaan Lingkungan Sesuai Standar
 - 1) Melakukan IKL Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Inpeksi Sarana Penyediaan Air Bersih (ISPAB) sesuai lokus target pemeriksaan di semua wilayah kerja di BKK Kelas I Padang
 - 2) Melaksanakan survey vektor pes, DBD, malaria, diare sesuai dengan pelaksanaan RPD dan RPK
 - 3) Melakukan sampel air bersih dan air minum pada sumber air yang berasal dari alat angkut, reservoir, hydrant dan Depot Air Minum (DAM)
 - 4) Kegiatan pemeriksaan lingkungan lebih efektif dengan adanya koordinasi antar angora Forum Pelabuhan dan Bandara Sehat yang berada di Pelabuhan Teluk Bayur, Wilker BIM dan Wilker Bungus.

6. Analisa Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja dihitung dengan rumus nilai empiris dimana score maximal hanya 120%, maka capaian indeks indikator pertama ini menjadai 0,97 atau 97% sedangkan target yang ditetapkan 0,96 atau 96%, jika dilihat dari masing – masing parameternya, jumlah capaian indikator ini sudah melebihi target yang ditetapkan. Faktor penyebab keberhasilannya antara lain:

- a. Peningkatan jumlah vaksinasi di tahun 2024 dikarenakan vaksinasi meningitis meningococcus merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang datang ke Arab Saudi, menggunakan visa haji dan umrah (SE No. HK.02.02/A/3717/2024)
- b. Normalisasi perjalanan orang, barang dan alat angkut baik dari dalam/luar negeri baik yang ada di wilayah pelabuhan maupun wilayah bandara.
- c. Adanya penerbangan langsung dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Bandara Jeddah bagi Jamaah Umroh yang mengakibatkan meningkatnya penerbangan luar negeri.
- d. Koordinasi yang baik dari lintas sektor dalam pemeriksaan penumpang, ABK dan awak kabin baik di wilayah bandara maupun wilayah pelabuhan.
- e. Pemberian layanan maksimal sesuai dengan SOP yang ada.

- f. Adanya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas baik di Pelabuhan maupun Bandara.
- g. Adanya upaya peningkatan pemeriksaan sampel air bersih dan air minum yang memenuhi syarat di tahun 2024 karena upaya pemberian rekomendasi kepada pihak pengelola depot air minum agar dapat
- h. Adanya dukungan dari pemilik TPP, TTU dan ISPAB untuk melakukan IKL sehingga pelaksanaan IKL dapat berjalan dengan baik
- i. Adanya dukungan dari LS/LP sehingga dapat dilakukan Workshop Penjamah Makanan agar dapat meningkatkan pengetahuan penjamah makanan di semua wilayah kerja BKK Kelas I Padang
- j. Adanya dukungan peraturan perundangan-undangan untuk pelaksanaan kegiatan kekarantina kesehatan di pintu masuk Negara.
- k. Komitmen bersama SDM pelaksana program di induk dan seluruh wilayah kerja dalam kinerja dan realisasi anggaran sesuai tugas dan fungsi kelompok substansinya.

7. Kendala/ Masalah yang Dihadapi

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja indikator Indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN di wilayah kerja BKK Kelas I Padang Tahun 2024 adalah :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan pelaku perjalanan di pelabuhan dan bandara yang masih ditemukan belum sesuai ketentuan.
- b. Masih adanya jamaah menganut kepercayaan tradisional bahwa vaksinasi belum bermanfaat bagi kesehatannya.
- c. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kapal yang baru datang dari wilayah terjangkit masih dalam keadaan karantina. Dan untuk melakukan pemeriksaan kapal tersebut, petugas harus mendatangi kapal yang dalam posisi labuh di *Quarantine Area*. Namun terkadang proses pemeriksaan kapal ini terkendala dengan tidak adanya kendaraan yang memadai / *safety* bagi petugas apalagi saat cuaca tidak kondusif, sehingga pemeriksaan alat angkut mengalami hambatan dan harus ditunda hingga cuaca bagus.
- d. Belum adanya badan usaha yang memiliki izin dari Kemenkes RI untuk melakukan tindakan penyehatan alat angkut.

- e. Masih adanya TPP yang belum dilakukan pelaksanaan labelling dan SLHS karena untuk mencapai target Pelabuhan dan Bandara Sehat harus minimal 75% memiliki label pengawasan dan SLHS
- f. Hasil pemantauan kepadatan alat sudah <2 namun beberapa kondisi TPS masih ada yang belum tertutup serta adanya penumpukan sampah
- g. Pelaksanaan survei vektor yang tidak sesuai perencanaan awal karena faktor cuaca yang tidak menentu
- h. Adanya keterlambatan kader dalam melakukan pengumpulan laporan survei DBD sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan rekapan untuk laporan bulanan
- i. Kendaraan operasional yang tidak memadai sehingga menyulitkan untuk mobilisasi alat dan bahan di lapangan.

8. Pemecahan Masalah

- a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelayanan vaksinasi meningitis pada agen travel atau penyelenggara ibadah umrah.
- b. Petugas melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku perjalanan secara langsung dan juga melalui media sosial BKK Kelas I Padang.
- c. Kepala BKK Kelas I Padang melakukan koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait pemeriksaan kedatangan kapal dari luar negeri, Kepala BKK Kelas I Padang memberikan sedikit kelonggaran waktu dalam melakukan pemeriksaan sehingga keselamatan / *safety* petugas juga lebih terjaga.
- d. Melakukan IKL pada saat inspeksi sekaligus penyuluhan kepada pemilik TPP serta penjamah makanan mengenai prinsip hygiene sanitasi dalam pengolahan pangan
- e. Melakukan peningkatan kapasitas dan pengetahuan kader dalam pelaksanaan survei vektor melalui On Job Training
- f. Memberikan teguran peringatan kepada kader yang terlambat mengumpulkan laporan survei
- g. Untuk faktor cuaca, maka kegiatan diundur dan dilakukan pada hari berikutnya agar lebih efektif.
- h. Melakukan pengadaan kendaraan bermotor untuk pelaksanaan mobilisasi di lapangan agar kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal.

9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan teknis dan dukungan teknis dalam rangka kekarantinaan kesehatan dengan besaran sesuai dengan Pagu Anggaran Tahun 2024.
- Anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini sebesar Rp 2.685.268.000,- dengan realisasi sebesar RP 2.667.159.344 . Capaian kinerja sebesar 1,01 ,sehingga nilai efisiensi dapat dilihat dari rumus berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E = Efisiensi
PAKi = Pagu Anggaran Kinerja Indikator
CKi = Capaian Kinerja Indikator
RAKi = Realisasi Anggaran Kinerja Indikator
NE = Nilai Efisiensi

Dari rumus di atas, dapat dihitung sebagai berikut :

$$1,66\% = \frac{(2.685.268.000 \times 1,01) - 2.671.878.344}{(2.667.159.344 \times 1,01)} \times 100\%$$

$$54,15\% = (50\% + \left(\frac{1,66}{20} \times 50\right))$$

Jadi, nilai efisiensi pada Indikator Pertama ini adalah 54,15% yang artinya kinerja BKK Kelas I Padang pada indikator pertama ini telah efisien sebab capaian kinerja lebih besar dari realisasi anggaran yaitu capaian kinerja sebesar 101% dan realisasi anggaran sebesar 99,3%.

Efisiennya sumber daya dipengaruhi oleh kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan rutin sehingga target yang ditentukan dapat tercapai meskipun terdapat beberapa kendala yang ditemukan karena adanya perubahan definisi operasional pada pertengahan tahun sehingga ada parameter yang sulit untuk dicapai karena menyangkut ketersediaan anggaran.

INDIKATOR KEDUA

Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

1. Pengertian

Balai Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara, dalam melaksanakan tugas tersebut maka menyelenggarakan fungsi respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan lingkungan. Yang mana BKK Kelas I Padang telah melakukan upaya pengendalian terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional indikator ini adalah jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan di pelabuhan/bandara dibandingkan dengan jumlah faktor risiko pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam periode satu tahun. Jenis faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan adalah :

a) Jenis Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Orang

- Pelaku perjalanan dengan Suhu tinggi $>37,5$
- Pelaku perjalanan positif COVID 19
- Pelaku perjalanan datang dan berangkat dalam keadaan sakit
- Pelaku perjalanan dengan saturasi <95
- Pelaku perjalanan Hb $<8,5$
- Calon Jemaah haji yang belum vaksinasi meningitis
- ICV palsu/expired
- HIV/TB/Malaria positif
- Penyakit menular yang menimbulkan wabah

b) Jenis Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Alat Angkut

- Kapal yang melakukan pelanggaran karantina
- Kapal yang terjangkit
- Kapal yang ditemukan tanda-tanda kehidupan vektor

c) Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Barang

- Barang yang berisiko bagi kesehatan (Jenazah)
- Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Lingkungan
- Tempat pengolahan makanan yang tidak memenuhi syarat
- Hygiene sanitasi bangunan umum yang tidak memenuhi syarat
- Tempat penyediaan air bersih yang tidak memenuhi syarat
- Keberadaan vektor yang melebihi syarat/ambang batas pada lingkungan

3. Rumus/ Cara Perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan orang alat angkut, barang dan lingkungan dibagi jumlah faktor risiko pada orang dikali 100%. Sehingga rumus penghitungannya menjadi :

$$N = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

- N = Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
- X = Jumlah faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
- Y = Jumlah faktor risiko pada orang

4. Capaian Indikator

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kegiatan .

Capaian indikator target dan realisasi kegiatan adalah 100% , yang artinya setiap faktor risiko pada orang tahun 2024 dapat dikendalikan

$$N = \frac{1.954}{1.954} \times 100\%$$

$$N = 100\%$$

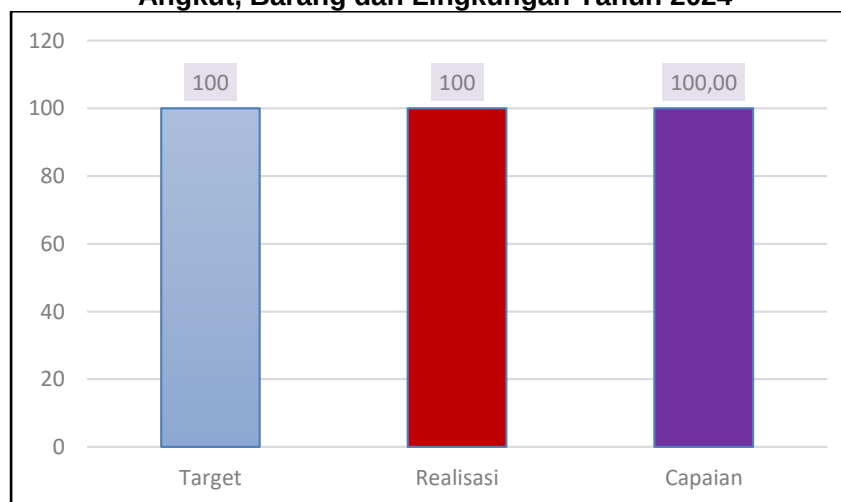
Perbandingan target dan realisasi kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Faktor Risiko pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan yang ditemukan dan dikendalikan Tahun 2024

No	Faktor Risiko	Jumlah Faktor Risiko yang ditemukan	Jumlah Faktor Risiko yang Dikendalikan
1	2	3	4
A	Faktor Risiko Orang	1.839	1.839
	Pelaku perjalanan dengan suhu Tinggi >37,5	0	0
	Pelaku perjalanan dengan COVID 19	0	0
	Pelaku perjalanan yang sakit	1.695	1.695
	pelaku perjalanan yang Hamil >32 minggu	93	93
	pelaku perjalanan dengan Penyakit menular yang menimbulkan wabah	0	0
	ICV Palsu/Expired	50	50
B	Faktor Risiko Alat Angkut	72	72
	Kapal terjangkit penyakit yang menimbulkan wabah	0	0
	Pesawat haji dari Arab Saudi	68	68
	Dokumen Kesehatan Kapal Tidak Lengkap/ Tidak Berlaku	0	0
	Kapal yang ditemukan tanda-tanda kehidupan vektor	4	4
C	Faktor Risiko Barang	0	0
	Jenazah yang tidak memenuhi syarat	0	0
D	Fakto Risiko Lingkungan	43	43
	TTU Memenuhi syarat yg sebelumnya tidak memenuhi syarat	1	1
	TPM Memenuhi syarat yg sebelumnya tidak memenuhi syarat	0	0
	Air Memenuhi syarat yg sebelumnya tidak memenuhi syarat	0	0
	Keberadaan vektor yang melebihi syarat/ ambang batas	42	42
Total		1.954	1.954

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2024 jumlah faktor risiko penyakit yang ditemukan sebanyak 1.954 faktor risiko dan dilakukan pengendalian sebanyak 1.954 faktor risiko, maka persentase faktor risiko yang dikendalikan sebanyak 100%. perbandingan target dan realisasi indikator kedua dapat dilihat pada tabel berikut :

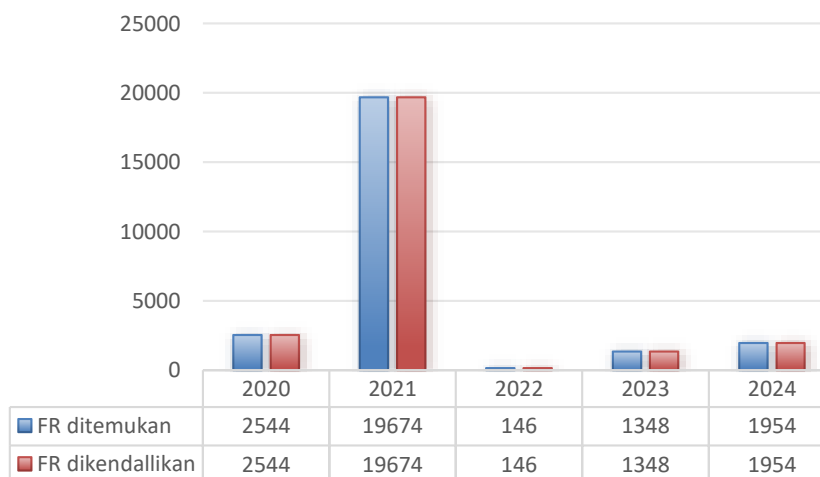
Grafik 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi
Indikator Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan Pada Orang, Alat
Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2024



Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian kinerja faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100%.

b) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

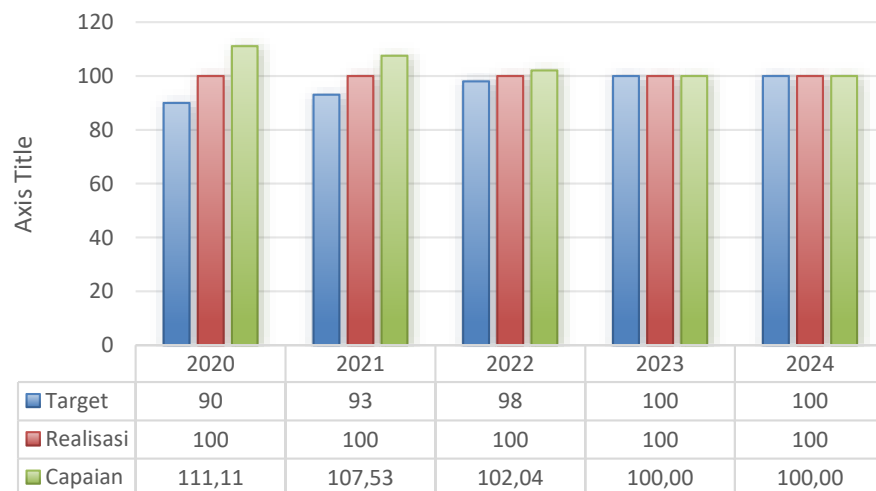
Grafik 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan Pada Orang, Alat
Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2020 s/d 2024



Pada diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2024 semua faktor risiko pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah dikendalikan sebesar 100%. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan dari tahun 2022 dan terus meningkat sampai tahun 2024, hal ini disebabkan karena lalu lintas alat angkut kembali normal.

- c) Perbandingan Realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024

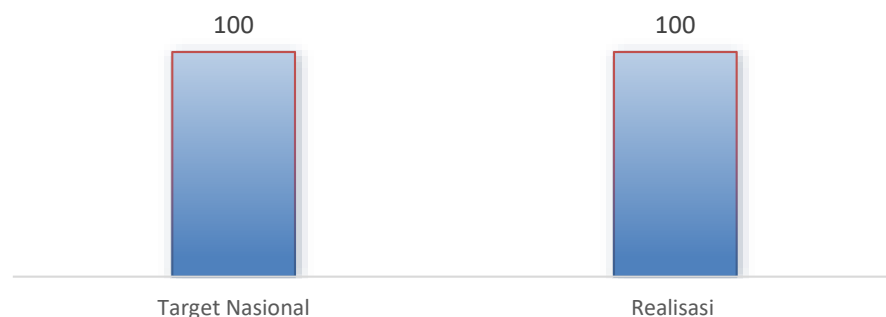
Grafik 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indikator Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020- 2024)



Pada diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator persentase faktor risiko penyakit dipuntu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada tahun 2024 yaitu 100%, hal ini sesuai dengan target RAK tahun 2024.

- d) Perbandingan realisasi Kinerja dengan Target Nasional

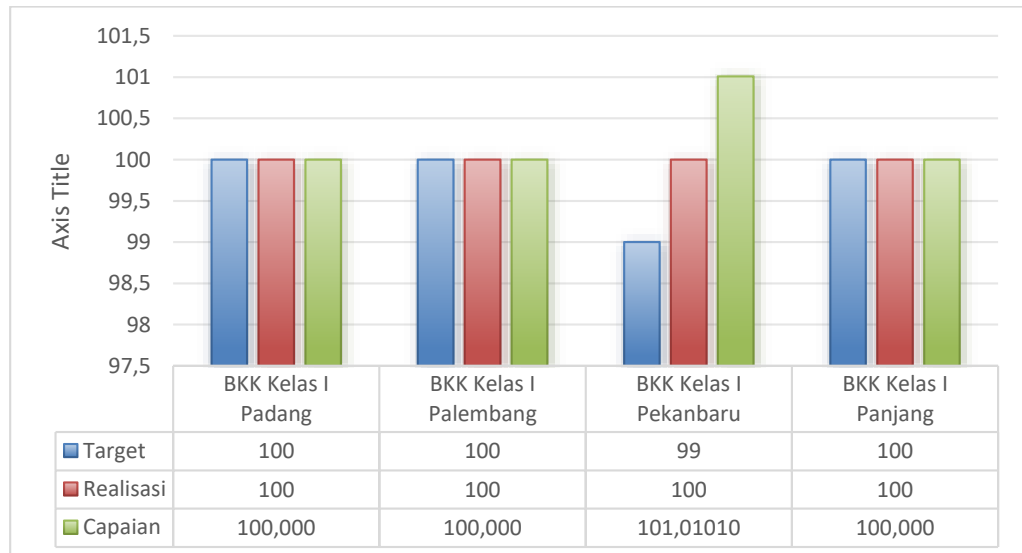
Grafik 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indikator Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan Target Nasional



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator persentase faktor risiko penyakit dipuntu masuk yang dkendalikan pada orang, alat angkut, barang da lingkungan pada tahun 2024 yaitu 100% dan sesuai target Nasional yaitu 100%.

- e) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan organisasi sejenis/setara

Grafik 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan Organisasi Sejenis



Dari grafik diatas diketahui bahwa faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan oleh BKK Kelas I Padang dengan BKK yang sejenis/setara atau BKK yang seluruhnya Kelas I yaitu BKK Kelas I Palembang, BKK Kelas I Pekanbaru dan BKK Kelas I Panjang. Dari grafik dapat di lihat bahwa capaian BKK Kelas I Padang, BKK Kelas I Palembang dan BKK Kelas I Panjang mencapai 100%, sedangkan BKK Pekanbaru mencapai 101,01%. Hal ini disebabkan karena Target BKK Pekanbaru lebih rendah yaitu sebesar 99% sedangkan BKK Padang dan BKK Palembang sebesar 100%. Jika dilihat dari capaian kinerja masing-masing BKK adalah sama yaitu sebesar 100%.

5. Upaya/ Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator

Upaya yang dilakukan dalam pengendalian faktor risiko pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

a) Faktor Risiko Pada Orang

1. Menolak/Menunda keberangkatan pelaku perjalanan.
2. Melakukan Tindakan Kegawatdaruratan.
3. Melakukan pelayanan rujukan.
4. Melakukan Anamnesa pemeriksaan fisik dan Gejala Klinik pada pelaku perjalanan.

5. Melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan pelaku perjalanan

Tabel 3.10
Faktor Risiko Pada Orang Tahun 2024

NO	Pemeriksaan Orang	Jumlah FR ditemukan	Pengendalian Faktor Risiko				Total dikendalikan	%
			Rujuk	Vaksinasi/Penerbitan ICV Baru	Tolak Berangkat	Hasil Anamnesa Pemeriksaan Fisik dan Gejala Klinis Penumpang Layak melakukan Perjalanan		
1	Pelaku perjalanan dengan suhu Tinggi >37,5	1	0	0	0	1	1	100
2	Pelaku perjalanan dengan COVID 19	0	0	0	0	0	0	100
3	Pelaku perjalanan yang sakit	1.695	212	0	22	1.461	1.695	100
4	pelaku perjalanan yang Hamil >32 minggu	93	0	0	24	69	93	100
5	pelaku perjalanan dengan Penyakit menular yang menimbulkan wabah	0	0	0	0	0	0	100
6	ICV Palsu/Expired	50	0	50	0	0	50	100
Total		1.839					1.839	100

b) Faktor Risiko Alat Angkut

Melakukan tindakan sanitasi pada alat angkut (Fumigasi dan Disinseksi). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Faktor Risiko Pada Alat Angkut Tahun 2024

NO	Pemeriksaan Alat Angkut	Jumlah FR ditemukan	Pengendalian Faktor Risiko					Total dikendalikan	%
			Fumigasi	Disinseksi	OME	Bebas Karantina	Surat Pernyataan		
1	Kapal terjangkit penyakit yang menimbulkan wabah	0	0	0	0	0	0	0	100
2	Pesawat haji dari Arab Saudi	68	0	68	0	0	0	68	100
3	Dokumen Kesehatan Kapal Tidak Lengkap/ Tidak Berlaku	0	0	0	0	0	0	0	100
4	Kapal yang ditemukan tanda-tanda kehidupan vektor	4	1	3	0	0	0	4	100
Total		72						72	100

c) Faktor Risiko Barang

Tidak ditemukannya faktor risiko jenazah yang menyebabkan ditolak pengiriman jenazah, dan dokumen jenazah sudah lengkap.

d) Faktor Risiko Lingkungan

1. Memberikan masukan kepada pemilik bangun/usaha menyediakan fasilitas sanitasi
2. Melakukan Tindakan pengendalian Spraying dan Fogging

Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.12
Faktor Risiko Pada Lingkungan Tahun 2024

NO	Pemeriksaan Lingkungan	Jumlah FR ditemukan	Pengendalian Faktor Risiko			Total dikendalikan	%
			Spraying	Fogging	Penyuluhan		
1	TTU Memenuhi syarat yg sebelumnya tidak memenuhi syarat	1	0	0	1	1	100
2	TPM Memenuhi syarat yg sebelumnya tidak memenuhi syarat	0	0	0	0	0	100
3	Air Memenuhi syarat yg sebelumnya tidak memenuhi syarat	0	0	0	0	0	100
4	Keberadaan vektor yang melebihi syarat/ ambang batas	42	30	12	0	42	100
Total		43				43	100

6. Analisis Penyebab Keberhasilan

Analisis keberhasilan capaian target dikarenakan semua faktor risiko yang disebabkan oleh orang, alat angkut, barang dan lingkungan selalu dikendalikan oleh petugas, yaitu :

- 1) Melakukan sosialisasi target kegiatan ke seluruh wilayah kerja pada awal tahun anggaran
- 2) Pengawasan kedatangan dan keberangkatan penumpang secara ketat dan berkesinambungan
- 3) Pemeriksaan kedatangan dan keberangkatan alat angkut sesuai SOP dan standar Keekarantinaan Kesehatan
- 4) Tindakan pengendalian (Desinfeksi, Desinseksi dan fumigasi) pada alat angkut yang ditemukan kehidupan vektor
- 5) Adanya dukungan dari agen pelayaran dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian faktor risiko pada crew dan penumpang

- 6) Adanya dukungan alat komunikasi dan teknologi yang mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga kondisi Kesehatan crew dan penumpang dapat dipantau dengan cepat.
- 7) Kualitas SDM di BKK Kelas I Padang yang mendukung
- 8) Melakukan desiminasi informasi kepada lintas sektor dan lintas program baik melalui informasi media sosial maupun laporan resmi
- 9) Adanya sumber daya peralatan yang memadai, seperti Ambulance dan peralatan penunjang medis lainnya serta peralatan pengendalian risiko lingkungan seperti Spraycan dan Swingfog
- 10) Pengawasan, pembinaan dan advikasi secara rutin terhadap para pelaku usaha jasa boga, tempat pengolahan pangan, pihak penyedia jasa pengelolaan air minum serta adanya komitmen untuk mengendalikan risiko lingkungan
- 11) Fasilitas Kesehatan tempat rujukan yang tersedia dan dapat dijangkau dengan cepat.

7. Kendala/ Permasalahan

- a) Pengendalian faktor risiko pada orang
 - Pengawasan lalu lintas orang terdapat kendala yaitu kemungkinan orang yang datang dalam kondisi belum menunjukkan gejala atau telah meminum obat penurun panas sehingga ketika melewati alat pemindai suhu orang tersebut tidak terdeteksi demam sedangkan penumpang yang sakit tersebut tidak menggunakan APD sehingga dapat menularkan kepada orang lain.
 - Penumpang yang ditolak berangkat karena kondisi kesehatan tidak menerima dan terjadi keributan
 - Masih adanya pelaku perjalanan/Umroh dengan ICV Palsu
- b) Pengendalian faktor risiko pada alat angkut
 - Jauhnya lokasi labuh Kapal pada area karantina sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menuju kapal tersebut, jika kapal masih mempunyai muatan maka kegiatan penyehatan akan tertunda.
 - Belum tersedianya penyelenggaraan hapus tikus/serangga yang memenuhi syarat sesuai aturan dalam melaksanakan desinseksi/fumigasi di kota Padang.
 - Kurang pengetahuan crew kapal terhadap perkembangan vektor dan binatang pembawa penyakit di atas kapal, sehingga mengakibatkan kurang

memperhatikan faktor risiko keberadaan dan masuknya vektor dan BBP di alat angkut.

- Crew kapal yang tidak menjaga kebersihan sanitasi kapal mengakibatkan berkembangbiaknya vektor dengan cepat meskipun telah dilakukan tindakan penyehatan kapal

c) Pengendalian faktor risiko pada lingkungan

- Kurangnya kesadaran masyarakat di pelabuhan untuk menjaga kebersihan lingkungan
- Adanya Tempat pembuangan sampah sementara yang tidak mempunyai tutup sehingga menjadi tempat perindukan vektor
- Adanya jasadnya dan tempat pengolahan makanan (TPM) yang belum bisa memiliki labelling dan SLHS
- Adanya penjamah makanan yang belum mempunyai sertifikat penyuluhan penjamah makanan

8. Pemecahan Masalah

a) Pengendalian Faktor risiko pada orang

- Memasang banner dan himbuan untuk selalu menggunakan masker jika berada di ruang tertutup dan tempat-tempat umum untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, terutama bagi orang yang sakit.
- Memberikan edukasi kepada calon penumpang yang ditolak berangkat tentang penyakitnya serta bahaya yang ditimbulkan, dan bekerja sama dengan lintas sektor seperti avsec dan keamanan jika terjadi keributan.
- Melakukan pengawasan ICV secara menyeluruh kepada Jamaah Umroh

b) Pengendalian Faktor risiko pada alat angkut

- Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Navigasi untuk menetapkan area labuh kapal max 2 mil.
- Memberikan edukasi kepada crew kapal tentang pentingnya menjaga kebersihan sanitasi kapal.

c) Faktor risiko pada lingkungan

- Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sanitasi lingkungan dan meningkatkan program kerja kader kesling yang telah dilatih

- Melakukan sosialisasi terhadap TPM yang baru buka agar memiliki SLHS dan memperbaiki beberapa komponen item pemeriksaan yang belum lengkap agar memenuhi syarat untuk labeling
- Menyarankan agar pemilik TPM untuk pelatihan penjamah makanan baik di Labkes maupun di Dinas Kesehatan setempat
- Pembinaan pengawasan kepada pemilik penyedia air bersih/air minum

9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2024 capain kinerja faktor risiko yang dikendalikan pada orang adalah 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 171.864.000,-. Sedangkan realisasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp.75.464.898,-. Penghitungan efisiensi dan nilai efisiensi sumber daya persentase faktor risiko Penyakit di Pintu Masuk yang dikendalikan pada Orang, Barang dan Alat Angkut dapat dihitung dari rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :
 E = Efisiensi
 NE = Nilai Efisiensi
 PAKi = Pagu Anggaran keluaran i
 RAKi = Realisasi Anggaran keluaran i
 CK = Capaian Keluaran i

Dari rumus di atas, dapat dihitung sebagai berikut :

$$1,48\% = \frac{(119.058.000 \times 1) - 117.294.000}{(119.058.000 \times 1)} \times 100\%$$

$$53,7\% = (50\% + \left(\frac{1,48}{20} \times 50\right))$$

Jadi, nilai efisiensi pada Indikator Kedua ini adalah 53,7%. Ini berarti kinerja BKK Kelas I Padang pada indikator pertama ini telah efisien, karena capaian kinerja lebih besar dari realisasi anggaran.

INDIKATOR KETIGA

INDEKS PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO DI PINTU MASUK NEGARA

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dilakukan dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dalam periode satu tahun untuk mengendalikan faktor risiko masuk dan keluarnya penyakit yang terdapat dalam alat angkut dan muatannya. Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara ini terdiri dari 10 sub indikator yaitu :

1. Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB, dan Bencana di Wilayah Layanan BKK
Respon sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan BKK adalah suatu sistem yang dapat memantau perkembangan trend suatu penyakit menular potensial KLB/Wabah dari waktu ke waktu dan memberikan sinyal peringatan (alert) kepada pengelola program bila kasus tersebut melebihi nilai ambang batasnya sehingga mendorong program untuk melakukan respons.
2. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1
Indeks pinjal adalah angka yang menunjukkan kepadatan pinjal pada tubuh tikus. Indeks pinjal digunakan untuk mengetahui kepadatan investasi rata-rata dari pinjal yang ditemukan pada jumlah tikus yang tertangkap.
3. Persentase bandara/pelabuhan dengan tidak ditemukan larva *Anopheles* (<1)
Tidak ditemukan larva *Anopheles sp* artinya berdasarkan identifikasi larva dari hasil pengamatan yang dilakukan, tidak ditemkan larva *Anhopheles sp* (<1).
4. Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi kecoa (<2)
Indeks populasi kecoa merupakan salah satu indikator kondisi higiene sanitasi suatu tempat atau lingkungan. Berdasarkan Permenkes No. 50 tahun 2018, kepadatan kecoa dikatakan rendah apabila nilainya kurang dari 2.
5. Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi lalat < 2
Kepadatan lalat adalah suatu indikator kurang optimalnya cara pengelolaan sampah atau rendahnya kondisi higiene sanitasi pada suatu tempat. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan berkaitan dengan penyebab penyakit diare sebagai salah satu vector borne disease. Kepadatan lalat dikatakan rendah apabila berdasarkan hasil pengukuran nilainya adalah kurang dari 2.
6. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI Perimeter = 0

House Index perimeter merupakan persentase bangunan yang positif jentik dari seluruh bangunan yang diperiksa yang ada di area perimeter pelabuhan dan bandara. Nilainya harus nol sesuai dengan yang dipersyaratkan secara internasional di pintu masuk negara.

7. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI Buffer < 1

House Index Buffer merupakan persentase bangunan yang positif jentik dari seluruh bangunan yang diperiksa yang ada di area Buffer Pelabuhan dan Bandara dengan angka harus < 1 , area Buffer ini berjarak 400 meter dari batas wilayah pelabuhan.

8. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan
Tempat-tempat umum memenuhi syarat yakni merupakan kondisi sanitasi tempat-tempat umum dimana tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi penggunanya dengan minimal 3 kali pemeriksaan harus memenuhi syarat

9. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan

Tempat Pengolahan Makanan memenuhi syarat dilakukan dengan melakukan inspeksi sanitasi terhadap Tempat Pengolahan Makanan atau TPM terdiri dari jasa boga, restoran, rumah makan, gerai pangan jajanan dan sentra pangan jajanan yang berada dilingkungan pelabuhan dan bandara dengan minimal 3 kali pemeriksaan harus memenuhi syarat.

10. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis

Pengawasan kualitas air bersih dilakukan dengan Inspeksi sanitasi sarana penyedia air bersih dan pengambilan sampel untuk uji kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi. Pengujian berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Pengawasan dilakukan terhadap sarana air reservoir dan hidran serta air depot air minum yang berada pada daerah buffer dan perimeter.

1. Definisi Operasional

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara adalah kegiatan yang terdiri dari pengawasan terhadap faktor-faktor penyebab penyakit yang memenuhi syarat kesehatan sehingga terhindar dari penyakit akibat vektor dan menciptakan sanitasi lingkungan yang baik di wilayah pelabuhan/bandara sebagai

gerbang pintu masuk negara. Status Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.

2. Cara Perhitungan

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dibagi jumlah capaian indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dikali 100%.

$$N = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

N = Presentase indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

X = Jumlah indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

Y = Jumlah capaian indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

3. Capaian Indikator

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

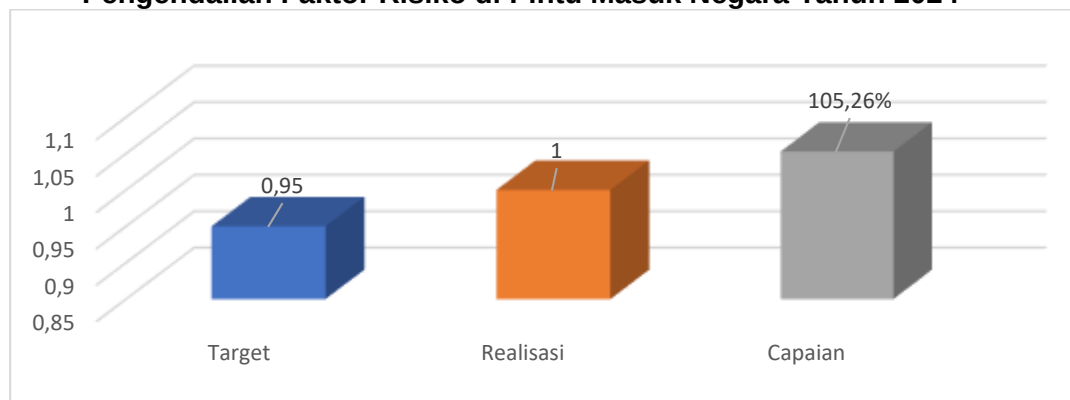
Perbandingan realisasi kinerja dengan target indeks pengendalian risiko di pintu masuk negara tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara Tahun 2024

No	Indeks Pengendalian Faktor Risiko	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam	sinyal	100%	100%	100%
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	Pelabuhan/ bandara	100%	100%	100%
3	Persentase bandara/pelabuhan dengan tidak ditemukan larva <i>Anopheles</i> (<1)	Pelabuhan/ bandara	100%	100%	100%
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan indek populasi kecoa <2	Pelabuhan/ bandara	100%	100%	100%
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan indek populasi lalat <2	Pelabuhan/ bandara	100%	100%	100%
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI Perimeter = 0	Pelabuhan/ bandara	100%	100%	100%
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI Buffer <1	tempat	100%	100%	100%
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	tempat	96%	100%	104,17%
9	Persentase lokus TPM memenuhi syarat dengan minimal 2 kali pemeriksaan	sarana	90%	98,18%	109,09%
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologis/bakteriologis	tempat	90%	100%	111,11%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target indeks pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara adalah 0,95 dengan realisasi kinerja sebesar 1.

Grafik 3.13
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks
Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa dari 0,95 target didapatkan realisasi sebesar 1 yang berarti capaian indeks pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk negara sebesar 105,26%.

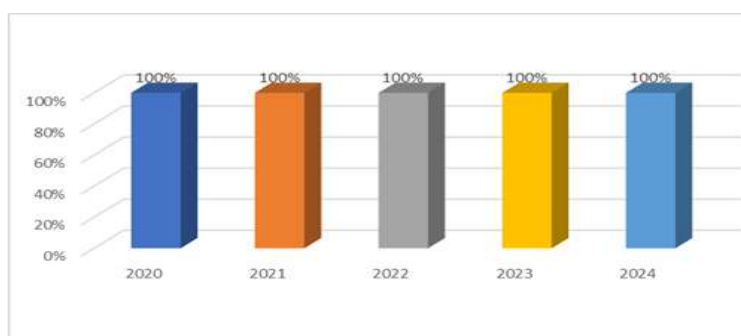
B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir (Tahun 2020 s.d. Tahun 2024)

Perbandingan capaian kinerja indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara tersebut dapat dilihat dari uraian dibawah ini :

- 1) Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB, dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%

Perbandingan capaian kinerja Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan BKK Kelas I Padang 2020 sampai dengan Tahun 2024 BKK Kelas I Padang dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.14
Perbandingan Respon SKD, KLB dan Bencana
Tahun 2020 s.d Tahun 2024



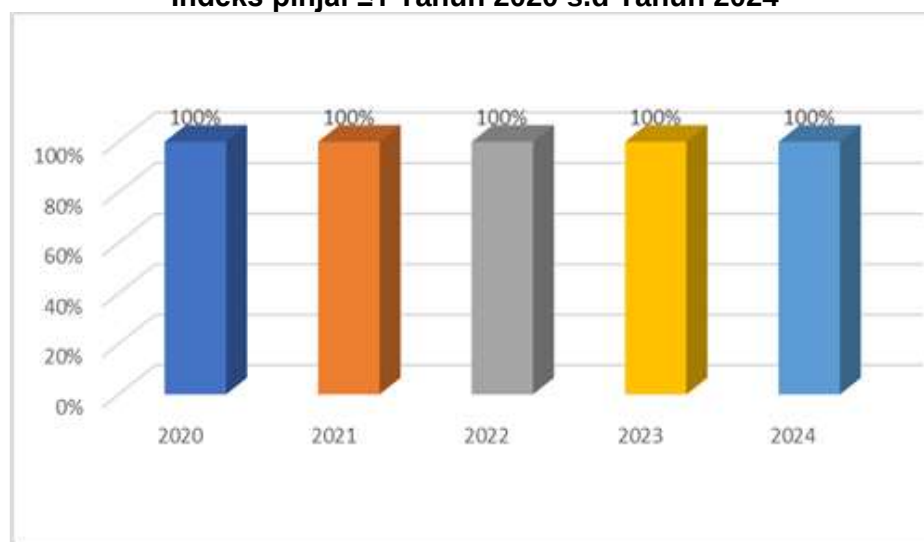
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian SKD, KLB dan bencana dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%.

Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di wilayah layanan BKK Kelas I Padang pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 100%. Kegiatan ini direalisasikan dalam bentuk pengawasan kedatangan kapal dan pesawat udara yang datang dari Negara atau Wilayah Terjangkit penyakit menular potensial wabah dan penyakit menular lainnya berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan RI melalui situs resminya (<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>)

Untuk itu perlu dilakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaku perjalanan di pelabuhan dan bandara. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan peralatan Thermal scanner untuk mendeteksi suhu lebih dari 37,5°C. Hal ini dilakukan karena salah satu indikator untuk mengetahui seseorang menderita penyakit COVID-19, Monkeypox dan penyakit menular lainnya (*Disease Outbreak New*) adalah suhu diatas 37,5°C

- 2) Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks pinjal ≤ 1
Perbandingan jumlah capaian Indeks pinjal ≤ 1 Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 BKK Kelas I Padang terlihat pada grafik berikut:

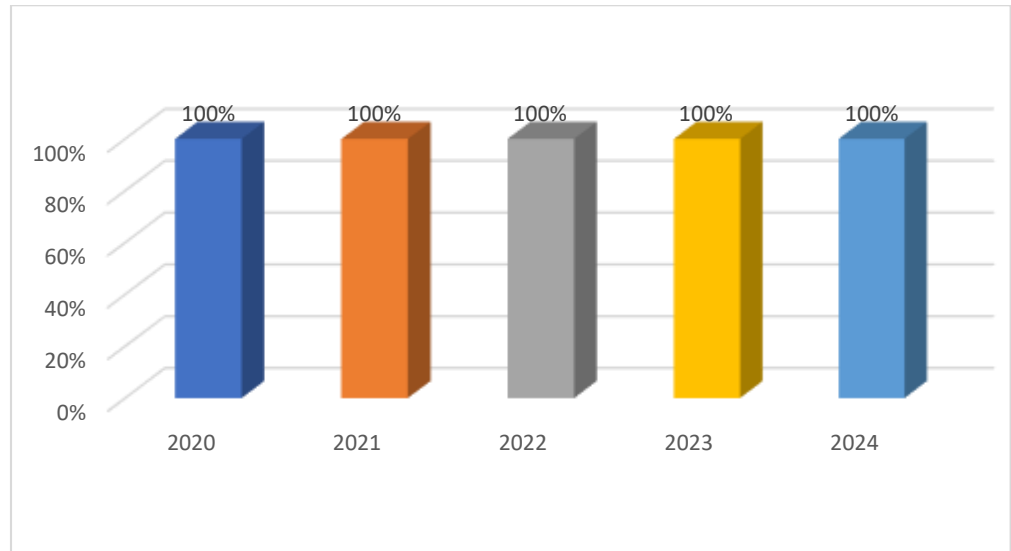
Grafik 3.15
Perbandingan Capaian persentase pelabuhan/bandara dengan Indeks pinjal ≤ 1 Tahun 2020 s.d Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Indeks pinjal ≤ 1 dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sama yaitu 100%.

- 3) Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)

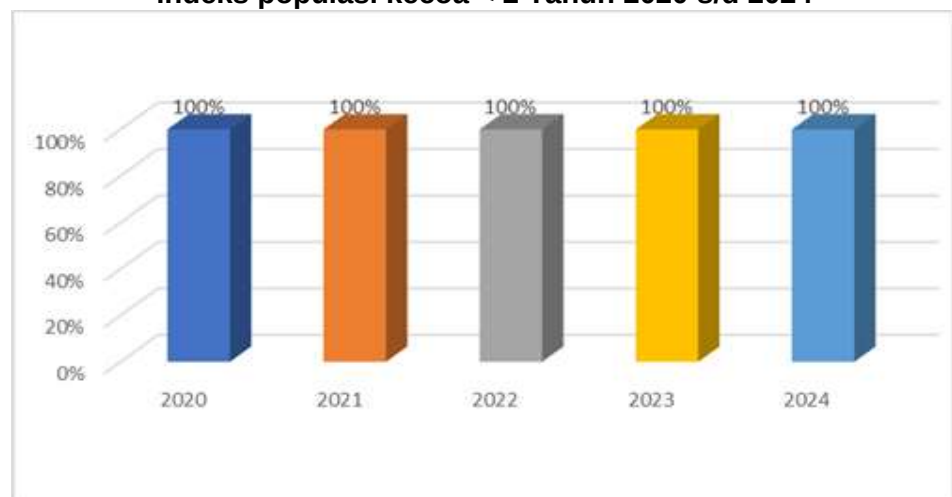
Grafik 3.16
Perbandingan Capaian Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1) Tahun 2020 s/d 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah capaian tidak ditemukan larva anopheles (<1) dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 adalah yaitu 100%.

- 4) Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi kecoa < 2

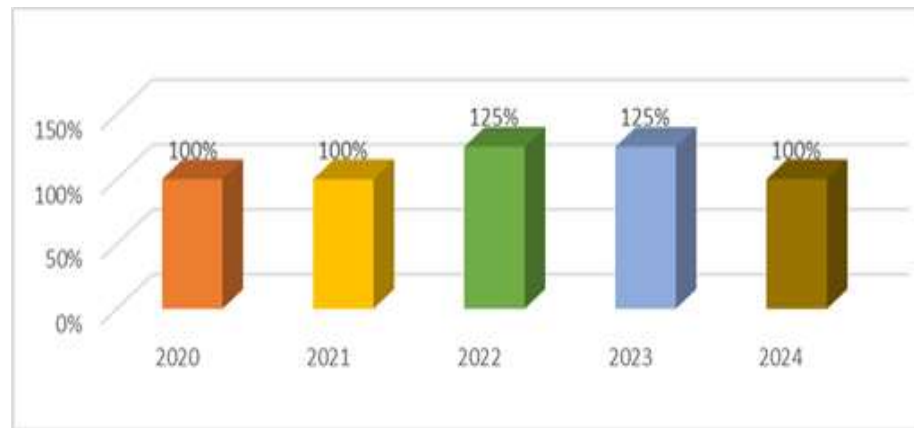
Grafik 3.17
Perbandingan Capaian Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi kecoa < 2 Tahun 2020 s/d 2024



Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah capaian persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi kecoa < 2 dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yaitu sama sebesar 100%.

- 5) Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi lalat < 2

Grafik 3.18
Perbandingan Capaian Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi lalat < 2 Tahun 2020 s/d 2024

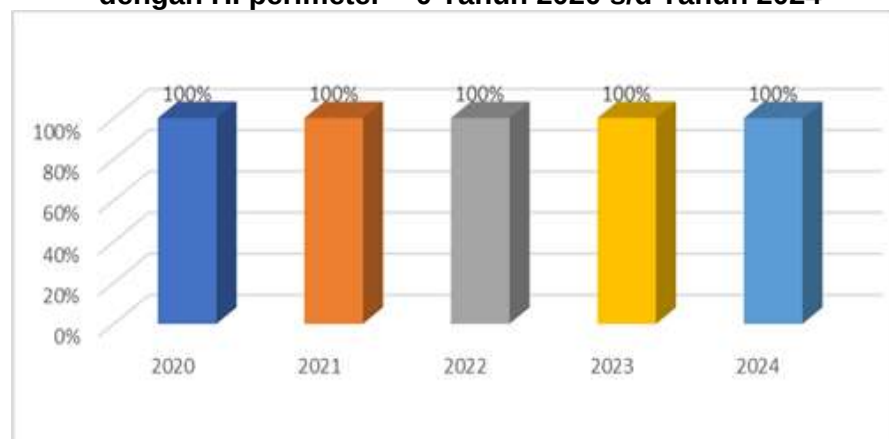


Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi lalat < 2 dari tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah 100% pada tahun 2020, 2021 dan 2024.

- 6) Persentase bandara/Pelabuhan dengan HI perimeter = 0

Perbandingan jumlah capaian Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0 dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 BKK Kelas I Padang dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.19
Perbandingan capaian Persentase bandara/Pelabuhan dengan HI perimeter = 0 Tahun 2020 s/d Tahun 2024

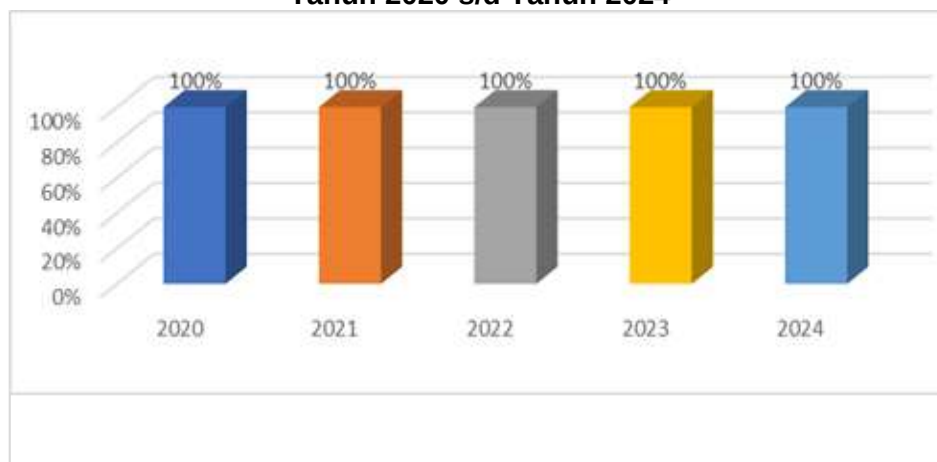


Dari grafik di atas dapat dilihat jumlah capaian Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0 dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sama yaitu sebesar 100%.

7) Persentase bandara/Pelabuhan dengan HI buffer < 1

Perbandingan jumlah capaian Persentase bandara/pelabuhan dengan buffer < 1 dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 BKK Kelas I Padang dapat dilihat pada grafik berikut:

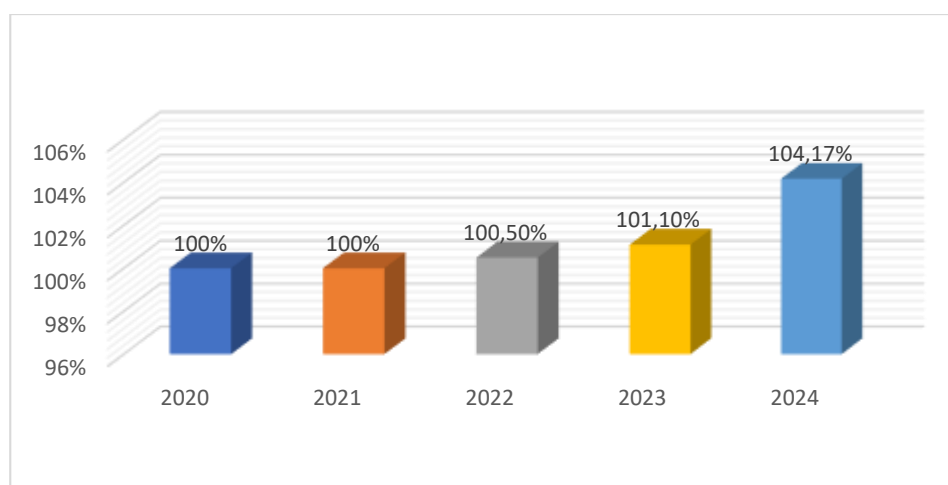
Grafik 3.20
Perbandingan capaian
Persentase bandara/Pelabuhan dengan HI Buffer < 1
Tahun 2020 s/d Tahun 2024



Dari grafik di atas terlihat jumlah capaian Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1 dari tahun 2020 sampai dengan tahun Tahun 2024 sama yaitu sebesar 100%.

8) Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan

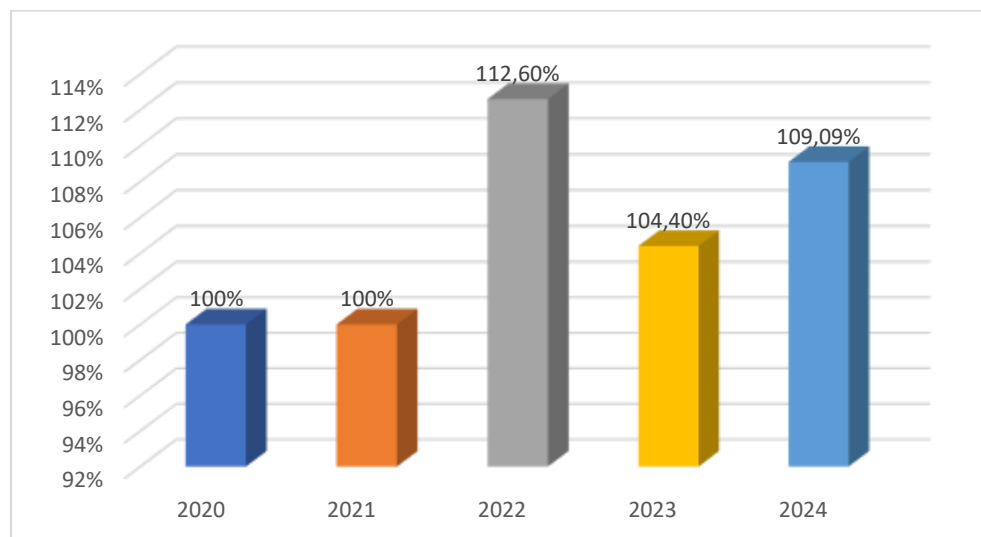
Grafik 3.21
Perbandingan capaian persentase lokus TTU
memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan
Tahun 2020 s.d Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian TTU dengan minimal 3 kali pemeriksaan dari tahun 2020 sampai dengan 2021 sama yaitu 100%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian persentase TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan yaitu 100,5%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan indikator pada tahun 2024 TTU yang memenuhi syarat dengan 3 kali pemeriksaan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2023 capaian persentase TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan yaitu 101,1% karena masih terdapat TTU yang tidak memenuhi syarat sebanyak 2 unit yaitu di Pelabuhan Teluk Bayur dan Wilker Bandara Internasional Minangkabau. Untuk tahun 2024 capaian TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan sebanyak 104,17%.

- 9) Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan
Perbandingan capaian kegiatan persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.22
Perbandingan Capaian Persentase lokus TPM laik hygiene
Tahun 2020 s.d 2024



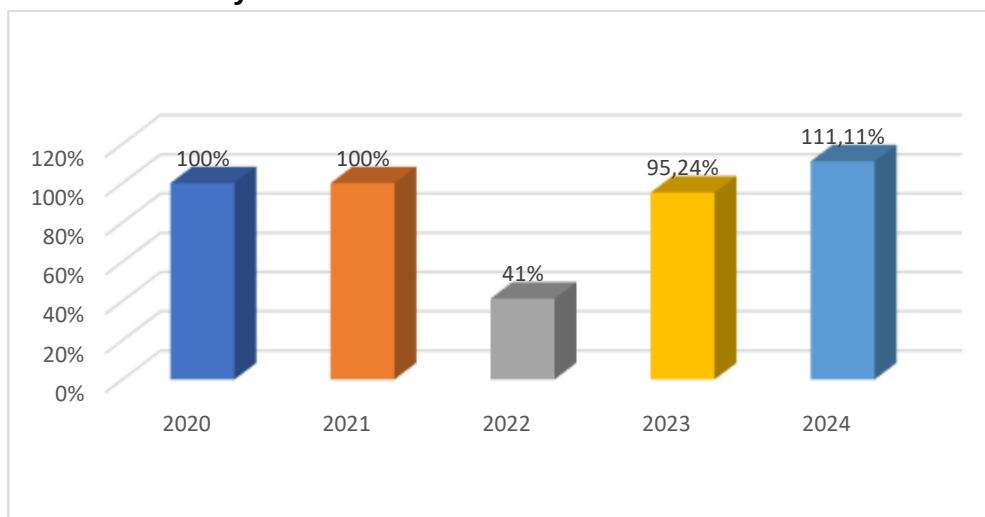
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 sama yaitu 100%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan

sebesar 112,6%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan definisi operasional indikator 3 pada TPM dengan minimal 2 kali penilaian memenuhi syarat. Pada tahun 2023 capaian persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan sebesar 104,4 % dikarenakan masih adanya TPM yang tidak memenuhi syarat di Wilayah Kerja Sikakap dan Tua Pejat. Pada tahun 2024 persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan yaitu 109,09% karena ada penambahan 1 TPM lagi pada bulan Desember di Wilker Bandara Internasional Minangkabau yang belum diperiksa minimal 2 kali pemeriksaan.

- 10) Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis

Perbandingan capaian Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.23
Perbandingan Capaian Persentase Lokus kualitas air bersih memenuhi syarat Kesehatan Tahun 2020 s.d Tahun 2024



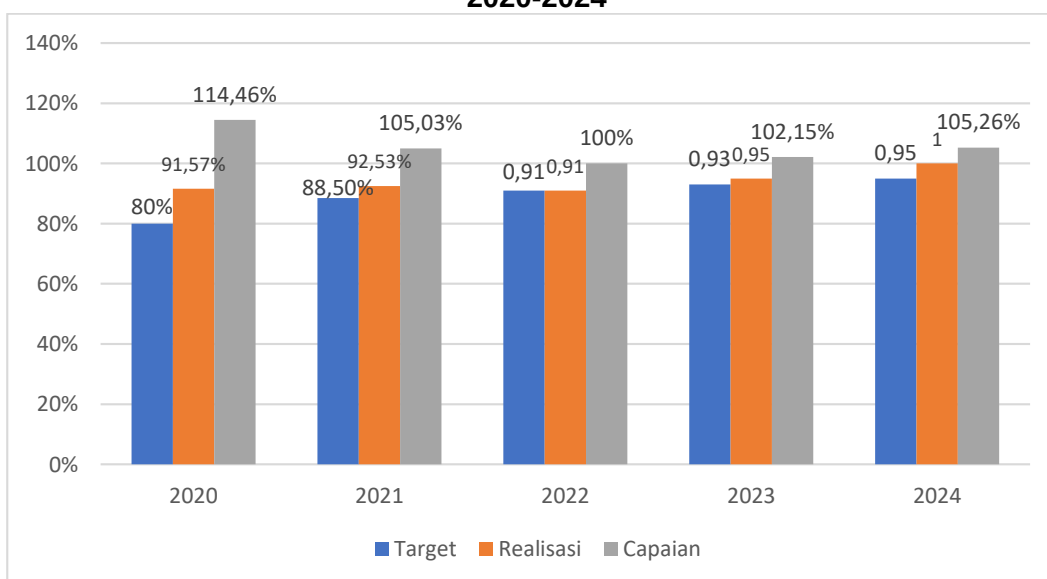
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis tahun 2022 adalah 41%, dari 3 lokus yang ditargetkan hanya 1 lokus yang tercapai dikarenakan tidak adanya anggaran yang tersedia untuk

pelaksanaan kegiatan tersebut, sedangkan pada tahun sebelumnya capaian pemeriksaan sarana air bersih tercapai 100% dengan definisi operasional yang berbeda dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 persentase capaian lokus kualitas air bersih memenuhi syarat dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia dan 6 kali pemeriksaan bakteriologis yaitu 111,11%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2020 s.d. Tahun 2024).

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah (RAK Tahun 2020-2024) dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.24
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah RAK 2020-2024



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara pada tahun 2024 yaitu 0,95 berarti telah mencapai target jangka menengah (RAK Tahun 2020-2024) tahun 2024 yaitu 1 dengan angka capaian sebesar 105.26%. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dapat dilaksanakan secara optimal seiring dengan peningkatan jejaring kerja dan kemitraan, koordinasi dan sinergi dengan lintas program dan lintas sektor.

- D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Organisasi Setara/ sejenis (BKK Kelas I Palembang, BKK Kelas I Pekanbaru, BKK Kelas I Panjang)

Perbandingan capaian kinerja BKK Kelas I Padang dengan organisasi setara atau BKK yang seluruhnya Kelas I dan memiliki wilayah kerja di pelabuhan dan bandata yaitu BKK Kelas I Palembang, BKK Kelas I Pekanbaru, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.25
Perbandingan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu
Masuk Negara Tahun 2024 BKK Kelas I Padang Dengan Organisasi
Sejenis



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indeks faktor risiko di pintu masuk negara BKK Kelas I Padang (105,26%) dan lebih tinggi dari BKK Kelas I Palembang (100%) dan BKK Panjang (100%) dan lebih rendah dari BKK Kelas I Pekanbaru (117,65%). Berdasarkan hasil diatas disebabkan karena target untuk indikator ketiga di BKK Kelas I Padang sebanyak 0,95 sedangkan untuk BKK Kelas I Palembang 0,97 dan BKK Kelas I Pekanbaru 0.85 dan BKK Kelas I Panjang 1. Untuk semua capaian kinerja pada tahun 2024 bagi organisasi sejenis sudah diatas 100%.

5. Analisa penyebab peningkatan/ penurunan Capaian Kinerja

Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara mencapai target yang ditentukan dengan indeks 1 dari target yang ditentukan yaitu sebesar 0,95, pencapaian target di disebabkan oleh :

- a. Kecepatan respon petugas BKK Kelas I Padang serta penyusunan laporan data surveilans secara rutin setiap bulannya serta diseminasi data ke lintas sektor.
- b. Telah terbentuknya Tim Respon Penyakit Kekarantina Kesehatan yang dapat memonitor langsung perkembangan kasus infem dan informasi kesehatan dari media atau situs resmi seperti website WHO, website Infem dan SKDR serta mendiseminasikan pada internal BKK Padang melalui WAG dan yang tidak kalah penting pada lintas sektor/ Stakeholder Balai Kekarantina Kesehatan Kelas I Padang
- c. Adanya kegiatan pembelajaran tematik BKK Kelas I Padang sehingga dapat meningkatkan kapasitas petugas dalam penyakit infeksi emerging serta respon KLB
- d. Koordinasi dengan Fasyankes yang ada disekitar BKK Kelas I Padang untuk melaporkan data penyakit setiap minggu.
- e. Koordinasi lintas sektor yang baik oleh BKK Kelas I Padang dalam rangka menunjang pelaksanaan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat sehingga kegiatan yang menyangkut indeks pengendalian faktor risiko dapat terlaksana dengan baik dan didukung oleh lintas sektor sehingga kegiatan yang terkait pengendalian risiko lingkungan dapat terlaksana dengan baik
- f. Komitmen Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan realisasi yang sudah mencapai target
- g. Adanya kegiatan Workshop Penjamah Makanan yang diadakan pada tahun 2024 sehingga bisa meningkatkan pengetahuan penjamah makanan dalam upaya pengolahan pangan

6. Upaya/ Kegiatan Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

1. Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB, dan Bencana di Wilayah Layanan BKK.

Respon sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan BKK adalah suatu sistem yang dapat memantau perkembangan trend suatu penyakit menular potensial KLB/Wabah dari waktu ke waktu dan memberikan sinyal peringatan (alert) kepada pengelola program bila kasus tersebut melebihi nilai ambang batasnya sehingga mendorong program untuk melakukan respons. Kegiatan ini meliputi surveilans kedatangan kapal/ pesawat dari Negara/ Wilayah

Terjangkit dan koordinasi surveilans penyakit di Wilayah Pelabuhan dengan target kegiatan sebanyak 12 kali (100%). Adapun upaya untuk mencapai Indikator adalah :

- Melakukan pelatihan intensif kepada petugas tentang prosedur penanganan KLB dan bencana, termasuk simulasi tanggap darurat.
- Memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat deteksi dan pelaporan sinyal SKD dan KLB. Sistem ini memungkinkan pengolahan data secara real-time untuk mendukung keputusan cepat.
- Membangun sinergi dengan Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan instansi terkait untuk mempercepat alur informasi dan respons.
- Mengadakan transportasi medis dan peralatan kesehatan untuk mendukung mobilisasi dalam waktu singkat.
- Membuat Panduan Standar Operasional (SOP) agar setiap kejadian direspon secara terstruktur dan sistematis dalam waktu kurang dari 24 jam.

2. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes

Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pemetaan, persiapan alat dan bahan, pemasangan perangkat dan identifikasi tikus dan pinjal.

3. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria

Layanan survei faktor risiko penyakit malaria merupakan kegiatan survei jentik dan nyamuk dewasa *Anopheles* di wilayah perimeter dan buffer area.

4. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD

Layanan survei faktor risiko penyakit DBD dilaksanakan di BKK Kelas I Padang dengan pelaksanaan berupa survei jentik *Aedes* sp, larvasida dan indentifikasi jentik.

5. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare

Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pemasangan perangkat kecoa pada TPS dan rumah makan serta identifikasi. Selain itu juga dilakukan survei kepadatan lalat dengan menggunakan flygrill pada tempat-tempat perindukan lalat.

6. Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum

Pengawasan TTU merupakan rangkaian kegiatan IKL terhadap bangunan yang berada di wilayah kerja BKK Kelas I Padang.

7. Pengawasan hygiene sanitasi TPM

Tempat Pengolahan Makanan atau TPM terdiri dari jasa boga, restoran, rumah makan, gerai pangan jajanan dan sentra pangan jajanan yang berada dilingkungan pelabuhan dan bandara dengan.

8. Upaya Penyehatan Air

Pengawasan kualitas air bersih dilakukan dengan Inspeksi sanitasi sarana penyedia air bersih dan pengambilan sampel untuk uji kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi. Pengujian berdasarkan Permenkes Nomor 2 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Pengawasan dilakukan terhadap sarana air reservoir dan hidran serta air depot air minum yang berada pada daerah buffer dan perimeter.

7. Kendala/ masalah yang dihadapi

Kendala yang dihadapi pada Indikator indeks pengendalian faktor risiko di bandara/pelabuhan/PLBDN masuk Tahun 2024 adalah:

- a. Pada kegiatan Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB, dan Bencana di Wilayah Layanan BKK
 - Adanya wilker seperti Sikapak yang memiliki akses internet/ jaringan komunikasi yang buruk, menghambat proses pelaporan dan penanganan cepat.
 - Fasyankes di lingkungan BKK Padang dalam menginput data penyakit pada link yang telah disediakan masih perbulan tidak perminggu sesuai yang telah diberitahukan melalui surat sehingga memperlambat terhadap respon penyakit/ keterlambatan identifikasi sinyal.
- b. Hasil pemeriksaan kualitas air minum masih terdapat yang tidak memenuhi syarat pada parameter bakteriologis terutama pada operasional kegiatan Embarkasi dan Debarkasi Haji namun dengan upaya pengendalian maka faktor risiko ini dapat dikendalikan
- c. Pelaksanaan survei dan pengendalian vektor DBD sudah berjalan dengan baik namun beberapa rumah tidak bisa dilakukan karena penghuni tidak berada di tempat atau rumah kosong
- d. Hasil pemantauan kepadatan lalat sudah tercapai <2 namun terdapat beberapa TPS yang tidak memiliki penutup serta perilaku masyarakat yang membuang sampah pada bagian luar TPS sehingga tampak berserakan

- e. Masih terdapat TPP yang belum memiliki label dan SLHS agar dapat mencapai target minimal 75% yang sudah tersertifikasi dalam rangka self assessment Pelabuhan dan bandar udara sehat.

8. Pemecahan masalah

Adapun pemecahan masalah yang dihadapi pada Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara Tahun 2024 adalah :

- a. Pada kegiatan Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB, dan Bencana di Wilayah Layanan BKK
 - Berkolaborasi dengan pemerintah daerah Sikakap untuk memperbaiki akses Internet dan memperkuat jaringan komunikasi
 - Membentuk tim gabungan yang melibatkan semua Fasyankes di Lingkungan BKK Padang untuk merancang alur komunikasi dan kerja yang lebih terintegrasi.
- b. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan reservoir air yang tidak memenuhi syarat dengan memberikan klorin agar hasilnya menjadi memenuhi syarat
- c. Telah dilakukan penambahan anggaran tahun 2024 untuk sarana dan prasarana kesehatan lingkungan berupa pengadaan alat pengukur kualitas air dan udara, reagen sampel makanan dan air, teskit bakteriologi *e coli* dan *coliform* dalam bentuk compact dry serta uji dengan menggunakan metode H₂S agar dapat dipergunakan untuk semua wilayah kerja
- d. OJT petugas dan kader yang akan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kader dalam pelaksanaan survei vektor di lapangan yang sudah dilakukan di awal tahun 2024
- e. Melakukan Upaya sosialisasi terkait kebijakan Label dan SLHS kepada pemilik TPP yang akan dilakukan pada kegiatan workshop penjamah makanan agar dapat melengkapi Upaya pemenuhan persyaratan agar dapat terdaftar di aplikasi OSS.

9. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Penghitungan efisiensi dan nilai efisiensi sumberdaya indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :
 E = Efisiensi
 NE = Nilai Efisiensi
 PAKi = Pagu Anggaran keluaran i
 RAKi = Realisasi Anggaran keluaran i
 CK = Capaian Keluaran i

Sehingga dengan rumus tersebut efisiensi pada indikator 3 dapat dilihat sebagai berikut :

$$E = \frac{((764.770.000 \times 1,05) - 738.128.295)}{(764.770.000 \times 1,05)} \times 100\% = 8,08$$

$$NE = (50\% + \left(\frac{8,08}{20} \times 50\right)) = 70,20\%$$

Berdasarkan target kinerja indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara sebesar 0,95 dan realisasi kinerja 1 maka di dapat capaian kinerja indikator sebesar 105,26%, sedangkan berdasarkan anggaran dari pagu indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara sebesar Rp. 764.770.000 dan realisasi sebesar Rp. 738.770.000,- (96,52%).

Tabel. 3.14
Perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko dipintu Masuk Negara tahun 2024

No	Indikator	Pagu anggaran Keluaran (PAK)	Realisasi Anggaran Keluaran (RAK)	%	Capaian Keluaran (CK)	Efisien si	Nilai Efisiesnsi	Kategori
1	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	764.770.000	738.128.295	96,52	1.05	8,08	70,20%	Efisien

Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara telah terlaksanan dengan efisien, karena capaian kinerja lebih besar dari realisasi anggaran. Dengan realisasi anggaran 96,52% dapat dicapai kinerja yang dicapai 105,26%.

INDIKATOR KEEMPAT

Nilai Kinerja Anggaran

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

1. Definisi Operasional

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konsteks. Aspek implementasi memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan dalam RKA-K/L secara tahunan. Aspek manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang cova dipecahkan melalui intervensi program.

2. Rumus/ Cara Perhitungan

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dihitung berdasarkan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

3. Capaian Indikator

Nilai Kinerja Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang pada Tahun 2024 sebesar 91,13 (*screenshot dashboard* terlampir). Dengan nilai tersebut, maka Kinerja Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Nilai Kinerja Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang ini terdiri dari:

- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 44,15

Nilai tersebut didapat dari rumus :

$$\text{Perencanaan} = [(CRO \times 75\%) + (\text{Penggunaan SBK} \times 10\%) + (\text{Efisiensi SBK} \times 15\%)] \times 50\%$$

Evaluasi perencanaan anggaran dilakukan melalui penilaian kinerja perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja tematik. Penilaian kinerja anggaran diukur melalui efektivitas penggunaan anggaran yaitu berdasarkan capaian output dan diukur melalui efisiensi penggunaan anggaran yang dilihat dari hubungan sumber daya yang digunakan untuk capaian output. Berikut nilai kinerja perencanaan anggaran BKK Kelas I Padang tahun 2024 :

Tabel 3.15
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BKK Kelas I Padang Tahun 2024

Indikator	Nilai	Bobot
Capaian Rincian Ouput	97,3	75%
Penggunaan SBK	100,0	10%
Efisiensi SBK	35,5	15%

Sehingga berdasarkan tabel di atas nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 88,3 atau menyumbang sebesar 44,15 dari Nilai Kinerja Anggaran.

- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 46,98

Nilai tersebut didapat dari rumus :

$$\begin{aligned} \text{Pelaksanaan} = & (\text{Revisi DIPA} + \text{Deviasi Hlm III DIPA} + \text{Penyerapan Anggaran} \\ & + \text{Belanja Kontraktual} + \text{Penyelesaian Tagihan} \\ & + \text{Pengelolaan UP dan TUP} + \text{Capaian Output} \\ & - \text{Dispensasi SPM}) \times 50\% \end{aligned}$$

Evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja Kementerian/Lembaga. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu kualitas perencanaan pelaksanaan angagran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Berikut nilai kinerja pelaksanaan anggaran :

Tabel 3.16
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BKK Kelas I Padang Tahun 2024

Aspek	Indikator	Nilai
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	10,00
	Deviasi Hal 3 DIPA	11,42
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	18,68
	Belanja Kontraktual	9,33
	Penyelesaian Tagihan	10,00
	Pengelolaan UP dan TUP	10,00
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	24.53
Pengurangan	Dispensasi SPM	0

Sehingga berdasarkan nilai tersebut Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 93,96 atau menyumbang sebesar 46,98 dari Nilai Kinerja Anggaran.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 bisa di dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.26
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggara Tahun 2024

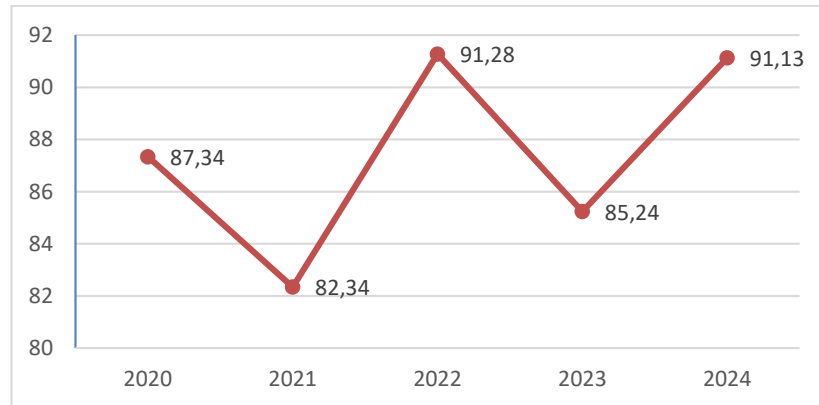


Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2024 sebesar 91,13 atau sebesar 104,75% dimana nilai ini sudah sangat baik melebihi taret yang telah ditetapkan. Target ini dapat tercapai dengan memaksimalkan nilai perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir (Tahun 2020 s.d. Tahun 2024).

Perbandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran dari tahun 2020 sampai dengan 2024 bisa di dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.27
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran
Tahun 2020 s.d Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Nilai Kinerja Anggaran dari tahun 2020 s.d 2024 terus mengalami fluktuasi dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 91,28. Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2024 meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 91,13.

- C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK BKK Kelas I Padang 2020 - 2024).

Perbandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran dari Tahun 2024 dengan RAK 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.28
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024
Dengan RAK BKK Kelas I Padang 2020 - 2024

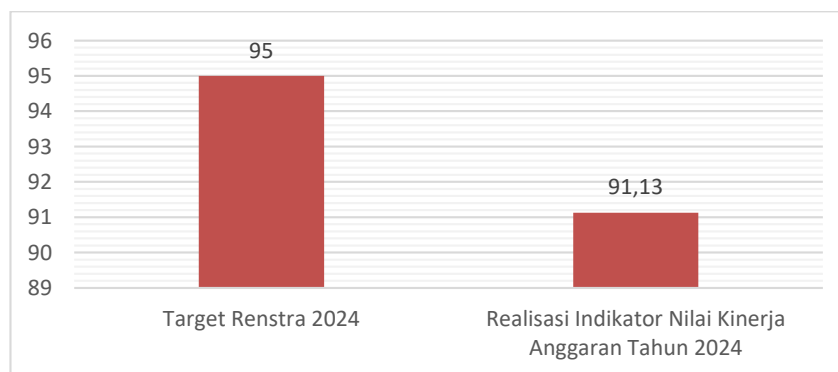


Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Padang selama lima tahun berturut-turut telah mencapai target yang

ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024 dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 109,98. Nilai kinerja anggaran tahun 2024 telah mencapai target pada akhir RAK yaitu dengan capaian sebesar 104,75.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

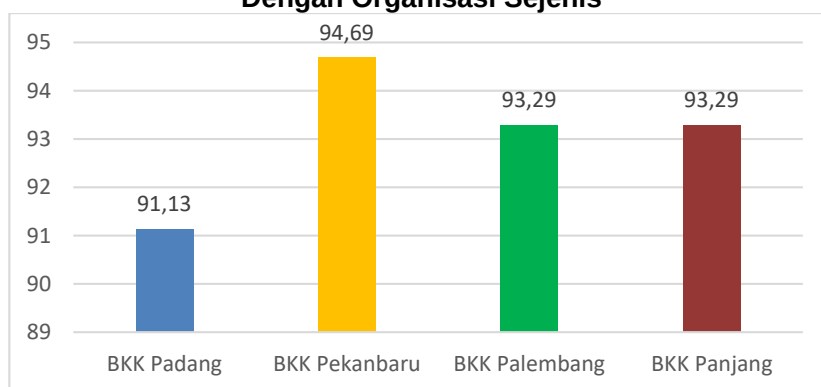
Grafik 3.29
Perbandingan Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024
Dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan



Target Nilai Kinerja Penganggaran pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada tahun 2024 sebesar 95 namun realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran pada BKK Kelas I Padang belum mencapai target yaitu sebesar 91,13.

E. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Organisasi Setara/ sejenis

Grafik 3.30
Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024
Dengan Organisasi Sejenis



Dari grafik di atas dapat dilihat perbandingan Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Padang dengan satuan kerja sejenis yaitu Balai Kekarantinaan Kesehatan yang seluruhnya merupakan Kelas I. Grafik menunjukkan bahwa Nilai Kinerja

Anggaran BKK Kelas I Padang terendah dibandingkan BKK Kelas I Pekanbaru, BKK Kelas I Palembang dan BKK Kelas I Panjang.

5. Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan

- Pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun.
- Melakukan revisi kegiatan terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
- Melakukan revisi anggaran terhadap anggaran yang tidak bisa direalisasikan.
- Melakukan akselerasi dan optimalisasi anggaran pelaksanaan kegiatan.
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik.
- Mempercepat realisasi anggaran setelah sebelumnya terdapat *lock* pagu anggaran perjalanan dinas pada triwulan IV.

6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Capaian nilai kinerja anggaran telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 104,75%. Keberhasilan ini didapat dengan mengoptimalkan nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran yaitu memenuhi seluruh memaksimalkan nilai seluruh indikator penilaian. Serta kerja sama antar setiap tim kerja dan subbagian umum dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dan pengumpulan data untuk melaporkan capaian output secara tepat waktu pada aplikasi SAKTI.

7. Kendala yang dihadapi

- Terbitnya KMK 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran yang mengakibatkan perubahan dalam perhitungan penilaian Nilai Kinerja Anggaran.
- Aplikasi Monev Kemenkeu membutuhkan waktu dalam migrasi data dari SAKTI sehingga pelaporan Nilai Kinerja anggaran perbulannya sering terlambat.
- Realisasi anggaran tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA.
- Terdapat blokir perjalanan dinas pada trimester IV yang menyebabkan keterlambatan pada realisasi dan pencapaian target output.

8. Pemecahan Masalah

- Melakukan input data capaian output secara tepat waktu sesuai jadwal dari KPPN yaitu selama 5 hari kerja bulan setelahnya.
- Komitmen pengelola program dan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan dan penarikan dana sesuai dengan RPK dan RPD yang telah ditetapkan.
- Melakukan revisi kegiatan dan revisi anggaran untuk kegiatan dan anggaran yang tidak dapat dilaksanakan.
- Melakukan optimalisasi dan akselerasi pelaksanaan realisasi anggaran dan kegiatan.

9. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi digunakan sebagai bentuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi satuan kerja yang dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi yaitu capaian RO, pagu dalam DIPA terakhir dan realisasi anggaran dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :
E = Efisiensi
NE = Nilai Efisiensi
PAK = Pagu Alokasi
RAK = Realisasi Anggaran
CK = Capaian Kinerja

Sehingga dengan rumus tersebut efisiensi pada indikator 4 dapat dilihat sebagai berikut :

$$4,79\% = \frac{((158.419.000 \times 1.05) - 158.377.972)}{(158.419.000 \times 1.05)} \times 100\%$$

$$61,98\% = (50\% + \left(\frac{4.79}{20} \times 50\right))$$

Berdasarkan nilai di atas terlihat bahwa efisiensi pada indikator 4 sebesar 4,79% yaitu dengan realisasi anggaran pada indikator 4 sebesar Rp.158.377.972,- dari pagu anggaran sebesar Rp.158.419.000,- atau sebesar 99,97% dari pagu anggaran sedangkan capaian pada indikator 4 sebesar 104,75%. Hal ini berarti terdapat indikator Nilai Kinerja Anggaran dinilai efisien dalam memanfaatkan anggaran yaitu masih berada pada nilai efisien yaitu -20 sampai dengan 20.

INDIKATOR KELIMA

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk mendukung keandalan laporan keuangan pemerintah maka perlu diselenggarakan sistem pengendalian intern yang di dalamnya mencakup proses rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

1. Definisi Operasional

Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/Satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

2. Rumus/Cara Perhitungan

Nilai agregat dari revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan pengelolaan UP dan TUP, capaian output serta pengurang dari dispensasi SPM.

$$\frac{\sum \text{Capaian Nilai IKPA}}{\sum \text{Target Indikator 7}} \times 100\%$$

3. Capaian Indikator

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

IKPA memiliki 7 indikator yang terfokus pada 3 aspek yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran (25%), Kualitas Pelaksanaan Anggaran (50%) dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%). Berdasarkan data yang ada di aplikasi OM-SPAN, nilai IKPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang di tahun 2024 adalah tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.17
Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024

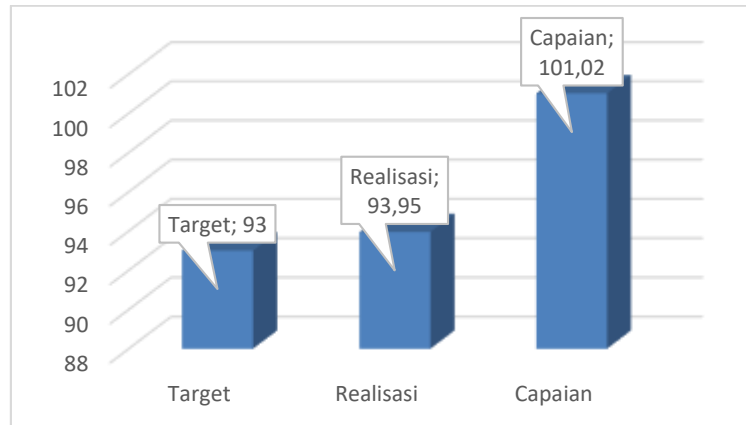
Keterangan		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	88,05
	Deviasi Halaman III DIPA	76,10	15	11,42	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	93,38	20	18,68	96,68
	Belanja Kontraktual	93,33	10	9,33	
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
	Pengelolaan UP dan TUP	100	10	10	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	98,11	25	24,53	98,11
Nilai Total		93,95			
Konversi Bobot		100%			
Dispensasi SPM (Pengurang)		0			
Nilai Akhir		93,95			

Dilihat dari tabel nilai IKPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang sebesar 93,95 yang dihitung dari akumulasi dari 3 aspek penilaian dengan nilai tertinggi yaitu pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran dan nilai terendah pada aspek kualitas perencanaan anggaran.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi Nilai IKPA Tahun 2024 bisa di dapat dilihat pada grafik berikut ini:

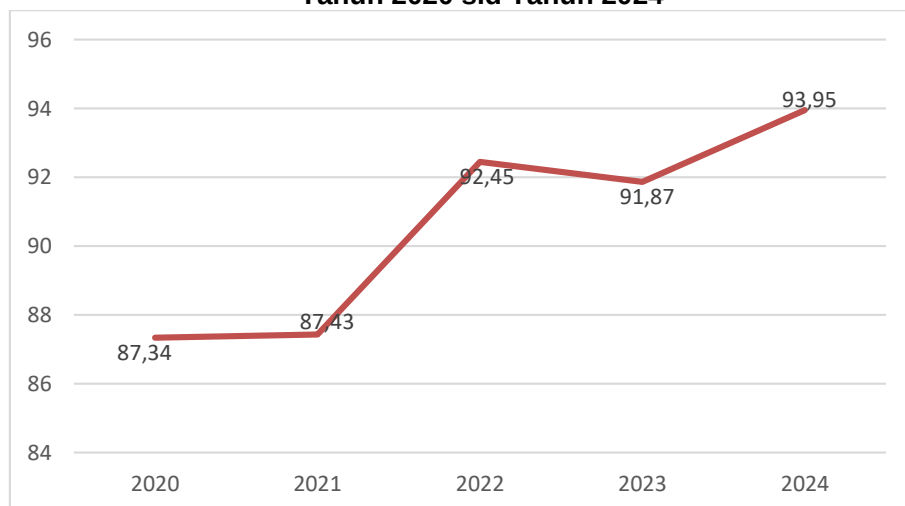
Grafik 3.31
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai IKPA Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa target Nilai IKPA Tahun 2024 sebesar 93 telah tercapai dengan realisasi sebesar 93,95 dengan capaian sebesar 101,02%.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir (Tahun 2020 s.d. Tahun 2024)

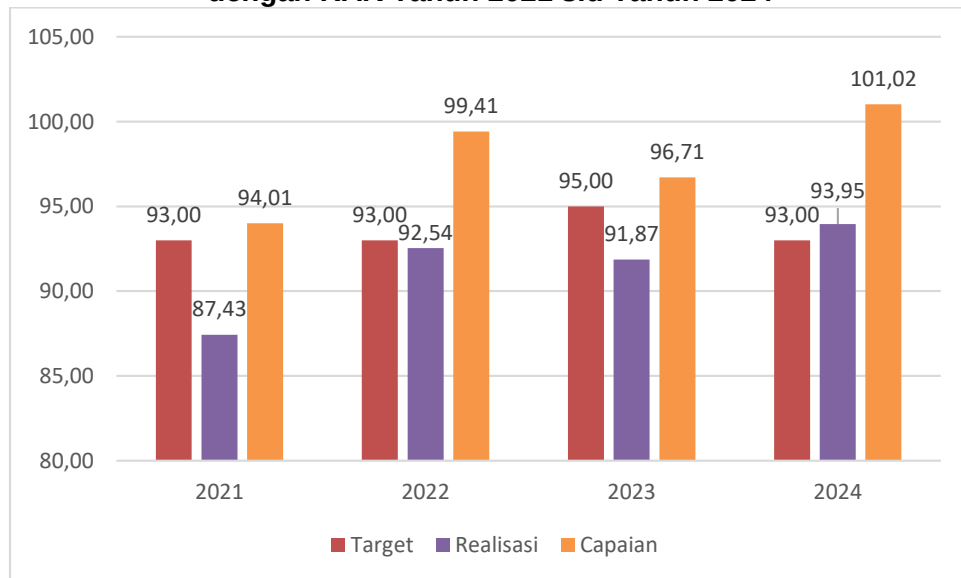
Grafik 3.32
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai IKPA Tahun 2020 s.d Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Nilai IKPA pada Tahun 2024 merupakan nilai tertinggi pada lima tahun terakhir yaitu sebesar 93,95.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2021 s.d. Tahun 2024)

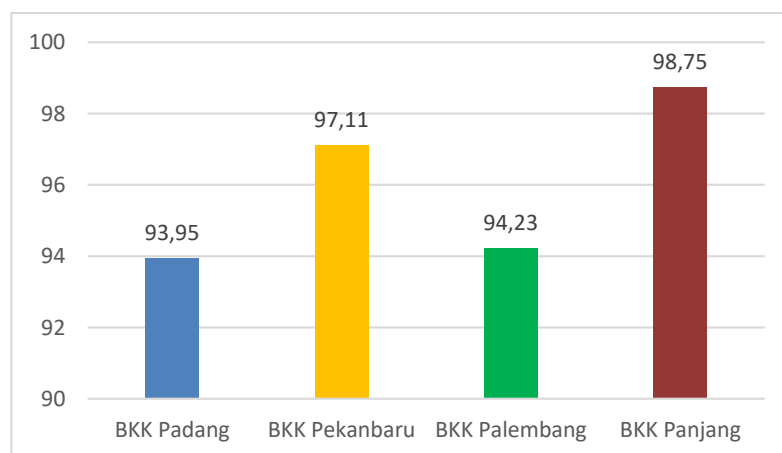
Grafik 3.33
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai IKPA Tahun 2024 dengan RAK Tahun 2021 s.d Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa hingga tahun 2023 indikator 5 belum mencapai target yang telah ditetapkan dan pada tahun 2024 indikator 5 berhasil mencapai target dengan capaian 101,02%. Hal ini dapat tercapai karena penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik sehingga target dapat tercapai.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Organisasi Setara/ sejenis

Grafik 3.34
Perbandingan Capaian Indikator Nilai IKPA Tahun 2024 Dengan Organisasi Sejenis



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Nilai IKPA BKK Kelas I Padang paling rendah dibandingkan satuan kerja sejenis sehingga diharapkan untuk tahun berikutnya nilai IKPA akan meningkat dan kembali mencapai target yang telah ditentukan.

4. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

- Melakukan pemutakhiran data RKAKL/DIPA, apabila terdapat revisi POK;
- Tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi terhadap pagu yang sudah dikontrakkan;
- Tetap melaksanakan pengendalian revisi DIPA secara sangat selektif, memperbaiki aspek perencanaan kegiatan dan anggaran agar sesuai kebutuhan.
- Khusus untuk Deviasi Halaman III DIPA, satker K/L perlu dihimbau agar segera memperbaiki perencanaan kegiatan dan jadwal penarikan dananya.
- Senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak, pertanggungjawaban UP/TUP, dan penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran untuk menghindari adanya dispensasi SPM.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan Indikator

Capaian indikator 5 pada tahun 2024 telah mencapai target yaitu sebesar 101,02% dari target, hal ini dikarenakan dengan memaksimalkan nilai-nilai dari seluruh aspek penilaian pada IKPA yaitu aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

6. Kendala/ Permasalahan

- Realisasi anggaran perbulannya tidak sesuai dengan rencana penarikan dana.
- Kesalahan dalam penginputan rencana penarikan dana saat revisi halaman III DIPA yang menyebabkan nilai deviasi halaman III DIPA rendah.
- Terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan RPK yang telah disusun.
- Terdapat arahan blokir perjalanan dinas sebesar 50% pada triwulan IV.

7. Pemecahan Masalah

- Adapun pemecahan masalah yang telah dilakukan terkait Indikator Nilai IKPA selama tahun 2024 adalah:

- Melakukan input rencana penarikan dana disesuaikan dengan realisasi dan rencana penarikan dana.
- Melakukan perbaikan atas kesalahan dalam penginputan rencana penarikan dana pada triwulan I dan II.
- Melaksanakan realisasi anggaran sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah dibuat sebelumnya.
- Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dan optimalisais belanja modal.

8. Analisa Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi digunakan sebagai bentuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi satuan kerja yang dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi yaitu capaian RO, pagu dalam DIPA terakhir dan realisasi anggaran dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan : E = Efisiensi
NE = Nilai Efisiensi
PAK = Pagu Alokasi
RAK = Realisasi Anggaran
CK = Capaian Kinerja

Sehingga dengan rumus tersebut efisiensi pada indikator 5 dapat dilihat sebagai berikut :

$$4,91\% = \frac{((16.391.230.000 \times 1,01) - 15.742.311.687)}{(16.391.230.000 \times 1,01)} \times 100\%$$

$$62,28\% = (50\% + \left(\frac{4,91}{20} \times 50\right))$$

Berdasarkan nilai di atas terlihat bahwa efisiensi pada indikator 5 sebesar 4,91% masih berada pada range -20 sampai dengan 20 yang artinya nilai tersebut efisien karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan realisasi anggaran. Realisasi anggaran pada Indikator 5 sebesar Rp. 15.742.311.687,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 16.391.230.000,- atau sebesar 96,04% dari pagu anggaran sedangkan capaian kinerja pada indikator 5 sebesar 101,02%.

INDIKATOR KEENAM

Kinerja Implementasi WBK Satker

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani secara cepat, tepat dan professional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka perlu dibangun pilot project dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya Reformasi Birokrasi.

1. Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self Assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.

2. Rumus/ Cara Perhitungan

Nilai implementasi WBK Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil. Oleh karena itu dihitung hanya 1 kali saja dalam 1 tahun berdasarkan penilaian WBK oleh Tim Penilai Internal bagian Hukum, Organisasi dan Masyarakat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

4. Capaian Indikator

Berdasarkan penilaian hasil Desk Review Kinerja Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal kementerian Kesehatan pada tanggal 3 Desember 2024 diperoleh nilai Komponen Pengungkit sebesar 49,15 dan Komponen Hasil diperoleh nilai sebesar 32,93, sehingga total penilaian sebesar 82,00. Hasil Review Kinerja Impelentasi WBK Tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.18
Hasil Review Kinerja Impelentasi WBK Tahun 2024

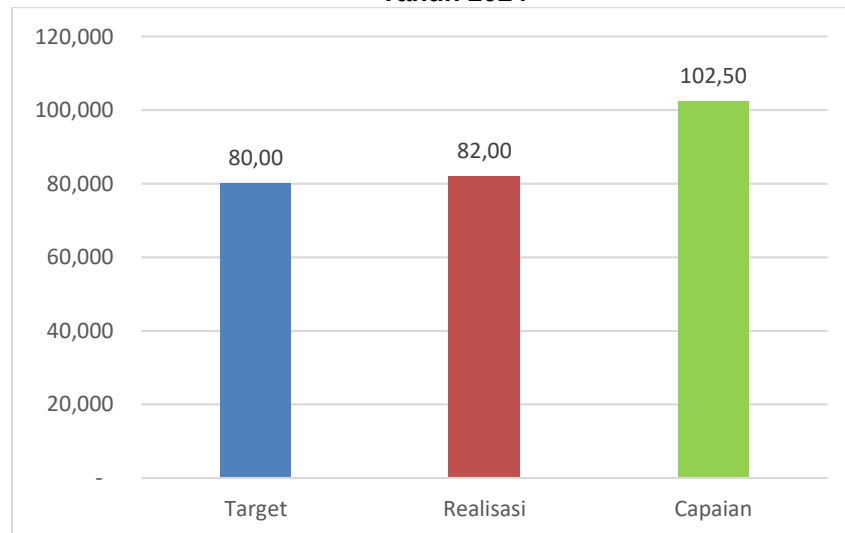
No.	Materi	Nilai Maksimal	Nilai Perolehan
I	<u>KOMPONEN PENGUNGKIT</u>	60	49,16
	A Aspek Pemenuhan	30	24,37
	1 Manajemen Perubahan	4	2,77
	2 Penataan Tatalaksana	3,5	3,50
	3 Penataan Sistem manajemen SDM	5	4,18
	4 Penguatan Akuntabilitas	5	4,11
	5 Penguatan Pengawasan	7,5	5,75
	6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	4,05
	B Aspek <i>Reform</i>	30	24,79
	1 Manajemen Perubahan	4	3,33
	2 Penataan Tatalaksana	3,5	3,00
	3 Penataan Sistem manajemen SDM	5	2,93
	4 Penguatan Akuntabilitas	5	4,28
	5 Penguatan Pengawasan	7,5	6,25
	6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	5
II	<u>KOMPONEN HASIL</u>	40	32,84
	1 Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,5	15,83
	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17,5	14,58
	b. Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5	1,25
	2 Pelayanan Publik yang Prima	17,5	17,01
	Nilai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey eksternal)	17,5	17,01
TOTAL NILAI		100	82,00

Dengan target kinerja pada tahun 2024 sebesar 80 maka capaian target kinerja Implementasi WBK Satker sebesar 102,50%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi Kinerja implementasi WBK satker Tahun 2024 bisa didapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.35
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2024

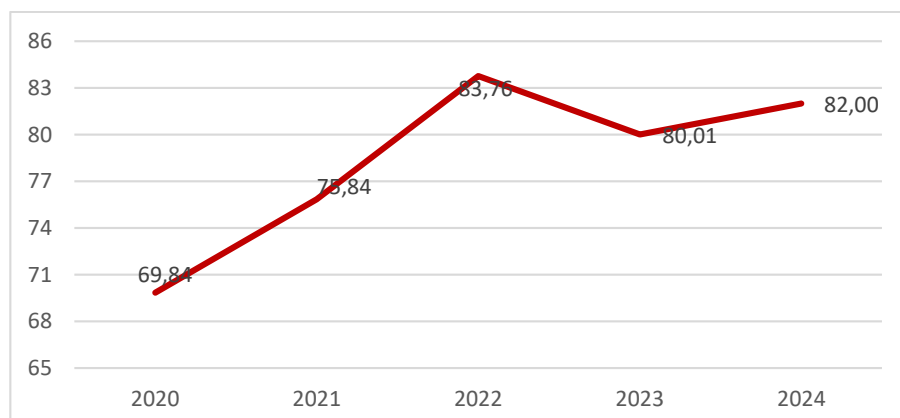


Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa target Kinerja implementasi WBK satker sebesar 80 telah tercapai dengan nilai realisasi Kinerja implementasi WBK satker Tahun 2024 sebesar 82,00 atau sebesar 102,6% dari target.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir (Tahun 2020 s.d. Tahun 2024)

Perbandingan capaian Kinerja implementasi WBK satker dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 bisa di dapat dilihat pada grafik berikut ini:

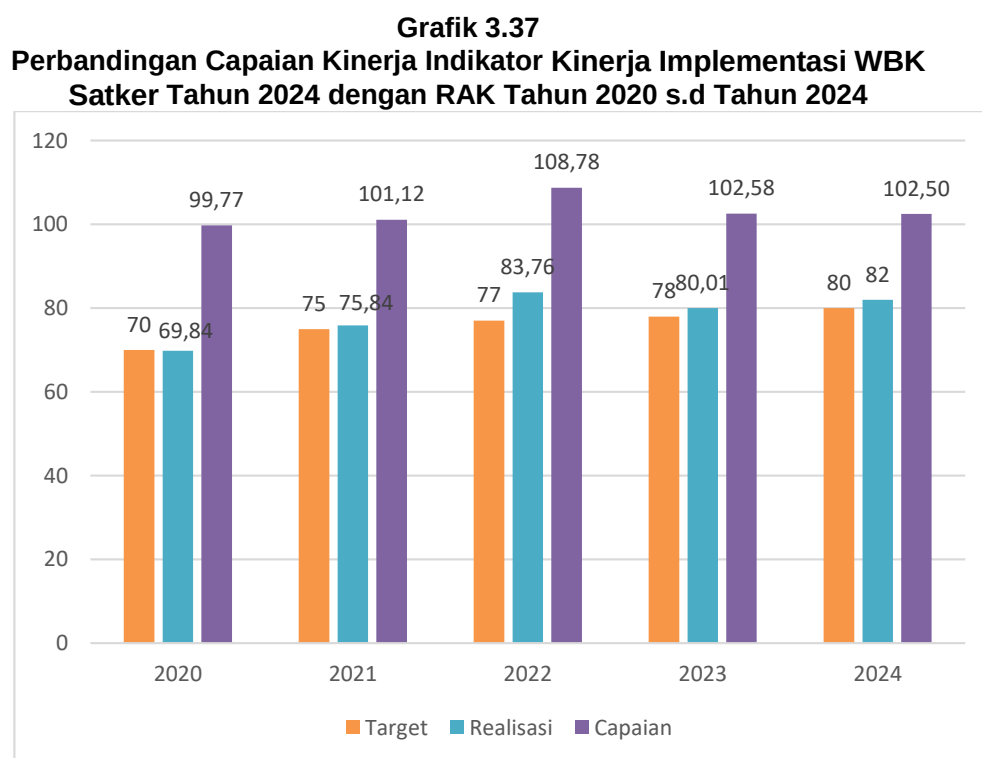
Grafik 3.36
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2020 s.d Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Kinerja implementasi WBK satker pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023. Capaian Kinerja Implementasi WBK tahun 2024 sebesar 82,00 dengan capaian 102,6%. Capaian indikator 6 tahun 2024 ini merupakan hasil Assessment dari Tim Penilai Internal bagian Hukum, Organisasi dan Masyarakat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2020 s.d. Tahun 2024)

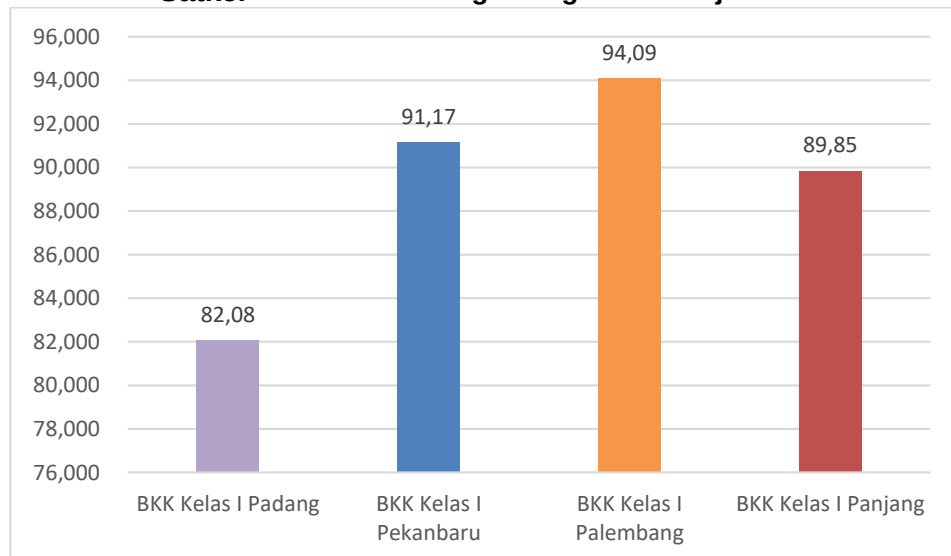
Perbandingan capaian realisasi Kinerja implementasi WBK satker Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2020 s.d. Tahun 2024) bisa di dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi Kinerja implementasi WBK satker BKK Kelas I Padang sejak tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga diharapkan kedepannya untuk terus meningkatkan capaian sehingga bisa memenuhi target jangka menengah pada RAK 2020-2024.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Organisasi Setara/ sejenis

Grafik 3.38
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Implementasi WBK
Satker Tahun 2024 Dengan Organisasi Sejenis



Perbandingan dengan organisasi setara atau sejenis yaitu dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan yang berda pada Kelas I. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Kinerja implementasi WBK satker BKK Kelas I Padang sebesar 82,00% paling rendah dibandingkan dengan BKK sejenis sehingga diharapkan pada tahun sebelumnya nilai akan lebih baik.

5. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

- Menyusun rencana dan agenda kerja;
- Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
- Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
- Melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang

6. Analisa Penyebab Keberhasilan Capaian Indikator

- Adanya peran aktif Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang selaku Duta Prestasi dalam membangun budaya anti korupsi.
- Hasil penilaian kinerja implementasi WBK satker pada umumnya diatas 70 hanya pada pokja Penguatan Pengawasan masih di bawah 70.
- Komitmen bersama seluruh level organisasi dari pimpinan hingga staf untuk implementasi WBK secara konsisten dan bertanggungjawab.
- Konsisten dalam pelaksanaan Survey Eksternal terkait Nilai Survey Persepsi Korupsi dan Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan.
- Telah terdapat Penyuluh Anti Korupsi dalam rangka membangun karakter berintegritas dan budaya anti korupsi di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang.

7. Kendala / Masalah yang Dihadapi

- Koordinasi dengan pihak Lintas Sektor masih lemah.
- Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan kegiatan Tim WBK BKK Kelas I Padang sehingga belum bisa menyampaikan laporan kegiatan dalam tepat waktu.
- Agent of Change (AoC) belum bisa berperan seperti yang diharapkan sehingga perubahan yang diinginkan belum terlaksana dengan baik.
- Kurangnya semangat Tim dalam pengelolaan administrasi WBK.

8. Pemecahan Masalah

- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dengan cara mengadakan pertemuan dan sosialisasi
- Meningkatkan koordinasi antar Tim WBK dengan mengaktifkan Tim pendukung seperti Tim Unit Pengendali Gratifikasi, Tim Benturan Kepentingan, Tim SOP-SP, Tim SIPIT dan lainnya.
- Mengikutsertakan Agent of Change (AoC) dalam kegiatan pendukung seperti terlibat dalam Pangkalan SBH Krida Pengendalian Penyakit Ditjen P2P.
- Melaksanakan penguatan kapasitas Tim WBK secara berkesinambungan baik dalam bentuk Workshop, Outbond dan lainnya.

9. Analisa Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi digunakan sebagai bentuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi satuan kerja yang dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi yaitu capaian RO, pagu dalam DIPA terakhir dan realisasi anggaran dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :
E = Efisiensi
NE = Nilai Efisiensi
PAK = Pagu Alokasi
RAK = Realisasi Anggaran
CK = Capaian Kinerja

Sehingga dengan rumus tersebut efisiensi pada indikator 5 dapat dilihat sebagai berikut :

$$8,30\% = \frac{((131.699.000 \times 1,02) - 123.184.946)}{(131.699.000 \times 1,02)} \times 100\%$$

$$70,75\% = (50\% + \left(\frac{8,30}{20} \times 50\right))$$

Berdasarkan nilai di atas terlihat bahwa efisiensi pada indikator 6 sebesar 8,30% yang artinya nilai tersebut efisien karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan realisasi anggaran. Realisasi anggaran pada Indikator 6 sebesar Rp.123.184.946,- dari pagu anggaran sebesar Rp.131.699.000,- atau sebesar 93,54% dari pagu anggaran sedangkan capaian kinerja pada indikator 6 sebesar 102,6. Nilai ini dinilai efisien karena masih berada pada range -20 sampai dengan 20.

INDIKATOR KETUJUH

Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

Peningkatan Kapasitas ASN merupakan pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional. Pengembangan kompetensi pegawai dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan klasikal yaitu tatap muka di kelas, dan pelatihan non klasikal yaitu praktik kerja/pembelajaran luar kelas. *Outcome* indikator ini yaitu meningkatnya kapasitas ASN BKK Kelas I Padang untuk mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik.

1. Definisi Operasional

ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, pertemuan sosialisasi/seminar, workshop, magang dan kegiatan peningkatan SDM lainnya.

2. Rumus/ Cara Perhitungan

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%

$$\frac{\sum \text{ASN yang ditingkatkan Kapasitas}}{\sum \text{Target Indikator 7}} \times 100\%$$

3. Capaian Indikator

Capaian kinerja Presentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang Tahun 2024 sebagai berikut:

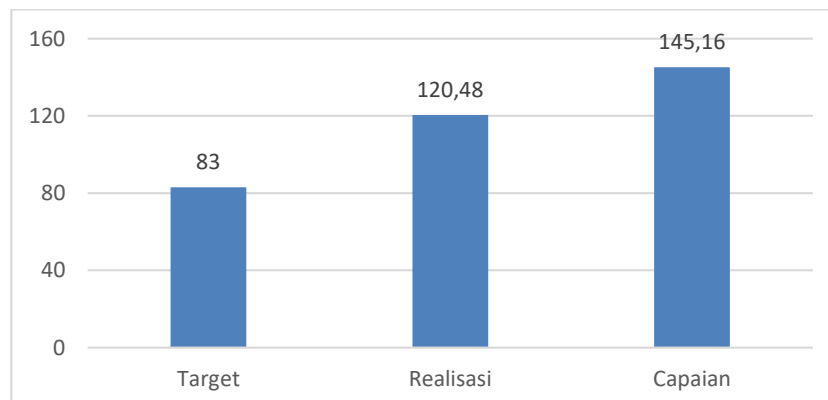
Tabel. 3.19
Capaian Kinerja Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Tahun 2024

Sasaran Program / kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL	83% (59 orang)	120,48% (71 orang)	145,16%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2024 bisa didapat dilihat pada grafik berikut ini:

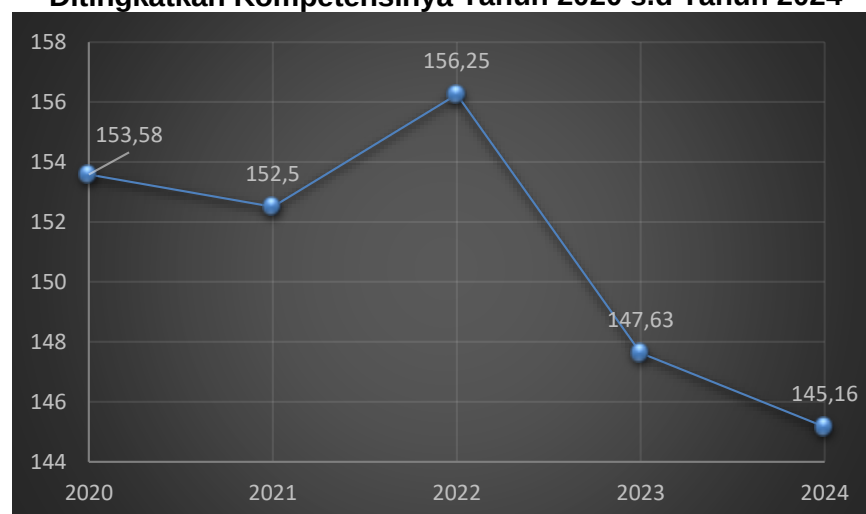
Grafik 3.39
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2024



Dari grafik diatas dapat disimpulkan dari target yang di tetapkan bahwa 83% dari jumlah ASN BKK Kelas I Padang (59 orang) yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam kurun waktu 1 tahun dapat terealisasi sebanyak 120.48% (71 orang).

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir (Tahun 2020 s.d. Tahun 2024)

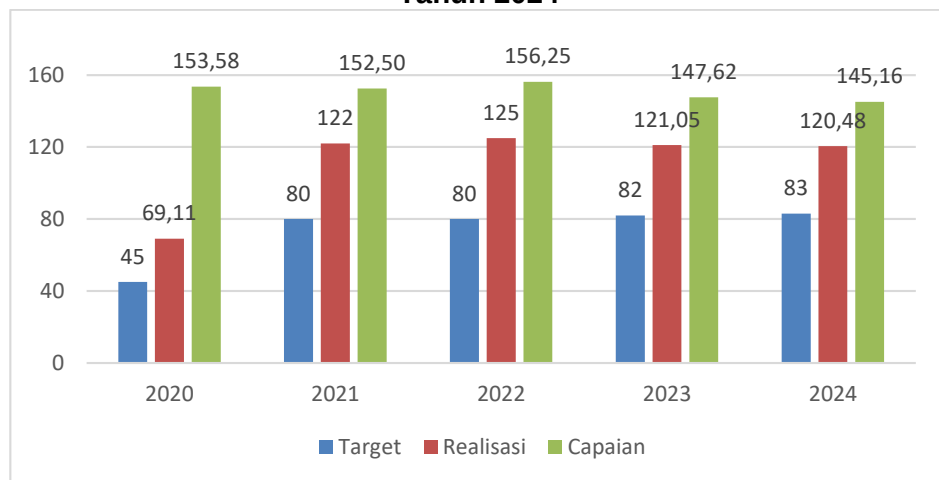
Grafik 3.40
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase ASN yang
Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2020 s.d Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Kinerja Presentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL pada tahun 2024 telah mencapai target namun lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

- C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2020 s.d. Tahun 2024)

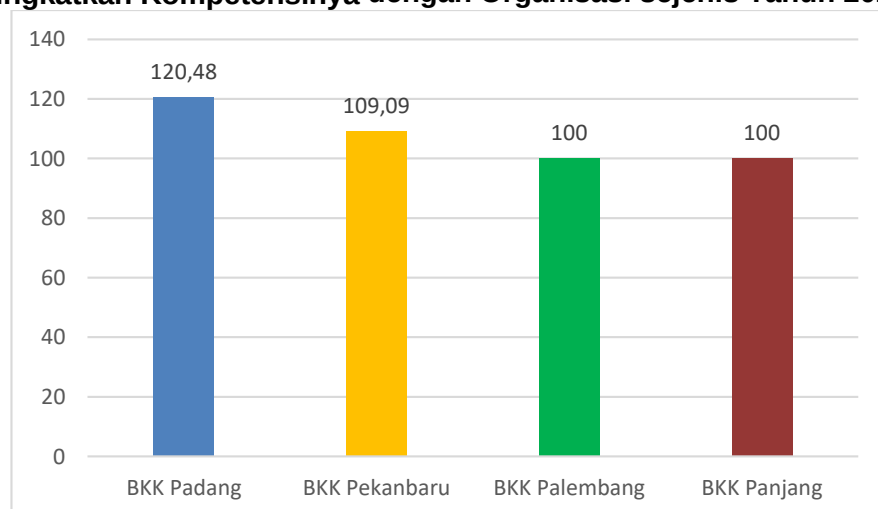
Grafik 3.41
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2024 dengan RAK Tahun 2020 s.d Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator 7 pada tahun 2020 hingga tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

- D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Organisasi Setara/ sejenis

Grafik 3.42
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya dengan Organisasi sejenis Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Kinerja Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2024 BKK Kelas I Padang sebesar 120,48% yaitu lebih tinggi dibandingkan dengan organisasi sejenis yaitu BKK yang berada pada Kelas I yaitu BKK Kelas I Pekanbaru dan BKK Kelas I Palembang dan BKK Kelas I Panjang.

4. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator 7 yaitu dengan beberapa hal berikut :

- Memberikan informasi mengenai pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jabatan fungsional pegawai di BKK Kelas I Padang.
- Melakukan monitoring secara periodik atas capaian peningkatan kapasitas ASN minimal 20 JP.

5. Analisa penyebab peningkatan/ penurunan Capaian Kinerja

Membuka peluang untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing baik melalui tugas belajar maupun izin belajar serta memberikan informasi mengenai peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan baik secara daring maupun tatap muka. Memberikan *reminder* kepada pegawai yang belum memenuhi peningkatan kapasitas minimal 20 JP setiap bulannya.

6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

- Kesulitan dalam mencari pelatihan yang sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- Terdapat pelatihan yang sudah dianggarkan untuk dilakukan secara tatap muka tetapi masih dilakukan secara daring sehingga realisasi anggaran tidak dapat dilaksanakan.
- Pegawai tidak segera melaporkan peningkatan kapasitasnya sehingga menghambat kegiatan monitoring dan evaluasi.

7. Pemecahan Masalah

- Mencari secara aktif badan atau lembaga pelatihan, diklat, bimbingan teknis serta workshop yang bisa meningkatkan Kapasitas ASN

- Membuat *reminder* setiap bulan kepada seluruh pegawai untuk mengumpulkan hasil peningkatan kapasitas dan untuk melakukan kegiatan peningkatan kapasitas.

8. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi digunakan sebagai bentuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi satuan kerja yang dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi yaitu capaian RO, pagu dalam DIPA terakhir dan realisasi anggaran dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :
 E = Efisiensi
 NE = Nilai Efisiensi
 PAK = Pagu Alokasi
 RAK = Realisasi Anggaran
 CK = Capaian Kinerja

Sehingga dengan rumus tersebut efisiensi pada indikator 7 dapat dilihat sebagai berikut :

$$31,04\% = \frac{((274.784.000 \times 1,45) - 274.778.094)}{(274.784.000 \times 1,45)} \times 100\%$$

$$127,6\% = (50\% + \left(\frac{31,04}{20} \times 50\right))$$

Berdasarkan nilai di atas terlihat bahwa efisiensi pada indikator 7 sebesar 31,04%. Realisasi anggaran pada Indikator ini sebesar Rp.274.778.094,- dari pagu anggaran sebesar Rp.274.784.000,- atau sebesar 99,99% dari pagu anggaran sedangkan capaian kinerja pada indikator 7 sebesar 145,16%. Berdasarkan hal tersebut indikator 7 dinilai efisien karena terdapat pelatihan yang dilakukan oleh pegawai secara daring maupun *blended learning* sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator tersebut sebesar 31,04%.

INDIKATOR KEDELAPAN

Persentase Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir. Penyerapan anggaran merupakan salah satu variable dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran yang terdiri dari capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian output program atau capaian rincian output (RO).

1. Definisi Operasional

Jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian output program atau capaian rincian output (RO) dibagi dengan Alokasi Anggaran terakhir dikali 100%.

2. Rumus/Cara Perhitungan

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan menggunakan rumus berikut :

$$\frac{\sum \text{Realisasi Anggaran}}{\sum \text{Alokasi Anggaran}} \times 100\%$$

3. Capaian Indikator

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksana APBN. Realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian output program atau capaian rincian output (RO) yang memastikan kegiatan dapat terlaksana. Realisasi anggaran diharapkan bisa berjalan seiring dengan rencana kegiatan sehingga realisasi anggaran akan maksimal.

Data realisasi anggaran bersumber dari dokumen pencairan anggaran yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Data realisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dapat dilihat pada OM-SPAN yang tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20
Nilai Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
BKK Kelas I Padang Tahun 2024

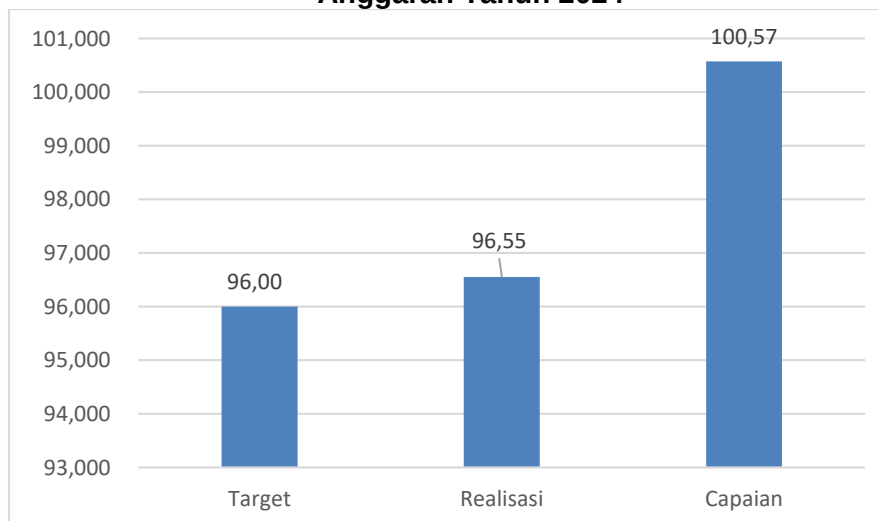
No.	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Belanja Pegawai	10,134,760,000	9,814,194,420	96,84%
2	Belanja Bahan	6,191,935,000	5,844,669,562	94,39%
3	Belanja Modal	4,186,101,000	4,146,606,676	99,06%
Total		20,512,796,000	20,512,796,000	19,805,470,658

Berdasarkan tabel realisasi belanja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang di atas terlihat bahwa realisasi anggaran pada Tahun 2024 sebesar 96,55% dimana seluruh jenis belanja telah terealisasi di atas 90% dengan realisasi tertinggi pada belanja modal yaitu 99,06%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2024 bisa di dapat dilihat pada grafik berikut ini:

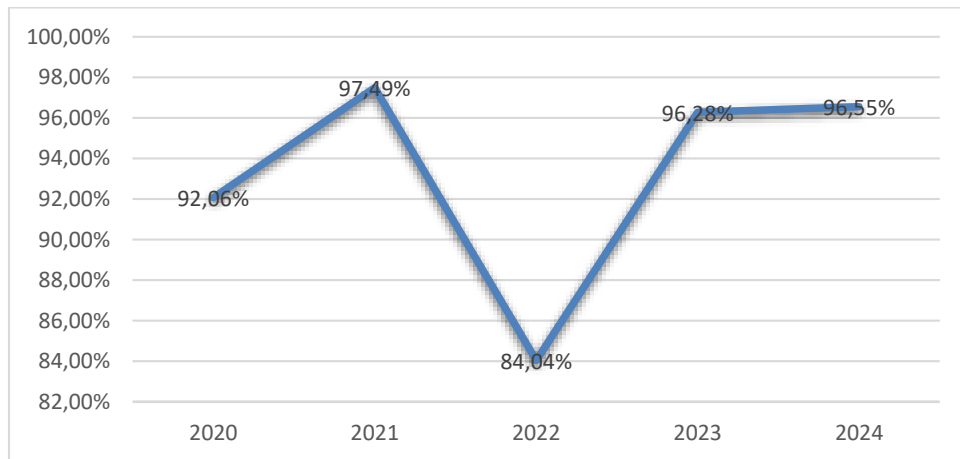
Grafik 3.43
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Realisasi
Anggaran Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa target Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebesar 96% telah tercapai yaitu sebesar 96,55% atau sebesar 100,57% dari target.

- B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir (Tahun 2020 s.d. Tahun 2024)

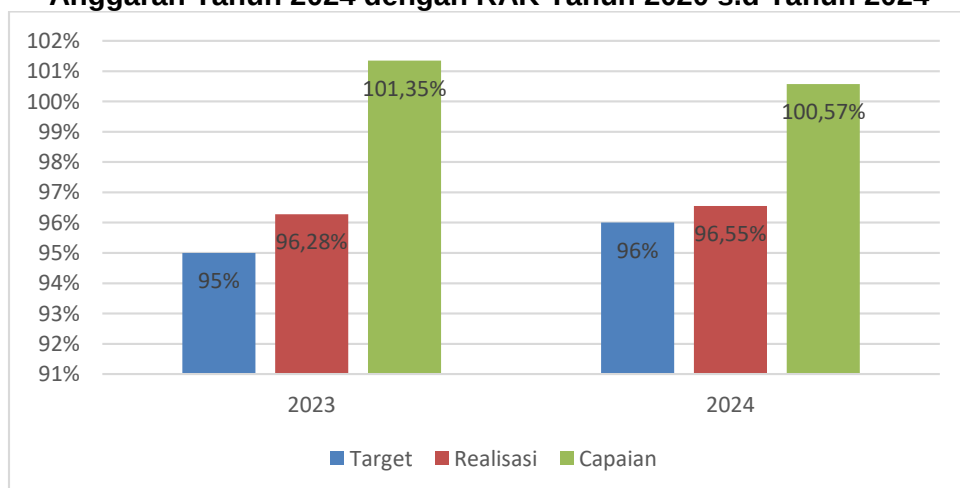
Grafik 3.44
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2020 s.d Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Realisasi Anggaran terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 84,04% dan realisasi anggaran pada dua tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan kenaikan relaisasi dari tahun 2023 dari 96,28% menjadi 96,55% pada tahun 2024.

- C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2020 s.d. Tahun 2024)

Grafik 3.45
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan RAK Tahun 2020 s.d Tahun 2024

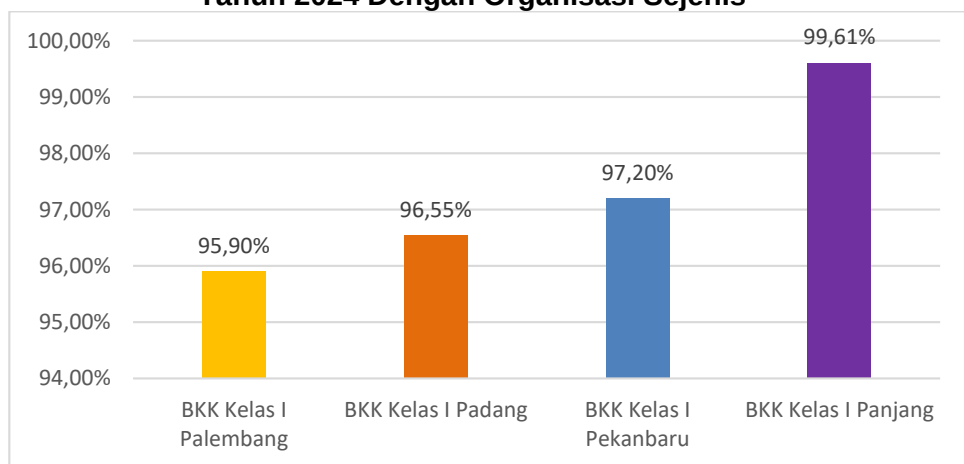


Pada tahun 2023 terdapat penambahan indikator pada Perjanjian Kinerja Kepala yang merupakan penugasan direktif dari Menteri Kesehatan yang

diturunkan menjadi indikator kinerja pimpinan tinggi pratama dan pimpinan satuan kerja pada masing-masing unit utama dan salah satunya yaitu indikator Persentase Realisasi anggaran. Sehingga indikator kedelapan dimulai sejak tahun 2023. Realisasi anggaran pada tahun 2023 dan 2024 telah memenuhi target yang ditentukan.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Organisasi Setara/Sejenis

Grafik 3.46
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Realisasi Anggaran
Tahun 2024 Dengan Organisasi Sejenis



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Padang pada Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan organisasi sejenis atau BKK yang berada pada Kelas I yaitu BKK Kelas I Pekanbaru dan BKK Kelas I Panjang namun lebih tinggi dibandingkan BKK Kelas I Palembang. Sehingga kedepannya diharapkan BKK Kelas I Padang dapat memaksimalkan realisasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

4. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

Upaya yang dilakukan BKK Kelas I Padang dalam mencapai target Persentase Realisasi Anggaran adalah :

- Membuat rencana penarikan dana sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan revisi anggaran III DIPA jika terdapat kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.
- Melakukan Revisi POK saat membutuhkan revisi pemaksimalan realisasi anggaran di luar jadwal Revisi Hlm III DIPA.

- Mempercepat proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
- Akselerasi realisasi anggaran setelah sebelumnya pagu anggaran perjalanan dinas di-lock pada semester I.

5. Analisa Penyebab Kegagalan Indikator

Capaian indikator 8 pada Tahun 2024 telah mencapai target yang ditentukan dengan capaian sebesar 100,57% dimana hal ini terjadi karena realisasi anggaran dilakukan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang dibuat, melakukan optimalisasi anggaran belanja modal, melakukan akselerasi realisasi anggaran serta melaksanakan administrasi RPATA untuk pembayaran pembangunan gedung kantor Wilker Bungus yang masih belum selesai sampai akhir periode 2024.

6. Kendala/ Permasalahan

- Realisasi anggaran perbulannya tidak sesuai dengan rencana penarikan dana.
- Terdapat arahan blokir perjalanan dinas sebesar 50% pada triwulan IV yang menyebabkan realisasi terhambat.
- Kelebihan dana perjalanan dinas atas dampak arahan blokir perjalanan dinas 50%.
- Pembangunan gedung kantor Wilker Bungus tidak selesai pada akhir periode.
- Kelebihan dana pada belanja pegawai dikarenakan terdapat satu orang pegawai yang mutasi ke satker lain.

7. Pemecahan Masalah

Adapun pemecahan masalah yang telah dilakukan terkait Indikator Nilai IKPA selama tahun 2024 adalah:

- Melaksanakan realisasi anggaran sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah dibuat sebelumnya.
- Melaksanakan akselerasi realisasi anggaran setelah distribusi pagu blokir diumumkan oleh Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Melaksanakan revisi halaman III DIPA untuk memperbaiki RPD dan menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan satker.
- Melaksanakan revisi POK untuk melaksanakan revisi kegiatan sesuai dengan yang dibutuhkan di luar jadwal Revisi Hlm III DIPA.

8. Analisa Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi digunakan sebagai bentuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi satuan kerja yang dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi yaitu capaian RO, pagu dalam DIPA terakhir dan realisasi anggaran dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan : E = Efisiensi
NE = Nilai Efisiensi
PAK = Pagu Alokasi
RAK = Realisasi Anggaran
CK = Capaian Kinerja

Sehingga dengan rumus tersebut efisiensi pada indikator 8 dapat dilihat sebagai berikut :

$$10,23\% = \frac{((20.512.796.000 \times 1,07) - 19.805.470.658)}{(20.512.796.000.000 \times 1,07)}$$

$$75,57\% = (50\% + \left(\frac{10,23}{20} \times 50\right))$$

Berdasarkan nilai di atas terlihat bahwa efisiensi pada indikator delapan sebesar 10,23% yang masih berada pada range -20 sampai dengan 20 yang artinya indikator kedelapan dinilai efisien karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan realisasi anggaran. Realisasi anggaran BKK Kelas I Padang tahun 2024 sebesar Rp.19.805.470.658,- atau sebesar 96,55% dari pagu anggaran sedangkan capaian kinerja pada seluruh indikator sebesar 107,54%. Sehingga kinerja anggaran pada tahun 2024 dinilai efisien.

C. REALISASI ANGGARAN

1. Anggaran Pengeluaran

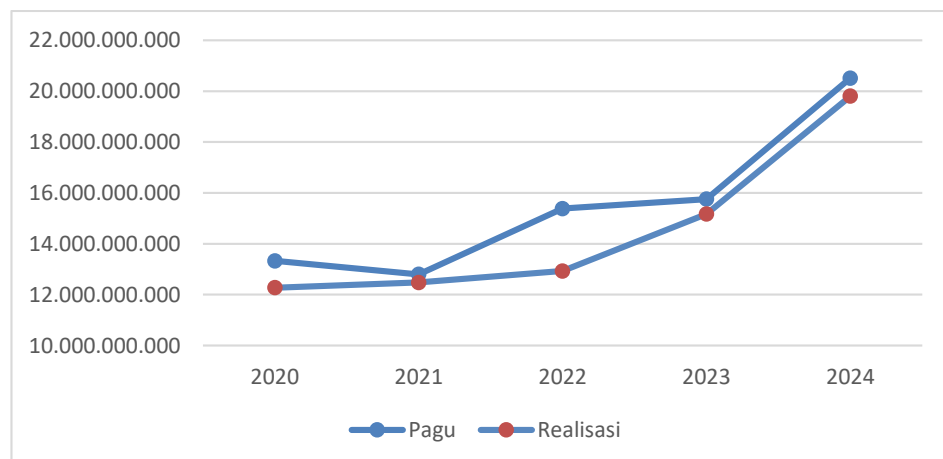
Pagu BKK Kelas I Padang Tahun 2024 senilai Rp.20.512.796.000,- dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp.19.805.470.658,- atau sebesar 96,55% dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.21
Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

MAK	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian
51	Pegawai	Rp. 10,134,760,000	Rp. 9,814,194,420	96,84%
52	Barang	Rp. 6,191,935,000	Rp. 5,844,669,562	94,39%
53	Modal	Rp. 4,186,101,000	Rp. 4,146,606,676	99,06%
Jumlah		Rp.20.512.796.000	Rp. 20.512.796.000	96,55%

Realisasi belanja pegawai BKK Kelas I Padang tahun 2024 sebesar Rp.9.814.194.420,- atau 96,84%. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan. Realisasi belanja barang sebesar Rp.5.844.669.562,- atau 94,39% digunakan untuk membiayai layanan perkantoran dan kegiatan-kegiatan dari seksi/ bagian untuk pencapaian indikator kerja. Realisasi belanja modal sebesar Rp.4.146.606.676,- atau sebesar 99,06% yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan, prasarana pengawasan vektor, alat bahan sanitasi lingkungan dan pembangunan gedung kantor Wilker Bungus. Selanjutnya sebagai gambaran anggaran pengeluaran BKK Kelas I Padang Tahun 2020 s/d Tahun Tahun 2024 dapat dilihat dari grafik berikut :

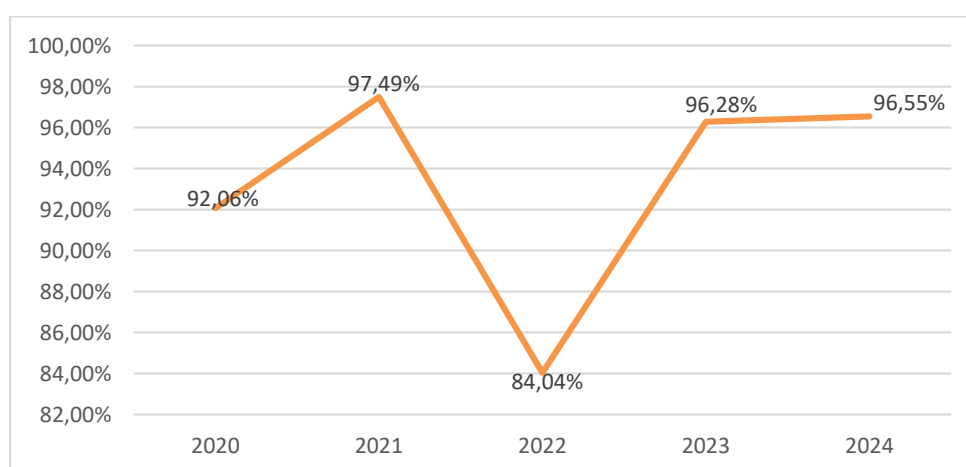
Grafik 3.47
Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2020-2024



Dari grafik di atas dapat terlihat adanya fluktuasi pada pagu dan realisasi anggaran dalam lima tahun terakhir. Terlihat pagu pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp.15.755.643.000,- menjadi Rp.20.512.796.000,- dan hal ini disertai juga dengan kenaikan realisasi dibandingkan tahun 2023. Hingga tahun 2024 telah dilakukan revisi sebanyak 9 (sembilan) kali.

Realisasi anggaran secara persentase pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.48
Persentase Realisasi Anggaran tahun 2020-2024



Dari grafik tersebut terlihat bahwa Persentase Anggaran selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan realisasi sampai dengan tahun 2024 berada di 96,55%.

2. Realisasi Anggaran Per Masing-Masing Indikator

Realisasi anggaran pada masing-masing indikator BKK Kelas I Padang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja
Tahun 2024

No	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Indeks deteksi faktor risiko di bandara / pelabuhan / PLBDN	2,685,268,000	2,667,159,344	99,33
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	119,058,000	117,294,008	98,52

No	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	764,770,000	738,128,295	96,52
4	Nilai kinerja anggaran	158,419,000	158,377,972	99,97
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	16,391,230,000	15,742,311,687	96,04
6	Kinerja implementasi WBK satker	131,699,000	123,184,946	93,54
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	262,353,000	262,348,094	100,00
8	Persentase Realisasi Anggaran	20,512,796,000	19,805,470,658	96,55

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa persentase realisasi pada setiap indikator telah berada di bawah 90% dengan nilai terendah pada indikator keenam yaitu sebesar 93,54% sehingga persentase realisasi anggaran secara keseluruhan menjadi 96,55% sesuai dengan indikator kedelapan.

3. Realisasi Anggaran Per Rincian Output

Terdapat dua kegiatan pada pagu anggaran BKK Kelas I Padang yaitu Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara Wilayah dengan pagu sebesar Rp.3.788.496.000,- dan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan pagu Rp.16.724.300.000,-. Secara rata-rata realisasi pada setiap RO pada BKK Kelas I Padang sebesar 95,21% yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Output Tahun 2024

No.	Kode	Rincian Output	Tahun 2022		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	3,788,496,000	3,741,981,647	98.77%
2	PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	147,596,000	130,770,359	88.60%
3	QAA.011	Pelayanan Kesehatan Haji	618,704,000	611,369,205	98.81%
4	QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	29,620,000	25,252,656	85.26%
5	QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang Alat Angkut	54,300,000	49,497,000	91.15%

No.	Kode	Rincian Output	Tahun 2022		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
7	QAH.U01	Layanan Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan Penyeberangan	178,200,000	178,190,000	99.99%
8	QAH.U04	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	233,250,000	233,245,500	100.00%
9	QAH.U07	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	33,712,000	32,808,588	97.32%
10	QAH.U08	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit PES	158,200,000	157,931,300	99.83%
11	QAH.U09	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	15,328,000	15,163,000	98.92%
12	QAH.U10	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Malaria	5,436,000	5,436,000	100.00%
13	QAH.U11	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	86,400,000	84,312,200	97.58%
14	QAH.U12	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	68,800,000	68,456,600	99.50%
15	QAH.U13	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	13,680,000	13,679,400	100.00%
16	QAH.U14	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS	32,850,000	32,609,500	99.27%
17	QAH.U15	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	43,640,000	43,568,430	99.84%
18	QAH.U19	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan	59,400,000	59,400,000	100.00%
19	QAH.U21	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria Kategori 2	8,080,000	8,004,000	99.06%
20	QAH.U22	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD kategori II	2,880,000	2,878,700	99.95%
21	RAB.001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	1,766,588,000	1,757,579,209	99.49%
22	TBC.001	Pelatihan Kesehatan	231,832,000	231,830,000	100.00%
1	2	3	4	5	6
23	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	16,724,300,000	16,066,822,699	96.07%
24	AEA.501	Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor Perencanaan Program	33,600,000	33,048,334	98.36%
25	AEA.502	Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	17,118,000	17,115,000	99.98%
26	AEA.504	Koordinasi lintas program lintas sektor hukum dan organisasi	8,216,000	8,160,929	99.33%
28	EBA.956	Layanan BMN	56,667,000	56,653,423	99.98%
29	EBA.957	Layanan Hukum	69,974,000	69,853,800	99.83%
30	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	104,777,000	103,784,903	99.05%
31	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	61,725,000	53,331,146	86.40%
32	EBA.962	Layanan Umum	169,889,000	148,795,389	87.58%
33	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	150,000	150,000	100.00%
34	EBA.994	Layanan Perkantoran	12,947,099,000	12,456,214,141	96.21%

No.	Kode	Rincian Output	Tahun 2022		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
35	EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2,713,251,000	2,677,011,176	98.66%
36	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	161,034,000	161,030,296	100.00%
37	EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	42,952,000	42,948,094	99.99%
38	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100,944,000	100,924,602	99.98%
39	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	57,325,000	57,303,370	99.96%
40	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	156,581,000	66,603,786	42.54%
41	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	22,998,000	13,894,310	60.42%

Berdasarkan tabel di atas terdapat realisasi anggaran pada RO yang berada di bawah 90% yaitu sebagai berikut:

- Realisasi RO PEA.001 Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dengan persentase realisasi sebesar 88,60%, hal ini dikarenakan ada blokir anggaran melalui sistem *self blocking*.
- Realisasi RO QAH.016 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan dengan persentase realisasi sebesar 85,26%, hal ini dikarenakan telah dianggarkan kegiatan upaya penyehatan air untuk 3 wilker yaitu Wilker Teluk Bayur, Wilker Muara dan Wilker Bandara Internasional Minangkabau (BIM) namun hanya dilaksanakan pada 2 wilker karena Wilker BIM berada di luar area perimeter dan buffer BKK Kelas I Padang. Selain itu pada bulan Oktober dan Desember 2024 terdapat subsidi dari Pemprov Sumbar untuk biaya pemeriksaan depot air minum sehingga tidak terealisasi secara maksimal.
- Realisasi RO EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal dengan persentase 86,40%, hal ini bersumber dari sisa pembelian bahan dari kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK.
- Realisasi EBA.962 Layanan Umum dengan persentase 87,58%, hal ini dikarenakan terdapat sisa anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan Rencana Umum Pengadaan.
- Realisasi RO EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan dengan persentase realisasi sebesar 42,54% hal ini dikarenakan ada blokir anggaran melalui sistem *self blocking* untuk kegiatan perjalanan dinas.
- Realisasi RO EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dengan persentase realisasi sebesar 60,42%, hal ini dikarenakan terdapat sisa anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan Verifikasi Teknis Persuratan dan Kearsipan Wilker.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sumber penerimaan BKK Kelas I Padang antara lain berasal dari buku ICV, vaksinasi, penerbitan dokumen, pemeriksaan pasien, pelayanan ambulans dan penerbitan sertifikat. Pada tahun 2024, ditargetkan penerimaan PNBP sebesar Rp. 430.965.000,-. Uraianya dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel 3.24
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024

No	Jenis Tarif	Akun	Vol	Realisasi
Fungsional (A)				
1	Jasa Pemeriksaan Kapal dalam Karantina (COP)	425314	319	Rp.75.070.000
2	Jasa Pengawasan Tindakan Sanitasi Kapal (SSCC / SSCEC)	425314	240	Rp. 73.600.000
3	Penerbitan Buku Kesehatan Kapal (Health Book)	425314	146	Rp. 18.365.000
4	Jasa Pemeriksaan Kesehatan Keberangkatan Kapal (PHQC)	425314	4.615	Rp.210.365.000
5	Jasa Pemeriksaan obat-obatan dan alat kesehatan dalam rangka penerbitan sertifikat	425314	191	Rp. 2.705.000
6	Jasa Pelayanan Kesehatan			
	- Jasa Pemeriksaan/ Pengobatan	425313	5.458	Rp.109.160.000
	- Buku ICV	425315	22.800	Rp.570.000.000
	- Yellow Fever	425315	36	Rp.10.800.000
	- Surat Keterangan Medical Contraindication of Vaccination	425315	4	Rp.20.000
	- Vaksinasi Meningitis	425315	5.048	Rp.1.312.480.000
	- Vaksinasi Influenza	425315	37	Rp.7.585.000
	- Jasa Pemakaian Ambulan	425313	319	Rp.2.765.000
7	Jasa Pemeriksaan OMKABA Kapal	425313	20	Rp.20.000.000
8	Jasa Pemeriksaan/Pengawasan Penerbitan Sertifikat Kualitas Air	425313	500	Rp.25.000.000
Fungsional (B)				
1	Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	0	Rp. 45.000.000
Total Realisasi PNBP Fungsional (A)				Rp.2.435.515.000
Total Realisasi PNBP Umum (B)				Rp. 45.000.000
Total Realisasi (A + B)				Rp.2.480.000.000

Dari tabel diatas terlihat bahwa penerimaan PNBP terbanyak Vaksinasi Meningitis sejumlah Rp.1.312.480.000,- sementara itu realisasi penerimaan PNBP terendah dari Jasa Pemberian Surat Keterangan *Medical Contraindication of Vaccination* yaitu sebesar Rp.20.000,-.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Kegiatan yang dilaksanakan juga merupakan upaya dalam mencapai tujuan yaitu meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BKK Kelas I Padang tahun 2024 telah mencapai target yang ditentukan dengan rata-rata capaian sebesar 107,54% lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 106,52%. Capaian kinerja per indikator yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Indikator indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan / bandara/ PLBDN dengan capaian 101,04% dimana realisasi sebesar 0,97 dari target 0,96.
2. Indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan capaian 100% dimana realisasi sebesar 100% dari target 100%.
3. Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dengan capaian 105,26% dimana realisasi sebesar 1 dari target 0,95.
4. Indikator nilai kinerja anggaran dengan capaian 104,75% dimana realisasi sebesar 91,13 dari target 87.
5. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan capaian 101,02% dimana realisasi sebesar 93,95 dari target 93.
6. Indikator nilai kinerja implementasi WBK satker dengan capaian 101,02% dimana realisasi sebesar 80,01 dari target 82,00.
7. Indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan capaian 145,16% dimana realisasi sebesar 120,48% dari target 83%.

8. Presentase realisasi anggaran dengan capaian 100,57% dimana realisasi sebanyak 96,55% dari target 96%.

Kinerja keuangan pada tahun 2024, data per 31 Desember 2024 berdasarkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), realisasi anggaran semua jenis belanja mencapai 96,55% atau sebesar Rp.19,805,470,658,- dari total pagu sebesar Rp.20,512,796,000,- lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 96,28% dengan pagu sebesar Rp.15.755.643.000,-.

Dalam proses mencapai target indikator kinerja kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang tentunya menghadapi berbagai permasalahan. Namun demikian BKK Kelas I Padang terus berusaha meningkatkan kinerja baik secara internal dengan memadukan kekuatan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran, maupun secara eksternal dengan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi lintas program dan sektor terkait. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan di tahun 2024 diantaranya:

1. Komitmen kepala, tim kerja dan seluruh pegawai BKK Kelas I Padang untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan.
2. Peningkatan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan lintas sektor dan lintas program.
3. Penguatan jejaring kemitraan dan koordinasi dengan instansi di wilayah pelabuhan dan bandara untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan kekarantinaan kesehatan.
4. Penguatan Reformasi Birokrasi Internal di lingkungan BKK Kelas I Padang .
5. Peningkatan dan penguatan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala secara berjenjang di lingkungan BKK Kelas I Padang.
6. Melakukan akselerasi realisasi anggaran demi percepatan realisasi kegiatan melalui revisi baik revisi halaman III DIPA maupun revisi POK.
7. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM sesuai dengan jabatan masing-masing
8. Penguatan dan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi berbasis online, untuk mempercepat update informasi dan pengelolaan program.
9. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam rangka mendorong meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Seluruh target indikator kinerja kegiatan BKK Kelas I Padang telah tercapai dengan rata-rata capaian sebesar 107,54% namun masih terdapat masalah yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin meningitis untuk perjalanan umroh sehingga banyak terjadi risiko yaitu adanya vaksin palsu yang diterbitkan atas nama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang.
2. Lambatnya pelaporan informasi dari fasyankes di wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dalam menyampaikan informasi penyakit sehingga memperlambat dalam respon penyakit atau keterlambatan identifikasi sinyal.
3. Masih adanya TPP yang belum dilaksanakan pelaksanaan *labelling* dan SLHS yang menghambat untuk pelaksanaan target Pelabuhan dan Bandara Sehat.
4. Deviasi halaman III DIPA masih rendah dikarenakan pelaksanaan rencana penarikan dana tidak sesuai dengan perencanaan yang dibuat.
5. Aplikasi monev kemenkeu yang mengalami perubahan cara perhitungan dan *update* aplikasi yang menyebabkan monitoring dan evaluasi terhambat.
6. Komitmen para pengelola kegiatan dalam pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan belum kompak dalam meningkatkan pencapaian kinerja.
7. Masih jauhnya target nilai WBK untuk mewujudkan BKK Kelas I Padang meraih WBK Kementerian Kesehatan dan WBK Nasional.

Terkait dengan masalah yang terjadi pada tahun 2024, maka rencana tindak lanjut perbaikan pada yang akan datang agar bisa memaksimalkan capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan promosi pelayanan kesehatan baik secara langsung maupun melalui sosial media akan pentingnya vaksin meningitis sehingga bisa menekan risiko terbitan ICV palsu dan vaksin palsu yang diterbitkan atas nama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang disamping itu membangun koordinasi maskapai, agensi, klinik, petugas keamanan dan penegak hukum terkait dalam penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan.
2. Memperkuat koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program baik melalui advokasi, sosialisasi kegiatan dan membangun komitmen bersama-sama dalam melaksanakan cegah tangkal penyakit melalui pintu masuk negara

sehingga mempercepat dalam pelaporan dan informasi penyakit dalam respon penyakit atau identifikasi sinyal.

3. Mendorong pembentukan forum pelabuhan/bandara sehat dan re-evaluasi terhadap forum pelabuhan/bandara sehat yang telah terbentuk dengan mendorong partisipasi pengelola pelabuhan/bandara sehat sehingga tidak ada lagi TPP yang belum dilaksanakan pelaksanaan *labelling* dan SLHS yang menghambat untuk pelaksanaan target Pelabuhan dan Bandara Sehat.
4. Meninjau ulang penetapan target kinerja dalam setiap indikator agar pencapaian indikator akan maksimal dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan dapat dilaksanakan agar Deviasi halaman III DIPA tidak rendah karena tidak sesuai rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD). Selain itu kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik atas kegiatan dan realisasi anggaran tetap dilaksanakan.
5. Meningkatkan koordinasi secara berkala terkait Aplikasi monev kemenkeu yang mengalami perubahan cara perhitungan dan *update* aplikasi yang menyebabkan monitoring dan evaluasi terhambat.
6. Memperkuat komitmen bersama para pengelola kegiatan dalam pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan untuk meningkatkan pencapaian kinerja dengan diadakannya kegiatan *“Team Work Manajemen”*
7. Meningkatkan kolaborasi antara PNS, P3K dan pegawai outsourcing dalam mendukung kegiatan pembangunan zona integritas di lingkungan BKK Kelas I Padang.

PUSTAKA ACUAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKK Kelas I Padang Tahun Anggaran 2024

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) BKK Kelas I Padang Tahun 2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KKP Kelas II Padang Tahun 2023

Laporan Keuangan BKK Kelas I Padang Tahun 2024

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BKK Kelas I Padang Tahun 2020 – 2024

Permenkes RI No. 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

Peraturan MENPAN-RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Permenkes RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantina Kesehatan

LAMPIRAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PADANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Mawari Edy, M. Epid
Jabatan : Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu,
DHSM, MARS

Jakarta, 31 Januari 2024

Pihak Pertama

dr. Mawari Edy, M. Epid

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PADANG

No	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
1	2	3	4
A	Sasaran Strategis (08)		
	Menguatnya surveilans yang adekuat	Presentase kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus)	80 Persen
I	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor resiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	40 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		
	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	0.96 Indeks
		Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	100 Persen
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	0.95 Indeks
B	Sasaran Strategis (17)		
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik	90 Indeks
I	Program Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95 Nilai
		Nilai Reformasi Birokrasi	98 Nilai
		Persentase realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	96 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Kinerja Anggaran	87 Nilai
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93 Nilai
		Kinerja Implementasi WBK Satker	80 Nilai

No	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
1	2	3	4
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	83 Persen
		Persentase Realisasi Anggaran	96 Persen

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	3,636,532,000.00
2	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	16,724,300,000.00
TOTAL			20,360,832,000.00

Pihak Kedua



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu,
DHSM, MARS

Jakarta, 31 Januari 2024

Pihak Pertama



dr. Mawari Edy, M. Epid

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PADANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Mawari Edy, M. Epid
Jabatan : Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Yudhi Pramono, MARS
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



dr. Yudhi Pramono, MARS

Jakarta, 01 Juni 2024

Pihak Pertama

dr. Mawari Edy, M. Epid

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PADANG

No	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
1	2	3	4
A	Sasaran Strategis (08)		
	Menguatnya surveilans yang adekuat	Presentase kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus)	80 Persen
I	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor resiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	40 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		
	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	0.96 Indeks
		Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	100 Persen
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	0.95 Indeks
B	Sasaran Strategis (17)		
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik	90 Indeks
I	Program Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95 Nilai
		Nilai Reformasi Birokrasi	98 Nilai
		Persentase realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	96 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Kinerja Anggaran	87 Nilai
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93 Nilai
		Kinerja Implementasi WBK Satker	80 Nilai

KERTAS KERJA INDIKATOR 1 : INDEKS DETEKSI DINI FAKTOR RISIKO DI BANDARA/PELABUHAN/PLBDN

No.	Baseline	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Pemeriksaan Orang	2,300,477	3,153,745	137%
2	Jumlah Pemeriksaan Alat Angkut	4,945	6,818	138%
3	Jumlah Pemeriksaan Barang (jenazah)	40	78	195%
4	Jumlah Pemeriksaan Lingkungan	2,073	2,222	107%

No	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max	Minimal	Score Min
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8	10	11=3*10
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	120	120.0	600.00	100	120	600		
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	5	120	120.0	600.00	100	120	600		
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	3	120	120.0	360.00	100	120	360		
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	107	107.0	535.00	100	120	600		
TOTAL					2,095.00			2,160.00		

Rumus index adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal)

Nilai Indeks = 2.095/2160 = 0,97

Berdasarkan USG (Urgency, Seriousness, Growth)

	Urgency	Seriousness	Growth	Rata-Rata
Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	5	5	5.0
Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	4	5	5	4.7
Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	5	3	2	3.3
Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	5	4	4.7

KERTAS KERJA INDIKATOR 2 : PERSENTASE FAKTOR RISIKO PENYAKIT DI PINTU MASUK YANG DIKENDALIKAN PADA ORANG, ALAT ANGKUT, BARANG DAN LINGKUNGAN

Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan Pada Orang

NO	Pemeriksaan Orang	Jumlah FR ditemukan	Pengendalian Faktor Risiko				Total dikendalikan	%
			Rujuk	Vaksinasi/ Penerbitan ICV Baru	Tolak Berangkat	Hasil Anamnesa Pemeriksaan Fisik dan Gejala Klinis Penumpang Layak melakukan Perjalanan		
1	Pelaku perjalanan dengan suhu Tinggi >37,5	1	0	0	0	1	1	100
2	Pelaku perjalanan dengan COVID 19	0	0	0	0	0	0	100
3	Pelaku perjalanan yang sakit	1695	212	0	22	1461	1695	100
4	pelaku perjalanan yang Hamil >32 minggu	93	0	0	24	69	93	100
5	pelaku perjalanan dengan Penyakit menular yang menimbulkan wabah	0	0	0	0	0	0	100
6	ICV Palsu/Expired	50	0	50	0	0	50	100
Total		1839					1839	100

Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan Pada Alat Angkut

NO	Pemeriksaan Alat Angkut	Jumlah FR ditemukan	Pengendalian Faktor Risiko						Total dikendalikan	%
			Fumigasi	Disinseksi	Disinfeksi	OME	Bebas Karantina	Surat Pernyataan		
1	Kapal terjangkit penyakit yang menimbulkan wabah	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2	Pesawat haji dari Arab Saudi	68	0	0	68	0	0	0	68	100
3	Dokumen Kesehatan Kapal Tidak Lengkap/ Tidak Berlaku	0	0	0	0	0	0	0	0	100
4	Kapal yang ditemukan tanda-tanda kehidupan vektor	4	1	3	0	0	0	0	4	100
Total		72							72	100

Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan Pada Barang

NO	Pemeriksaan Barang	Jumlah FR ditemukan	Pengendalian Faktor Risiko		Total dikendalikan	%
			Tolak keberangkatan	Tunda untuk melengkapi dokumen		
1	Jenazah yang tidak memenuhi syarat	0	0	0	0	0
Total		0			0	0

Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan Pada Lingkungan

NO	Pemeriksaan Lingkungan	Jumlah FR ditemukan	Pengendalian Faktor Risiko			Total dikendalikan	%
			Spraying	Fogging	Penyuluhan		
1	TTU Memenuhi syarat yg sebelumnya tidak memenuhi syarat	1	0	0	1	1	100
2	TPM Memenuhi syarat yg sebelumnya tidak memenuhi syarat	0	0	0	0	0	100
3	Air Memenuhi syarat yg sebelumnya tidak memenuhi syarat	0	0	0	0	0	100
4	Keberadaan vektor yang melebihi syarat/ ambang batas	42	30	12	0	42	100
Total		43				43	100

Parameter Perhitungan Capaian 2024

No.	Pemeriksaan	Jumlah FR yang ditemukan	Jumlah FR dikendalikan	Persentase FR yang dikendalikan $(4/3)*100$
	1	3	4	5
1	Pemeriksaan orang	1,839	1,839	100
2	Pemeriksaan alat angkut	72	72	100
3	Pemeriksaan barang	-	-	-
4	Pemeriksaan Lingkungan	43	43	100
Total		1,954	1,954	100

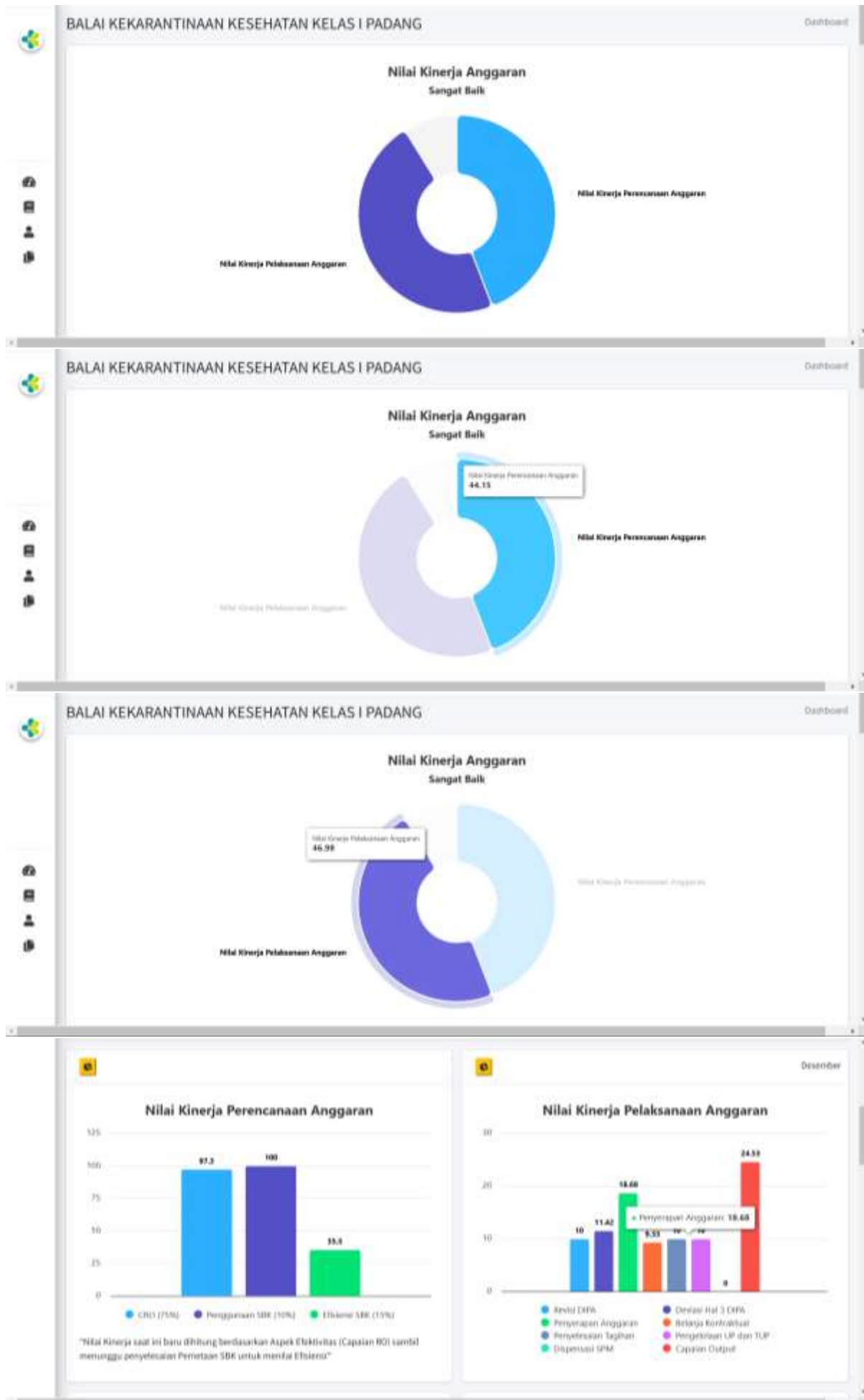
KERTAS KERJA INDIKATOR 3 : INDEKS PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO DI PELABUHAN / BANDARA / PLBDN

NO	Indeks Pengendalian di pintu masuk negara	Baseline Realisasi
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	100
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	100
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	100
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	100
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	100
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	100
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	100
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	96
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	90
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	90

NO	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max	Minimal	Cov Min	Score Min
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8	10	11	12=3*11
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	5	100	100	500.00	100	100	500			
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	4	100	100	400.00	100	100	400			-
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	3	100	100	300.00	100	100	300			-
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	4	100	100	400.00	100	100	400			-
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	4	100	100	400.00	100	100	400			-
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	5	100	100	500.00	100	100	500			
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	5	100	100	500.00	100	100	500			
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	4	100	100	400.00	100	100	400			
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	5	98.18	98	490.90	100	100	500			
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	5	100	100	500.00	100	100	500			
Total					4,390.90			4,400			0

Rumus index adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal) : $((6/(9+11))-0)$ = 1.00

KERTAS KERJA INDIKATOR 4 : NILAI KINERJA ANGGARAN



Progress Rincian Output



99.19 adalah Rasio-rasio progress seluruh capaian RO di Satuan Kerja Balai Kekarifan kesehatan kelain (paling

Jumlah RO sebanyak 39 RO
 - 39 RO sudah selesai (progress = 100%)
 - 1 RO dalam proses (progress = 100%)
 - 0 RO belum ada proses (progress = 0%)

Data Anomali

Kasus	Keterangan	Jumlah RO	Persentase
Cas 1	PCRD dilaporkan & meskipun telah ada realisasi anggaran	0	0%
Cas 2	PCRD dilaporkan lebih rendah dari pada realisasi anggaran	0	0%
Cas 3	PCRD 100% namun capaian fiskal (PRRD) masih 0	0	0%
Cas 4	PCRD 100% namun capaian fiskal (PRRD) tidak mencapai target/volume DPA	0	0%

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2024



Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	10.134.700.000	9.934.194.420	96.84 %
52 Belanja Barang	6.191.935.000	5.844.669.562	94.39 %
53 Belanja Modal	4.186.101.000	4.146.606.676	99.06 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

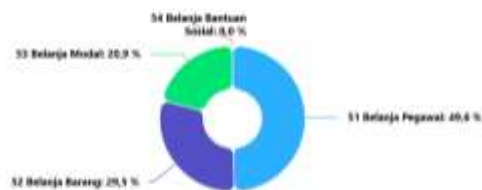
Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



Partisipasi Satuan Kerja

Rode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Ok	Nov	Des
1 K1307	BALAI KECARIFAN KESEHATAN KELAIN (Paling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

KERTAS KERJA INDIKATOR 5 : NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	010	024	415907	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PADANG	Nilai	100.00	76.10	93.38	93.33	100.00	100.00	98.11	93.95	100%	0.00	93.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.42	18.68	9.33	10.00	10.00	24.53				
					Nilai Aspek	88.05		96.68				98.11				

KERTAS KERJA INDIKATOR 6 : KINERJA IMPLEMENTASI WBK SATKER

BERITA ACARA HASIL DESK REVIU KINERJA IMPLEMENTASI WBK TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa Tanggal 3 Bulan Desember Tahun 2024 telah dilaksanakan desk reviu Kinerja Implementasi WBK Satker berikut ini:

Nama Satuan Kerja : BKK KELAS I PADANG

Adapun hasil desk disimpulkan sebagai berikut:

No.	MATERI	NILAI	REKOMENDASI PERBAIKAN
I	KOMPONEN PENGUNGKIT	49,16	
A.	Aspek Pemenuhan	24,37	
1	Manajemen Perubahan	2,77	
2	Penataan Tatalaksana	3,50	Pada KIP, lengkapi data dukung dengan daftar informasi publik yang bisa diakses dan screen shoot website dan semua akun media sosial terkait informasi yang disebarakan
3	Penataan Sistem manajemen SDM	4,18	1 Perbaiki Kebijakan Pola Mutasi/Rotasi, lengkapi SK Mutasi dari Pegawai yang dilakukan mutasi 2 Lakukan monev terhadap pegawai yang dimutasi, bagaimana dampak pegawai tersebut pada organisasi, buat laporannya. 3. Lengkapi TNA dengan menyertakan seluruh pegawai, dan lengkapi dengan dasar pertimbangan pengembangan kompetensi 4 Lengkapi laporan monev pengembangan kompetensi
4	Penguatan Akuntabilitas	4,11	
5	Penguatan Pengawasan	5,75	Dalam penyusunan SK gunakan regulasi terbaru, dan disusun sesuai hirarki
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4,05	
B.	Aspek Reform	24,79	
1	Manajemen Perubahan	3,33	
2	Penataan Tatalaksana	3,00	
3	Penataan Sistem manajemen SDM	2,93	Jadikan hasil assement sebagai dasar pengembangan kompetensi, pengembangan karir, dan pemberian reward dan punishment
4	Penguatan Akuntabilitas	4,28	
5	Penguatan Pengawasan	6,25	Buat kajian efektivitas inovasi/program pengendalian
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	
II	KOMPONEN HASIL	32,84	
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	15,83	
a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	14,58	
b.	Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian	1,25	
2	Pelayanan Publik yang Prima	17,01	
	Nilai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan	17,01	
	TOTAL NILAI	82,00	

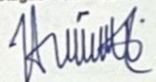
Ketua Tim Kerja Layanan Publik dan ZI,

NIP

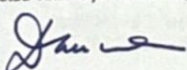
Mengetahui,
Kepala BKK Kelas,

NIP

Petugas Desk Eselon 1 Ditjen P2P,


Noviani Tuasikal, SH
NIP. 199111302015032003

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Hukormas,


Dewi Nurul Triastuti, SKM,SH
NIP 198203212006042002

54	DWI JUANDANI, S.KOM							26												26	Terpenuhi
55	SERLY ANGRAYNI, S.E.													32						32	Terpenuhi
56	VINA OKTARITA, S.E											6		15						21	Terpenuhi
57	MEILANI Z.E, AMd.KL													20						20	Terpenuhi
58	BRILLIANITA AZMIR, AMd. KL								29					30						59	Terpenuhi
59	RITA MULYA SARI, AMd							22			10									32	Terpenuhi
60	ESI NEFRITA, AMd		20																	20	Terpenuhi
61	DENA ISWARA, A.Md.KL							14	2						8			4		28	Terpenuhi
62	FANNI YONANDA, A.Md.KL								30					10						40	Terpenuhi
63	VERA OKTAVIANI, A.Md.KL								2					20						22	Terpenuhi
64	MUDRIKAH ROMATULLAH, A.Md.Kes.													44						44	Terpenuhi
65	RAHAYU MEILIA PUTRI, A.Md.KL													22						22	Terpenuhi
66	LIDIA FITRAH, A.Md.KL													22						22	Terpenuhi
67	DESSY RAMADHANI, A.Md.Kes													20						20	Terpenuhi
68	SUHERLAN													20						20	Terpenuhi
69	YESKA FATRINA											8		20						28	Terpenuhi
70	MUHAMMAD AKBAR YOZA													38						38	Terpenuhi
71	RINI RAHYU NINGSIH													27						27	Terpenuhi

KERTAS KERJA INDIKATOR 8 : PERSENTASE REALISASI ANGGARAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	415907 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PADANG	PAGU REALISASI	10,134,760,000 9,814,194,420 (96.84%)	6,191,935,000 5,844,669,562 (94.39%)	4,186,101,000 4,146,606,676 (99.06%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	20,512,796,000 19,805,470,658 (96.55%)
		SISA	320,565,580	347,265,438	39,494,324	0	0	0	0	0	0	707,325,342
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	10,134,760,000 9,814,194,420 (96.84%)	6,191,935,000 5,844,669,562 (94.39%)	4,186,101,000 4,146,606,676 (99.06%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	20,512,796,000 19,805,470,658 (96.55%)
		SISA	320,565,580	347,265,438	39,494,324	0	0	0	0	0	0	707,325,342